



# BERKHAS

kliping informasi dan berita  
dari berbagai media massa

**VOLUME VI FEBRUARI 2008**

AGRARIA



PERPUSTAKAAN AKATIGA

Jl. Tubagus Ismail II/2 Bandung 40134

Telp: 022-2502302, Fax: 022-2532326,

Email: [perpustakaan@akatiga.org](mailto:perpustakaan@akatiga.org)

[www.akatiga.org](http://www.akatiga.org)

Berkhas merupakan salah satu media Akatiga yang menyajikan kumpulan berita dari berbagai macam surat kabar, majalah, serta sumber berita lainnya. Jika pada awal penerbitannya kliping yang ditampilkan di Berkhas dilakukan secara konvensional, maka saat ini kliping dilakukan secara elektronik, yaitu dengan men-*download* berita dari situs-situs surat kabar, majalah, serta situs berita lainnya.

Bertujuan untuk menginformasikan isu aktual yang beredar di Indonesia, Berkhas diharapkan dapat memberi kemudahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencarian data atas isu-isu tertentu. Berkhas yang diterbitkan sebulan sekali ini setiap penerbitannya terdiri dari isu Agraria, Buruh, dan Usaha Kecil.

Untuk memperluas area distribusi, Berkhas diterbitkan melalui 2 (dua) macam media yaitu media cetakan (*hardcopy*) serta media *online* berupa *pdf file* yang dapat diakses melalui situs web Akatiga ([www.akatiga.or.id](http://www.akatiga.or.id)).

## Daftar Isi

Impor Pangan dan Hak Hidup Petani-----	1
Revitalisasi Pertanian Harus Menyeluruh -----	2
Secepat Distribusikan Urea Bersubsidi-----	4
Krisis Pangan Tekan Penerimaan -----	5
Harga Beras di Cirebon Saat Ini Turun Drastis -----	7
Subsidi Pangan Ditambah -----	8
Banyumas dan Banjarnegara Rawan Pangan -----	11
UU tentang Pangan Perlu Direvisi-----	13
Petani Merasa Tak Dilindungi-----	14
Stabilisasi Pangan Harus Segera Dilakukan -----	16
Kesejahteraan Petani Yogya Turun-----	17
Beri Petani Insentif-----	18
Produksi Padi di Pantura Terancam Merosot -----	20
Dialokasikan, 345.000 Ton Pupuk Organik Bersubsidi -----	21
Perpres Stabilisasi Pangan-----	22
Stabilisasi Harga Pangan -----	24
Target Produksi Gabah Kering Giling Naik 5 Persen-----	25
Stabilisasi Pangan Perlu Rp 13,7 T -----	27
80 Ribu Hektare Lahan di Garut Kritis-----	29
Petani Khawatirkan Serangan Hama Padi-----	30
Ribuan Petani Gelar Unjuk Rasa di Semarang Hari Ini-----	31
Enam Langkah Capai Ketahanan Pangan (2)-----	32
Petani Tak Menikmati Harga Tinggi-----	33
Ribuan Petani Unjuk Rasa-----	34
Jatah untuk Serang Berkurang -----	35
Kebijakan Pangan Picu Konversi Lahan-----	37
Ketahanan pangan & misi komersial Bulog-----	39
Petani Masih Sulit-----	42
Perpres Belum Berdampak-----	43
Irigasi Teknis Sulut Diperbaiki -----	45
Distributor Pupuk Akan Dikurangi-----	46
Petani Kopi Menaruh Harapan Besar-----	47

Petani Sulit Dapat Pupuk-----	48
Ribuan Hektare Sawah di Pantura Tergenang Air-----	49
Hama Serang Tanaman Kelapa-----	50
Lahan milik petani makin berkurang -----	51
Kemarau Ancam Petani Sumut-----	52
Bulog Didesak Percepat Serap Gabah-----	53
Pupuk Urea Langka di Cirebon & Kuningan -----	54
Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian -----	55
Mentan: RI Krisis Harga, Bukan Pangan -----	56
Petani Bengkulu Tak Berminat Tanam Kedelai-----	58
Ratusan Ha Sawah di Tuban Terendam Banjir -----	60
Setiap Tahun, 100 Ribu Hektare Lahan Pertanian Hilang -----	61
Petani Tuntut Pengembalian Dana PE CPO -----	63
BPRS Membidik Pembiayaan Sektor Pertanian-----	65
Pemerintah Diminta Basmi Hama Padi -----	66
Bulog Belum Beli Gabah -----	67
Petani Karawang Kesulitan Pupuk -----	69
Prinsip Susuganan ala Petani Pesisir Utara -----	70
Ribuan Hektar Padi Terancam Mati-----	72
Terancam Krisis Pangan -----	74
Suplai Pupuk Urea Masih Belum Lancar -----	75
Petani Tuntut Kenaikan HPP Gabah dan Beras-----	77
Krisis Harga Pangan-----	78
Pendapatan Petani Kelapa Meningkat -----	79
Akibat Hama, Produksi Padi Menurun-----	80
Dirut Perum Bulog Instruksikan Divre dan Subdivre Beli Gabah Petani -----	81
Harga Beras di Pasar Mulai Menurun -----	82
Involusi Petani-----	83
Petani Tiga Desa Unjuk Rasa di DPRD-----	86
Petani Minta Harga Gabah Naik -----	87
Banjir Rugikan Petani Rp 9,5 M-----	89
Harga Urea Terus Naik -----	91
Panen Padi Sudah Dimulai-----	92
HKTI Minta Jaminan Pasar-----	93

KTNA Usulkan Kenaikan Harga Gabah-----	94
Ribuan Petani Japung Menghentikan Budi Daya -----	96
Syarat Kualitas Gabah Petani Ditingkatkan-----	97
Petani Citepus Hilir Keluhkan Terbatasnya Air-----	98
Tunda Kebijakan Persyaratan Mutu Gabah-----	99
Tiga Pekan Petani Menjerit 4 Ribu Ton Pupuk Dibongkar-----	101
1.000 ha Sawah Gagal Tanam -----	102
Lahan Kritis di Garut Capai 52.052 Hektare -----	103
Penyerapan Beras Lokal tidak Abaikan Kualitas -----	104
Kebijakan Pangan Harus Realistis -----	105
Kebijakan ketahanan pangan rugikan petani-----	106
Bulog Didesak Beli Beras Petani-----	108
Petani Dalam Ancaman Fisik dan Mental -----	109
Kuartal II, Harga Bahan Pangan Naik -----	111
Bencana ekologis dan krisis pangan-----	113
Panen Anjlok, Petani Kesulitan Modal Tanam -----	116
Harga Pupuk di Bengkulu Naik 428 Persen -----	117
Revitalisasi perkebunan kopi sudah urgen-----	118
Perbaiki Struktur Pasar Pertanian -----	121
Musim Hujan Sebabkan Gabah Kering Anjlok -----	123
Petani Kab. Cirebon Masih Kekurangan Pupuk -----	124
Mentan: Indonesia Bisa Jadi Eksportir Beras -----	125
5.000 Hektar Tanaman Padi Puso-----	126
Penyerapan Beras Terhambat Aksi Spekulatif-----	127
Petani Minta IPAL Industri Diawasi-----	128

## **Opini**

# **Impor Pangan dan Hak Hidup Petani**

Khudori

Impor, termasuk impor pangan, merupakan kegiatan ekonomi yang lumrah. Impor dibutuhkan apabila hasil pertanian tidak dapat dipenuhi dari produksi sendiri. Impor jadi krusial karena ia memiliki hubungan dengan produk pertanian yang dihasilkan di dalam negeri. Sepanjang jumlah yang diimpor tidak signifikan atau produk domestik sudah siap bersaing, impor tidak menjadi masalah. Persoalannya, daya saing tidak berdiri sendiri, tapi merupakan resultante kebijakan di dalam negeri dan kebijakan negara-negara lain.

Implikasinya, kita tidak bisa melihat persoalan daya saing produk pertanian di dalam negeri tanpa memeriksa secara saksama kebijakan negara lain. Contohnya Afrika Selatan. Dalam kasus gula, negara itu menyimpulkan bahwa persoalan gula tidak bisa diselesaikan secara unilateral Afrika Selatan saja, tetapi perlu diselesaikan secara global. Agar tidak merugikan diri sendiri, negara ini memilih pola monopoli gula oleh South African Sugar Association. Hal yang sama bisa diperiksa pada komoditas-komoditas lain.

Ditilik dari kepentingan untuk memberikan jaminan hak hidup petani, impor jadi masalah fundamental. Sesuai amanat konstitusi bahwa warga negara dijamin memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan kemanusiaan dan fakir miskin dipelihara oleh negara, jelas hak hidup petani tidak bisa diabaikan. Sebaliknya, negara wajib melindunginya. Karena itu, kebijakan apapun tidak boleh mensubordinasi hak hidup petani. Misal impor dan daya saing. Daya saing berjalan lurus dengan efisiensi. Tapi efisiensi bukanlah tujuan apabila tidak manusiawi. Perbudakan itu efisien, tapi tepatkah di era sekarang? Harga pangan murah adalah efisien. Tapi ini tidak manusiawi apabila mematikan hidup petani.

Pertanian di negara-negara maju basisnya adalah petani, bukan perusahaan besar seperti di negara-negara bekas jajahan. Kehidupan pertanian yang kuat di negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa bukanlah hasil ciptaan semalam. Tetapi dibangun secara gradual dengan sebuah keyakinan bahwa negara akan kuat apabila pertaniannya kuat. Misal, Abraham Lincoln, Presiden AS ke-16, meyakini bahwa AS akan jadi negara kuat apabila warga negara menjadi pemilik negara. Karena mayoritas warga saat itu petani, interpretasi keyakinan tersebut diwujudkan dalam kepemilikan lahan petani yang cukup.

Diciptakanlah Homestead Act 1862 yang melegalkan transfer tanah-tanah negara ke petani dengan luasan per unit 65 hektar. Untuk menjamin hak hidup dan melindungi petani dari perilaku curang dibuatlah sekitar 87 UU, misalnya dalam pemasaran ada Agriculture Marketing Agreement Act 1937. Lahan petani tidak menciut, tapi justru bertambah jadi rata-rata 190 hektar (1997). Hal sama berlangsung di Malaysia, Thailand dan Jepang. Kecenderungan ini bertolak belakang dengan yang terjadi di Indonesia.

Tidak seperti era sebelumnya, sejak ada UU Sistem Budidaya Tanaman 1992 petani diberi kebebasan memilih tanaman/ternak sesuai keinginan petani. Tapi apakah nilai kebebasan itu bersifat riil? Petani miskin pada hakekatnya tidak memiliki kebebasan -walau dijamin UU- untuk memilih. Karena kemiskinannya, petani tak bisa menanam tanaman paling menguntungkan, mengakses sarana, informasi, modal dan pasar. Semakin banyak yang tidak dapat dilakukan petani (can do) petani kian tidak merdeka. Dan kian rendah status petani dalam masyarakat (can be), maka semakin tidak merdeka juga dia.

Acuan empirik bisa dilihat sejarah perkebunan besar. Perkebunan besar mulai punya hak hidup saat ada Agrarisch Wet 1870. UU ini menjamin hak hidup perusahaan besar. Maka berdirilah perusahaan-perusahaan besar dengan tanah-tanah perkebunan yang luas didukung paket kebijaksanaan yang komplemen. Ini berlaku hingga sekarang: perusahaan-perusahaan besar menguasai tanah-tanah perkebunan hingga ratusan ribu hektar, berdampingan dengan petani gurem di sekitarnya. Modal, teknologi dan berbagai jaminan lain terpusat pada perusahaan besar. Salah satunya adalah Program Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN). Kebijakan ini berbeda dengan jalan Abraham Lincoln.

Apa yang dilakukan (negara) buat petani? Tampaknya minimal, bahkan beleid negara bersifat memarjinalkan petani. Salah satu indikator kemajuan petani bisa dilihat dari kemampuan petani dalam skala usahanya. Luas areal per petani cenderung mengecil, dan gurem. Dengan lahan yang kian sempit, kian tidak bebas petani menggantungkan hidup pada lahan. Ditambah kecenderungan penurunan harga riil produk primer, maka pendapatan riil petani kian merosot. Politik pembiaran dan liberalisasi tak terkendali telah menghancurkan modal sosial petani dan destabilisasi harga. Hidup petani jatuh di tebir jurang karena harus bersaing dengan produk negara lain yang disubsidi dan di-dumping.

Ekspor-impor dalam dunia yang menjelma "desa global" memang penting. Tetapi globalisasi tidak menjamin level permainan seimbang. Negara-negara berkembang tidak saja berhadapan dengan kuatnya pertanian negara maju, tetapi juga harus menghadapi keberpihakan yang bias organisasi-organisasi multilateral semacam WTO, IMF dan Bank Dunia. Dalam konstelasi dunia demikian, pilihan bagi negara berkembang tidak banyak. Bahkan, secara ekstrem pilihanya -untuk 50 tahun ke depan-hanya tunggal: pertanian.

Jantung persoalannya terpusat pada bagaimana mendongkrak produktivitas dan kualitas produk pertanian kita. Upaya ini terbentur pada iptek, pasar dan modal yang masih dikuasai negara maju. Ini muncul karena di dunia ini tidak ada yang gratis. Naluri menguasai dunia negara maju akan selalu abadi. Situasi ini memberi isyarat bahwa kita harus mengurangi ketergantungan, khususnya produk-produk yang secara alamiah bisa dihasilkan sendiri, terutama pangan. Dengan menekan ketergantungan selain menghemat devisa juga menciptakan pekerjaan. Jadi, bila hak hidup petani jadi dasar dalam melihat impor, yang sebenarnya dibangun tak hanya ketergantungan pangan, tapi juga penciptaan lapangan kerja dan berusaha bagi sebagian besar petani, mayoritas warga di negeri ini.

Peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi.

## **Nusantara**

### **Revitalisasi Pertanian Harus Menyeluruh**

Yogyakarta | Jum'at, 01 Feb 2008

Penghapusan biaya impor pangan oleh Departemen Perdagangan dinilai sebagai keputusan darurat yang sifatnya sporadis dan jangka pendek. Untuk mewujudkan kemandirian pangan, Departemen Pertanian diingatkan agar memilih kebijakan strategis jangka panjang dan tidak bersifat sementara.

“Revitalisasi pertanian yang dicanangkan pemerintah pelaksanaannya masih sepotong-sepotong tidak menyeluruh. Sangat ironi karena untuk pangan bergantung pada bangsa lain,” kata Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada, Eni Harmayani di Yogyakarta, Kamis (31/1).

Harmayani menyebut program pembangunan sektor pertanian perlu diperbaiki. Dicontohkan persoalan soal pemberian benih, distribusi pupuk dan pelaksanaan lelang benih untuk mendukung peningkatan produksi padi nasional dilakukan tak maksimal. “Perlu ada perbaikan, karena soal lelang benih misalnya dilakukan setelah memasuki masa tanam,” ujarnya.

Dosen Teknologi Hasil Pertanian itu menambahkan saatnya pemerintah harus lebih memberi perhatian terkait kebijakan food industry (industri pangan) juga food supply atau ketersediaan pangan yang dilakukan berkesinambungan dengan melibatkan akademisi, pengusaha, dan petani di dalamnya.

Salah satu kunci keberhasilan program revitalisasi pertanian, yaitu adanya rasa percaya antar pihak. Ia mencontohkan di negara Thailand revitalisasi bisa berjalan karena adanya kebijakan yang berpihak kepada petani. Pengusaha memberi kemudahan dan membantu petani. Akademisi turun tangan bantu petani dan mendampingi mereka dalam penerapan teknologi. Di sisi lain, petani juga diberi kepastian harga untuk jaminan kesejahteraan mereka.

“Pemerintah Thailand membantu pembangunan pipa pengairan, fasilitas gratis biaya angkut hasil panen. Mereka membantu petani. Berbeda dengan di Indonesia, ada saling tidak percaya satu sama lain,” katanya. Much Fatchurochman



## **Ekonomi Mikro/ Sektor Riil**

### **Segera Distribusikan Urea Bersubsidi**

Serang | Jum'at, 01 Feb 2008

DINAS Pertanian Banten meminta produsen pupuk bersubsidi segera mendistribusikan kekurangan Urea di sana. Keterlambatan itu sempat mengakibatkan kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran. "Kebutuhan pupuk untuk Januari sebenarnya 9.900 ton, tapi sampai saat ini baru dikirim produsen sekitar tujuh ribu ton," kata Kepala Dinas Pertanian Banten, Egi Djanuiswati kepada Jurnal Nasional, Kamis (31/1).

Menyikapi kekurangan pupuk bersubsidi ini, Selasa(29/1) beberapa petani di wilayah Banten unjuk rasa di depan Kantor Gubernur. Mereka menuntut pemerintah daerah memberi jaminan tersedianya pupuk untuk kebutuhan mereka.

Sebagian proses tanam terganggu karena tidak tersedia pupuk bersubsidi. Tahun 2008 luas tanam di Banten 49 ribu hektare (ha). Produsen berdalih keterlambatan distribusi karena pabrik sedang mengalami kerusakan, hingga produksi terhambat. "Pabrik pupuk Kujang sudah berjanji segera memperbaiki mesin dan distribusi lancar kembali," katanya.

Kepada produsen, Egi berharap, kekurangan kebutuhan Januari tetap dipenuhi. Selain itu, kebutuhan Februari harus dipenuhi dalam seminggu ini, karena petani yang menanam Desember sudah mulai pemupukan.

Kelangkaan pupuk bersubsidi, katanya, mulai terasa di wilayah Banten menyusul kebijakan pengurangan jatah wilayah itu tahun 2008. Pengurangan karena kecilnya daya serap penggunaan pupuk tahun 2007 di Banten.

Manager PT Pupuk Sriwidjaja Banten, Hairul Lizano mengatakan, berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian No 76/Permentan/OT/140/12/ 2007, jatah subsidi pupuk Banten tahun 2008, 73.059 ton, SP36 15.200 ton, ZA 1350 ton, NPK 14.850 ton. Tahun 2007, jatah urea 74.798 ton, NPK 11.587, ZA 1350 ton. Untuk jenis pupuk SP36 naik, 18.817 ton.

Kendati jatah pupuk bersubsidi Banten tahun 2008 dikurangi, namun petani tak akan kekurangan pupuk. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun 2007, alokasi pupuk 74.798 ton, yang terserap hanya 60 ribu ton lebih. Yogyo Susaptoyono

Yogyo Susaptoyono

## Krisis Pangan Tekan Penerimaan

Jumat, 1 Februari 2008 | 07:38 WIB

Jakarta, Kompas - Besarnya insentif untuk meredam krisis pangan menyebabkan penerimaan perpajakan tertekan. Itu disebabkan pemberian insentif pajak dan penghapusan bea masuk yang diperlukan untuk menstabilkan harga pangan kian meningkat.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (31/1), mengatakan, salah satu insentif yang secara otomatis berdampak terhadap penerimaan perpajakan adalah pajak ditanggung pemerintah (DTP). Program ini diterapkan untuk meringankan harga jual komoditas pangan utama yang mengalami kenaikan harga di pasar dunia, antara lain minyak goreng, terigu, dan kedelai.

"Itu (program DTP) mengurangi penerimaan," ujar Darmin.

Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan percepatan perubahan APBN 2008 kepada Panitia Anggaran DPR. Dalam paparannya dikemukakan, penerimaan perpajakan akan menurun Rp 26,1 triliun, yakni dari Rp 592 triliun dalam rencana APBN 2008 menjadi Rp 565,9 triliun dalam perubahan perkiraan APBN 2008.

Salah satu penyebabnya, program pengurangan beban pajak atas komoditas pangan strategis, beras, minyak goreng, terigu, dan kedelai. "Nilai DTP untuk kedelai mencapai Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun," kata Darmin.

Untuk mempercepat penurunan harga kebutuhan pokok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi harga setelah rapat kabinet paripurna, Jumat ini. Untuk mengeluarkan paket kebijakan ini, Presiden menggelar serangkaian rapat dengan para pengusaha bahan pangan, BUMN.

### Langkah pengamanan

Dalam paparan Menteri Keuangan diungkapkan langkah pengamanan agar penerimaan perpajakan tak menurun hingga Rp 26,1 triliun. Langkah ini akan menghasilkan Rp 29,9 triliun.

Langkah yang dimaksud antara lain mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Ini dimungkinkan karena basis tarif PPh-nya menggunakan standar lama, yakni 30 persen bagi wajib pajak (WP) badan dan 35 persen untuk WP orang pribadi.

Nilai yang dihasilkan dari penerapan tarif lama ini sekitar Rp 9 triliun. Itu dimungkinkan karena target penerimaan pajak dalam APBN 2008 didasarkan pada tarif PPh baru yang lebih rendah. Namun, tarif ini belum bisa diterapkan karena RUU Perubahan PPh belum disahkan DPR.

Langkah lainnya, mengoptimalkan penerimaan PPh dari perusahaan swasta dan BUMN yang untuk dari penjualan komoditas yang mengalami kenaikan harga. "Masih ada tagihan di beberapa pengusaha batu bara Rp 2,5 triliun," ujar Darmin.

### Lahan pertanian cukup

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Hilman Manan menjelaskan, saat ini belum ada kendala keterbatasan lahan apabila ingin meningkatkan produksi beras, jagung, dan kedelai. Total lahan sawah beririgasi saat ini sekitar 7,2 juta hektar. Dari luasan itu sekitar 5 juta hektar lahan sawah beririgasi teknis, sisanya ada yang jaringan irigasinya rusak.

Dengan menghitung penanaman padi di lahan beririgasi teknis seluas 5 juta hektar saja, dalam satu musim tanam akan didapat produksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 25 juta ton. Ini mengacu pada perhitungan rata-rata produktivitas tanaman padi di lahan teknis rata-rata 5 ton per hektar.

Di lahan beririgasi teknis dalam satu tahun dipastikan bisa ditanami padi dua kali musim tanam. Itu artinya akan ada tambahan produksi 25 juta ton GKG, yakni menjadi 50 juta ton.

Apabila produksi beras tahun 2008 ingin ditingkatkan menjadi 61 juta ton, hanya butuh tambahan penanaman di lahan teknis golongan I seluas 2,2 juta hektar. Luasan tanaman tambahan ini bisa didapat dari musim tanam gadu kedua yang berlangsung Juni-September.

Sementara itu, peneliti ekonomi Universitas Gadjah Mada, Prof Mudrajat Kuncoro, mengingatkan, paket kebijakan hendaknya tidak hanya diterbitkan, tetapi juga dimonitor dan dievaluasi implementasinya. Revitalisasi pertanian, misalnya, selama ini tidak berjalan baik.

"Pemerintah pusat harus menyadari, apa yang ditentukan di tingkat pusat tidak semuanya dilaksanakan di daerah. Sejak otonomi daerah, ada 485 kabupaten atau kota dan 33 provinsi yang mempunyai gaya berbeda-beda dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat," tegasnya.

Menurut dia, jika paket kebijakan sudah dijadikan kebijakan nasional, semestinya juga diamini pemerintah daerah untuk segera dilaksanakan. Tanpa upaya mengevaluasi mengubah pola pikir yang selalu menunggu perintah dari pemerintah pusat, kebijakan nasional tidak akan berhasil diimplementasikan.

Contoh riil terjadi di daerah banjir di Jatim dan Jateng. Dampak terhadap stok pangan nasional sangat luar biasa jika daerah pertanian itu tidak segera direhabilitasi. Pemerintah seharusnya memiliki antisipasi.

Adapun peneliti dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Acuviarta mengatakan, rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat perpres tentang stabilisasi harga pangan merupakan kebijakan populis dan bersifat jangka pendek. Masyarakat menginginkan pembenahan dalam produksi tanaman pangan dan peningkatan sumber daya dalam bidang pertanian.

"Kebijakan seperti itu hanya akan menambah defisit keuangan negara. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan," katanya. (OIN/OSA/HAR/MAS/A04)

## **Harga Beras di Cirebon Saat Ini Turun Drastis Selain Ada Raskin, Pedagang Diduga Melempar ke Pasar Lokal**

CIREBON, (PR).-

Harga beras dalam sepekan terakhir ini di Kab. dan Kota Cirebon turun drastis. Dari semula di atas Rp 6.000,00/kg untuk kualitas medium, kini turun menjadi Rp 5.000,00/kg.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, Kamis (31/1), "terjun bebasnya" harga beras itu selain disebabkan oleh adanya program beras untuk warga miskin (raskin) yang sudah mulai berjalan, juga dipercepat oleh ulah pedagang beras terkait razia beras oplosan di Pasar Induk Cipinang Jakarta. Pedagang yang semula menjual berasnya ke Cipinang, kini melemparnya ke pasaran lokal.

Para pedagang di Pasar Sumber membenarkan hal tersebut. Kepada "PR", mereka mengaku kalau beras itu tiba-tiba membanjiri pasaran. "Sekarang lagi banyak beras. Yang ada belum terjual habis, sudah datang lagi dari para pedagang ke pasar-pasar," tutur Saefulah (46), salah seorang pedagang di Pasar Sumber.

Hal senada dikemukakan pedagang di Pasar Jagasatru, Kota Cirebon. Banyaknya pasokan beras membuat harga tertekan hingga maksimal hanya mencapai Rp 5.000,00/kg. Semula harga beras sudah menyentuh Rp 6.000,00/kg. Hal itu terjadi pada akhir Desember sampai pertengahan Januari, namun memasuki minggu terakhir, harganya mulai turun.

Kabulog Sub Divre Cirebon Drs. Slamet Subagio menuturkan, penurunan harga beras itu karena pasokan melimpah. Dia memperkirakan ada hubungan antara melimpahnya beras dan razia beras oplosan di Pasar Cipinang Jakarta.

"Pedagang tidak mau lama-lama menyimpan barang. Ketika polisi merazia beras oplosan di Cipinang, mereka mengalihkan beras ke kota lain dan pasar lokal. Ini yang menyebabkan beras di pasaran lokal melimpah dan berdampak pada penurunan harga," tutur dia.

Ketua Asosiasi Pedagang Komoditi Agro (APKA) Cirebon Sandi Wiranata menuturkan, beras yang dijual ke pasaran lokal itu sebenarnya sebagian kecil. Sedangkan sebagian besar dijual ke pasar-pasar di Bandung, Bogor, atau kota besar lainnya. "Yang dijual ke pasar lokal paling 30 persen, lainnya dijual ke pasar di luar Cipinang. Kalau semua dijual ke pasar lokal, bisa-bisa beras di Cirebon harganya bisa Rp 4.000,00/kg untuk medium," ujar dia.

Raskin

Turunnya harga beras juga disebabkan mulai dibukanya keran penyaluran raskin. Kabulog Subagio menuturkan, raskin bulan Januari sudah langsung dibagikan ke wilayah penyaluran, meliputi Kab Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Sedangkan untuk Kota Cirebon rencananya mulai awal Februari 2008.

"Transaksi beras otomatis menurun karena sebagian masyarakat miskin sudah menerima raskin yang harganya jauh lebih murah, hanya Rp 1.600,00/kg, dibandingkan dengan harga di pasaran umum yang di atas Rp 4.500,00/kg," tuturnya. (A-93)\*\*\*

## **BUMN Diminta Ikut Stabilkan Harga Bahan Pokok Subsidi Pangan Ditambah**

JAKARTA, (PR).-

Badan usaha milik negara (BUMN) diminta ikut menjaga stabilitas harga bahan pokok, dan pengamanan APBN. Upaya yang dapat dilakukan BUMN adalah menyediakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN sebesar Rp 1,3 triliun.

Hal itu diungkapkan Meneg BUMN Sofyan Djalil sesuai mengikuti rapat terbatas dengan sejumlah pimpinan BUMN di Istana Negara, Kamis (31/1). "Program itu akan kita fokuskan kepada masyarakat yang paling terkena dampak stabilitas harga tersebut," kata Sofyan.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, pemerintah berencana memberikan tambahan subsidi pangan dan insentif fiskal terkait dengan kenaikan harga pangan yang memberatkan masyarakat lapisan bawah. Insentif fiskal akan diberikan terhadap sejumlah komoditas pokok, seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, dan kedelai.

Sofyan menyebutkan beberapa program yang akan dilakukan BUMN untuk menstabilkan harga bahan pokok. Untuk jangka pendek, program itu berupa intervensi melalui pasar murah, membantu modal usaha-usaha kecil perajin dan pedagang tahu tempe dan pedagang martabak manis, serta memberikan modal kerja pinjaman dengan bunga bersubsidi.

"Langkah lainnya, mengintensifkan pemanfaatan lahan PTP dan lahan-lahan Perhutani untuk meningkatkan produksi pangan, serta memberikan bantuan kepada masyarakat dan petani yang bekerja di sana. Juga ada program pelatihan untuk memberikan kesempatan kerja bagi orang-orang muda," kata Sofyan.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar BUMN memberikan kontribusi yang optimal terhadap persoalan yang berhubungan dengan stabilisasi harga pangan. Presiden pun meminta BUMN berkontribusi dalam APBN.

"Pemerintah tetap akan fokus mengurangi kemiskinan dan mengurangi beban masyarakat. Oleh karena itu, paket kebijakan stabilisasi harga yang disampaikan Bapak Presiden, akan terus dimatangkan dan dilaksanakan," kata Sri.

Sri memaparkan, instruksi Presiden soal fisiensi, sangat penting dilakukan agar APBN terjaga. BUMN bersama pemerintah perlu mengoordinasikan dan mengharmonisasikan program kerjanya agar fokus pada tujuan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tanpa menciptakan tekanan-tekanan terhadap masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah.

Jatah raskin ditambah

Menurut Sri Mulyani, salah satu bentuk peningkatan subsidi pangan adalah menambah alokasi beras untuk keluarga miskin (raskin), dari 10 kg per rumah tangga miskin (RTM) menjadi 15 kg per RTM. "Penambahan volume raskin ini membutuhkan tambahan biaya Rp 2,3 triliun," katanya.

Pemerintah saat ini juga tengah menyusun subsidi untuk komoditas tahu dan tempe yang terkena dampak melonjaknya harga kedelai.

Sri Mulyani menjelaskan, untuk komoditas beras, pemerintah telah menurunkan bea masuk dari Rp 550,00 menjadi Rp 450,00 per kg. Pemerintah juga tetap akan menanggung PPN minyak goreng. Pemerintah juga akan terus memberlakukan bea keluar di atas 1.050 dolar AS untuk produk CPO, biofuel dan turunannya.

Bea masuk tepung terigu akan dihapuskan, sedangkan PPN-nya akan ditanggung pemerintah. Begitupun untuk komoditas kedelai, bea masuknya akan dihapus, dan PPh untuk impor kedelai diturunkan. Program subsidi pangan dan insentif fiskal itu merupakan bagian dari sembilan langkah pengamanan APBN 2008.

#### Usul Kadin

Ketua Kadin Indonesia, M.S. Hidayat mengatakan, pemerintah berencana akan mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) mengenai ketahanan pangan, Jumat (1/2) siang. "Secara garis besar, Kadin mengusulkan tiga hal untuk menjadi masukan dalam Perpres ini. Yaitu pembebasan bea masuk, peran swasta dalam distribusi, dan pemberdayaan Bulog untuk stabilisator tiga komoditas utama," katanya, se usai membuka Rapimprov Kadin Jabar, di Gedung BI Bandung, Kamis (31/1).

Menurut Hidayat, langkah darurat untuk mengatasi kelangkaan bahan pangan, Kadin mengusulkan adanya pembebasan bea masuk untuk sementara waktu. Terutama untuk beberapa komoditas utama yang saat ini sedang mengalami kelangkaan pasokan.

Selanjutnya, kata Hidayat, untuk distribusi berbagai bahan pokok tersebut, pemerintah diusulkan memberikan porsi lebih besar kepada swasta. Sehingga diharapkan bisa lebih cepat dalam menyalurkannya ke berbagai daerah. Namun, Hidayat mengharapkan adanya penegakan aturan yang tidak memberi toleransi untuk berbagai penyelewengan dalam distribusi.

Berkaitan dengan tiga komoditas strategis, yaitu jagung, kedelai, dan beras, Hidayat mengatakan, Kadin mengusulkan agar pemerintah memberdayakan kembali Bulog untuk berperan sebagai stabilisator harga ketiga komoditas tersebut.

#### Tepat sasaran

Kebijakan subsidi pangan yang rencananya diluncurkan hari ini harus dijadikan sebagai pilihan politik kebijakan yang strategis sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara agraris yang tepat sasaran. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Entang Sastraatmadja, di Bandung, Kamis (31/1) malam.

Subsidi ini, menurut Entang, harus didukung penerjemahan maksud kebijakan yang tepat. Jangan hanya menjadi program pemberian subsidi tanpa adanya pendewasaan diri dan salah penempatan. "Artinya, subsidi pangan itu harus diberikan pada pihak yang tepat," ujarnya.

Alur proses tersebut harus berawal dari suatu kebijakan yang relevan antara up to bottom dan bottom to up yang didukung dengan adanya suatu data base yang menjadi acuan yang akurat. Sebab adalah hal yang krusial menempatkan subsidi pada pihak yang tepat. Tambahan lagi, adanya kecenderungan di lapangan yang menetapkan data base sendiri akan menghambat penyaluran subsidi secara tepat. "Ada kecenderungan pemerintah memukul rata penerima subsidi tanpa mempertimbangkan kearifan lokal. Itu yang tidak tepat," ucap Entang.

Mengenai gambaran proses subsidi pangan yang tepat, Entang mengungkapkan, perlu suatu koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Dibarengi dengan koordinasi evaluasi berkelanjutan yang sejalan dengan pelaksanaan. (A-75/A-130/A-109/A-135/CA-172)\*\*\*

## Banyumas dan Banjarnegara Rawan Pangan

[PURWOKERTO] Rawan pangan mulai melanda beberapa daerah di Jawa Tengah (Jateng), khususnya Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara. Kedua daerah ini memiliki beberapa wilayah yang setiap musim kemarau selalu terjadi kasus rawan pangan atau kurang gizi. Istilah yang paling sering digunakan pemerintah kabupaten (pembkab) setempat adalah kemungkinan kekurangan makan (KKM).

Beberapa Desa di Banyumas yang terletak di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Gunung Tugel, Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan dan Desa Pagolongan dan Kedungrandu, Kecamatan Patikraja dalam dua minggu terakhir ini dilaporkan banyak warga yang mulai kesulitan makan.

Mereka yang tinggal di rumah-rumah sangat sederhana berukuran 4 X 4 meter, dan warga di sekitarnya mendesak kepada kepala kelurahan masing-masing agar diberi bantuan pangan.

Kepala Kelurahan Karangklesem, Harsono (40) sudah melaporkan ke petugas bagian kesejahteraan rakyat (kesra) di Pemkab Banyumas, tentang banyaknya warga sekitar TPA Gunung Tugel, baik yang masuk wilayah Kelurahan Karangklesem maupun yang masuk Desa Pegalongan yang minta bantuan pangan.

"Kami baru melapor kepada petugas kesra lewat telepon, karena sampai hari ini kami masih mendata jumlah warga yang kekurangan pangan. Yang jelas, jumlahnya di atas 100 keluarga," kata Harsono, di Banyumas, Kamis (31/1) siang.

Menurut pengamatan, Banyumas memiliki beberapa wilayah yang sering disebut kantong kemiskinan, antara lain di Desa Cikakak, Kecamatan Ajibarang dan Desa Kelapa Gading, Kecamatan Wangon.

Beberapa waktu lalu, SP sempat menyerahkan bantuan beberapa ton beras dari para pembaca SP kepada warga di Cikakak dan Kelapa Gading. Bantuan serupa juga diserahkan kepada warga yang kesulitan pangan di Banjarnegara antara lain di Kecamatan Bawang dan Kota. Bantuan lain berupa pangan dan perahu fiberglass juga diserahkan untuk para korban banjir di Cilacap, serta daerah banjir di Banyumas.

Saat ini di Banjarnegara, sudah banyak warga yang kelaparan. Untuk menyambung hidup, mereka hanya bisa makan makanan yang terbuat dari gaplek atau ubi yang dikeringkan kemudian dibuat tepung dan dikukus. Makanan itu disebut "leye".

Bupati Banjarnegara M Djasri membenarkan sebagian warganya yang tinggal di pegunungan banyak yang makan "leye". Mereka adalah warga miskin yang tinggal di daerah pegunungan yang gersang dan tidak mempunyai penghasilan tetap.

Dalam beberapa kali kesempatan setiap berkunjung ke daerah-daerah, Djasri selalu mengingatkan para kepala desa dan camat, bila terjadi hal-hal yang menyulitkan warganya, termasuk kurang pangan agar segera melapor kepada dirinya melalui bagian kesra.

### Stok Beras

Sementara itu, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Divre) Banyumas, Imam Syafei mengatakan, stok beras yang tersimpan di beberapa gudang Bulog Sub Divre IV Banyumas, Jateng sampai Jumat (1/2) masih ada 25.000 ton lebih.



"Jumlah ini masih cukup untuk alokasi beras warga miskin (raskin) di kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap. Jadi tidak mungkin terjadi rawan pangan," ujarnya, Jumat pagi di Banyumas.

Menurut Syafei, pihaknya akan menyalurkan 5.626 ton untuk empat kabupaten dalam wilayah eks Karesidenan Banyumas. Meskipun stok beras banyak berkurang, penyaluran beras untuk warga miskin sampai Mei tak perlu dikhawatirkan. Apalagi, awal Maret nanti sudah mulai panen, dan bulan April sudah mulai pengadaan. Jadi sebelum stok habis, sudah ada beras yang masuk gudang lagi.

Menjawab pertanyaan, Syafei mengatakan pengadaan pangan untuk tahun 2008 ditetapkan 70.000 ton beras. Angka itu sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2007 sebesar 67.000 ton. [WMO/M-11]

## UU tentang Pangan Perlu Direvisi

[JAKARTA] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), dan Oxfam memandang Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan perlu segera direvisi. UU itu dinilai cenderung mengatur aspek keamanan dan perdagangan pangan ketimbang memandang pangan sebagai hak setiap individu.

Menurut siaran pers Komnas HAM, Kamis (31/1), UU tersebut tidak konsisten dalam memandang pangan sebagai hak asasi yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan akses semua pihak atas sumber daya produksi, dan terjaminnya hak pangan bagi rakyat miskin dan perempuan.

UU itu perlu direvisi, terutama untuk mempertegas bahwa pemenuhan hak pangan adalah kewajiban negara. UU itu juga belum mengatur mekanisme alokasi anggaran untuk menjamin realisasi hak atas pangan bagi kelompok miskin dan rentan.

Tidak Memihak

UU Nomor 7 tahun 1996 perlu direvisi karena tidak memihak pada upaya mengutamakan produksi dalam negeri yang mensyaratkan jaminan atas akses sumber daya produksi bagi setiap individu.

Kondisi seperti itu mengakibatkan kelompok-kelompok tertentu tersisih dari pengadaan pangan dan menjadikan mereka hanya sebagai konsumen, bukan produsen yang bermartabat. [IGK/O-1]

## **Produsen Tahu Tempe Sambut Baik Stabilisasi Harga Petani Merasa Tak Dilindungi**

Rumgapres/Abror Rizki

[JAKARTA] Pemberlakuan kebijakan tentang stabilisasi bahan pangan yang dikeluarkan Presiden disambut baik perajin tahu tempe di Jakarta. Rencana subsidi harga kedelai Rp 1000 per kilogram sudah diumumkan Menko Perekonomian Boediono, Jumat (1/2) sore.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) DKI Jakarta Sutaryo, menyambut baik, tetapi masih menunggu realisasi dari pemerintah. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah akan mengurangi harga kedelai yang sebelumnya Rp 6.500 per kilogram menjadi Rp 5.500.

"Harga Rp 5.700 itu di tingkat importir, sedangkan sampai di pengrajin Rp 5.700," tutur Sutaryo saat dihubungi SP via telepon, Sabtu (2/2).

Ia mengatakan paket subsidi tersebut sudah diterima Primkopti setelah dipanggil Menteri Perekonomian Boediono kemarin. "Kami baru akan memproses data yang dari Menko untuk disalurkan ke UKM dan pengrajin," ujarnya.

Tetapi Sutaryo juga tak menyatakan harga kedelai akan turun seterusnya. "Fluktuasi harga akan terus terjadi, karena terpengaruh dari harga kedelai dunia. Subsidi yang diterima itu cukup membantu meski jika harga kedelai dunia masih tinggi otomatis harga di tingkat importir juga tinggi hingga ke pengrajin," jelasnya.

Saat ini pihak Primkopti masih memproses data yang akan berlangsung enam hari hingga sepuluh hari ke depan. "Sebenarnya kemarin kami juga sudah bisa menerima subsidi tersebut, tetapi tunggu pengumuman resmi dari menteri dulu," tuturnya.

Stabilisasi harga di tingkat pengrajin diupayakan melalui pemberian subsidi tersebut. Sebelumnya pemerintah juga telah melakukan pengurangan pajak penjualan (PPN) dan bea masuk kedelai, tetapi tak dipungkiri langkah tersebut masih belum menstabilkan harga.

"Kalau harga kedelai masih naik, artinya harga dunia masih tinggi, yang bisa dilakukan hanya tarik-menarik atau kesepakatan antara pemerintah dengan importir supaya harga di tingkat importir tidak tinggi," tutur Sutaryo.

Batal

Pemerintah akhirnya batal memilih opsi penetapan batas harga atas untuk komoditas pangan. Penolakan dari Deptan, kalangan petani, maupun produsen minyak sawit cukup kuat karena dikhawatirkan mengganggu target peningkatan produksi sejumlah komoditas.

"Intervensi harga di tingkat petani atau produsen akan mengganggu produksi, jadi kami meminta intervensi dilakukan di hilir atau konsumen," ujar Mentan Anton Apriyantono, Sabtu (2/2).

Mentan mencontohkan untuk minyak goreng intervensi dilakukan dengan operasi pasar.

Pemerintah menyubsidi harga migor sebesar Rp 2.500 per kg. Sebagai contoh, operasi pasar saat ini akan menjadikan harga sekitar Rp 8.500 per kg. Sementara itu untuk harga kedelai, pemerintah tidak mengintervensi harga ditingkat petani. Pemerintah hanya menyubsidi UKM tahu tempe.

Sementara itu Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih menilai Perpres tidak pro petani dan hanya menguntungkan importir. Selain itu pemerintah telah mensubsidi petani asing. Sedangkan kebijakan untuk melindungi dalam negeri tidak jelas.

Sementara Sekjen Wamti (Wahana Masyarakat Tani Indonesia), Agusdin Pulungan menilai cara-cara pemerintah dalam menurunkan harga akan berdampak pada semakin rapuhnya kemandirian pangan. Pemerintah dengan kebijakan fiskal dan moneterinya berpotensi kian membuat petani tambah miskin.

Staf pengajar IPB, Dr Abdul Munif menyayangkan kebijakan stabilisasi harga yang didominasi kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Munif, pemerintah harus melindungi kepentingan petani dengan memberikan berbagai insentif agar petani bergairah. Munif meminta kebijakan tersebut hanya berlaku maksimal tiga bulan saja. [L-11/MYS/M-6]

## Stabilisasi Pangan Harus Segera Dilakukan

Jakarta | Minggu, 03 Feb 2008

Paket kebijakan stabilisasi pangan yang baru diluncurkan pemerintah harus direalisasikan secepatnya. Pemerintah diharapkan segera melakukan kebijakan stabilisasi itu meskipun tambahan anggaran untuk subsidi pangan sekitar Rp3,6 triliun dan keringanan pajak belum mendapat persetujuan DPR dalam APBN Perubahan 2008.

Ekonom dari Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar mengatakan, kebijakan stabilisasi pangan tersebut akan mampu mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan harga berbagai bahan pangan. Oleh sebab itu, berbagai aksi yang telah dicanangkan harus segera dilaksanakan.

"Paket kebijakan ini akan cukup efektif, syaratnya kebijakan itu harus dilakukan secepatnya," katanya kepada Jurnal Nasional, Sabtu (2/2). Pasalnya, kebijakan yang ditempuh umumnya merupakan price policy (upaya menekan harga) untuk jangka pendek.

Pemerintah meluncurkan paket stabilisasi pangan, Jumat (1/2) lalu, yang meliputi beras, minyak goreng, kedelai dan tepung terigu. Kebijakan itu ditempuh dengan menambah jatah beras bersubsidi dari 10 kilogram menjadi 15 kilogram per keluarga dan menurunkan bea masuk impor beras dari Rp550 menjadi Rp450 per kilogram.

Pengendalian harga minyak goreng dilakukan dengan menaikkan pungutan ekspor minyak sawit dan produk turunannya secara progresif. Stabilisasi harga kedelai ditempuh dengan pembebasan bea masuk dan penurunan pajak pertambahan nilai impor dari 2,5 persen menjadi 0,5 persen.

Pemerintah juga memberi subsidi rata-rata Rp1.000 per kilogram bagi perajin tahu dan tempe selama enam bulan.

Menurut Hermanto, langkah cepat yang dicanangkan pemerintah itu akan mengurangi harga yang harus dibayar masyarakat. Sehingga tingginya tingkat inflasi yang mencapai 1,77 persen pada Januari 2008 tidak akan terjadi pada Februari ini.

Penurunan harga pangan, menurut dia, juga akan didorong oleh mulainya musim panen raya beras akhir Februari 2008. Turunnya harga beras akan menurunkan harga komoditas pangan lain seperti jagung, terigu, dan kedelai.

"Ada fenomena unik terkait komoditi pangan, jika harga suatu komoditi turun seperti beras, maka dia akan mendorong penurunan harga komoditi pangan lainnya," katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan itu sekitar Rp10 triliun. "Itu nanti akan ada perhitungan kembali APBN 2008 yang akan dimasukkan ke APBN P 2008."

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Ahmad Hafiz Zawawi mengungkapkan, DPR belum menerima permintaan resmi pemerintah terkait perubahan APBN 2008, termasuk tambahan subsidi pangan.

"Disampaikan secara resmi dalam bentuk RUU APBN Perubahan 2008 belum. Pemaparan di Panggar sudah tapi belum ada tanggapan, apalagi pembahasan karena harus disampaikan dalam bentuk RUU APBN P dan Nota Keuangannya," katanya, Sabtu (2/2).

Hansen HT Sinaga

## Kesejahteraan Petani Yogya Turun

Yogyakarta | Senin, 04 Feb 2008

KESEJAHTERAAN petani di wilayah Yogyakarta mengalami penurunan pada periode November 2007. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta menunjukkan nilai tukar petani bulan November sebesar 126,03 dan angka itu turun dari bulan Oktober sebesar 126,82.

“Survei per tri wulan pada November 2007 lalu indeks harga yang di terima petani belum dapat mengimbangi naiknya harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani,” kata Kepala Bidang Statistik DI Yogyakarta R Bagus Rahmat Susanto, Ahad (3//2).

Kondisi itu berdasarkan asumsi indeks harga produk pertanian yang dihasilkan petani mengalami kenaikan hanya persentasenya lebih kecil dibandingkan kenaikan harga barang dan jasa yang di bayarkan oleh petani.

BPS Yogyakarta mencatat pula adanya kenaikan indeks harga yang terutama untuk sub sector tanaman bahan makanan akibat naiknya indeks harga kelompok sayuran sebesar 10,42 persen. Kelompok pangan seperti padi 0,36 persen dan indeks sub sektor tanaman perkebunan rakyat naik 6,33 persen.

Selain itu, BPS juga memantau adanya peningkatan kesejahteraan terhambat adanya peningkatan indeks sub pengeluaran seperti sub kelompok makanan yang mengalami kenaikan sebesar 3,65 persen lalu diikuti perumahan 0,23 persen.

“Untuk sub kelompok pakaian 1,43 persen lalu kelompok aneka barang dan jasa mencapai 0,94 persen,” kata Bagus.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi DI Yogyakarta Achmad Kasiyani menyatakan soal kesejahteraan petani memang tantangan yang perlu diatasi. Menurutnya persoalan itu menjadi dilematis karena di satu sisi masyarakat meminta harga pangan turun tapi pihaknya juga perlu mengeluarkan kebijakan soal harga jual.

“Ini dilematis, petani jelas menginginkan harga yang bagus di sisi lain masyarakat meminta harga pangan turun,” kata Achmad.

Achmad menambahkan pemerintah kini memang telah mengalokasikan tambahan dana bantuan melalui Departemen Pertanian untuk subsidi peningkatan usaha pertanian. “Ada dana sebesar Rp1 triliun untuk subsidi peningkatan produksi. Harapannya petani lebih sejahtera dan kestabilan harga pangan tercapai,” jelasnya. Much Fatchurochman

## Beri Petani Insentif

Senin, 4 Februari 2008 | 02:17 WIB

Surabaya, Kompas - Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan kebijakan untuk stabilisasi stok pangan nasional. Pemerintah diharapkan pula memberi insentif kepada petani supaya tidak beralih ke komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan.

"Kebijakan di sektor pangan ini harus simultan dan berkesinambungan. Tidak reaktif seperti sekarang, kebijakan yang diambil hanya bersikap sementara untuk meredam gejolak semata," kata Ketua Kadin Jatim Erlangga Satriagung akhir pekan lalu di Surabaya.

Persoalan krisis pangan di Tanah Air yang terjadi belakangan ini, menurut Erlangga, sudah memunculkan gejalanya sejak beberapa tahun lalu. Misalnya, produksi kedelai yang terus menurun dan lahan pertanian makin berkurang akibat peralihan fungsi lahan secara besar-besar.

"Seharusnya, sejak dulu insentif untuk petani tetap dipertahankan. Selain itu, memperbaiki regulasi tata niaga komoditas pangan, dengan memberikan jaminan harga jual barang produksi petani dengan nilai yang cukup menarik," kata Erlangga.

Sehubungan dengan program stabilisasi stok pangan, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, Departemen Pertanian akan mendapat anggaran Rp 1 triliun untuk meningkatkan produksi pertanian.

"Masalah kita sekarang adalah bagaimana meningkatkan produksi pertanian seperti jagung, padi, terutama sekarang ini kedelai. Berdasarkan pertemuan dengan Menteri Keuangan, akan disiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk mendorong produksi pertanian. Tetapi belum ada pembahasan lebih lanjut," kata Anton, Sabtu (2/2), saat ditemui se usai acara Dies Natalis Ke-38 Lembaga Pendidikan Perkebunan di Yogyakarta.

Anggaran yang disiapkan itu, lanjutnya, akan diwujudkan melalui dukungan sarana produksi, seperti benih, pupuk hayati, dan pestisida. Anggaran terbesar akan dialokasikan untuk kedelai.

### Menolak impor

Sekretaris Asosiasi Petani Padi, Palawija, dan Hortikultura Indonesia (AP3HI) Arum Sabil secara terpisah mengatakan pihaknya menolak keras pelaku bisnis yang meminta pemerintah menurunkan bea masuk impor bahan pangan. Hal itu akan mengakibatkan nilai jual produk petani menjadi tidak kompetitif.

"Jika sudah demikian, semangat petani untuk menanam padi dan bahan pangan lain akan merosot. Petani akan menjual tanahnya dan beralih pekerjaan.

Sesuatu yang lebih mengerikan dari krisis pangan diperkirakan akan terjadi, begitu pun jumlah pengangguran akan meningkat tajam mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani. Ketergantungan ekspor yang juga akan memukul rakyat karena membuka peluang negara produsen memonopoli harga.

"Dampaknya, program menciptakan ketahanan pangan nasional yang digagas pemerintah selama ini akan jadi sia-sia kalau ternyata banyak produk pangan impor masuk pasar Indonesia tanpa terkendali," kata Arum.

Di Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz meminta komitmen pengusaha agar turut berperan menahan tingginya laju inflasi Jateng yang pada Januari mencapai 1,33 persen. (NIK/A11/A05)



## Produksi Padi di Pantura Terancam Merosot

INDRAMAYU, (PR).-

Produksi padi di wilayah pantai utara (pantura) Jawa Barat, khususnya di Kab. Indramayu terancam merosot. Kondisi itu dimungkinkan karena petani setempat mengalami kendala pemupukan di saat awal musim tanam akibat keterlambatan pasokan dari produsen.

Selain kemungkinan terjadinya penurunan produksi, petani juga terpaksa harus membeli pupuk dengan harga tinggi. Sebab akibat seretnya pasokan, harga pupuk bersubsidi melambung mencapai antara Rp 1.400,00 hingga Rp 1.500,00 per kg, di tingkat pengecer di sejumlah wilayah Kab. Indramayu. Padahal, sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp 1.200,00 per kg.

Proyeksi kemungkinan terjadinya penurunan produksi padi terkait kendala pemupukan itu, seperti diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kab. Indramayu, Ir. Apas Fahmi Permana melalui Kasi Binus Distanak, Sam'un, Jumat (1/2) lalu. "Dampak keterlambatan pasokan pupuk dari produsen ini akan berpengaruh pada produksi," kata Sam'un.

Menurut Sam'un, tanaman padi yang ada di wilayah Kab. Indramayu sejak awal Januari sangat membutuhkan pemupukan karena usia tanaman berada pada fase primordial atau usia tanaman berkisar antara 10 hingga 30 hari dan masih sangat rentan.

Namun, karena terjadi kendala pasokan dari produsen dan memicu terjadinya kelangkaan, pemupukan tanaman yang seharusnya dilakukan petani menjadi terhambat.

Dikatakan Sam'un, tersendatnya pasokan pupuk yang berlangsung sejak minggu pertama Januari hingga kini belum tertanggulangi. Bahkan, dari proyeksi kebutuhan pupuk bulan Januari sebesar 14.807 ton, hingga 23 Januari lalu baru terealisasi 7.436 ton.

Kondisi itulah yang menurut Sam'un semakin memicu terjadinya penurunan produksi padi di wilayah pantura Jabar. Sementara itu di sisi lain, juga menjadikan petani menjerit karena harga pupuk yang melambung pada kisaran Rp 1.400,00 hingga Rp 1.500,00 per kg.

Soal tersendatnya pasokan pupuk dari produsen ke distributor hal itu diakui Humas PT Pupuk Kujang Cikampek, Drs. Arifin yang dihubungi melalui telepon selulernya.

Menurut dia, pupuk Kujang dalam beberapa hari terakhir mengalami sejumlah permasalahan pada mesin produksi. "Pabrik IC sempat mengalami shutdown selama enam hari. Namun setelah dilakukan perbaikan, mesin telah normal lagi,"ujarnya.

Hanya menurut Arifn, pada 29 Januari lalu hambatan di mesin produksi juga kembali terjadi. Yakni di bagian mesin IB dan saat ini tengah dilakukan perbaikan hingga kapasitas produksi pupuk Kujang Cikampek tidak maksimal dan dampaknya distribusi ke distributor mengalami keterlambatan. (A-96)\*\*\*

## **Dialokasikan, 345.000 Ton Pupuk Organik Bersubsidi**

[JAKARTA] Departemen Pertanian mengalokasikan subsidi pupuk organik untuk tanaman pangan sebesar 345.000 ton tahun ini yang produksi dan distribusinya diserahkan kepada empat BUMN pupuk.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/O.T.140/12/2007 tertanggal 28 Desember 2007 menyebutkan empat BUMN pupuk yang ditugasi memproduksi pupuk organik subsidi tersebut adalah PT Petrokimia Gresik sebesar 300.000 ton, PT Pupuk Kalimantan Timur sebesar 25.000 ton, PT Pupuk Sriwijaya dan PT Pupuk Kujang masing-masing sebesar 10 ribu ton.

Demikian disampaikan Menteri Pertanian Anton Apriyantono kepada SP, Senin (4/2) di Jakarta. Menurut Anton alokasi pupuk organik bersubsidi baru pertama kali dilakukan pemerintah pada tahun ini, yang ditujukan untuk memperbaiki struktur tanah, yang rusak akibat pemakaian pupuk kimia bertahun-tahun.

Pupuk organik ditujukan untuk menggemburkan tanah kembali, katanya.

Ia mengatakan, berbagai mikroba dan bakteri yang terdapat dalam pupuk organik akan mampu melarutkan dan mengikat zat-zat yang dibutuhkan tanah, agar produktivitasnya meningkat.

Diakuinya, sebenarnya telah banyak beredar pupuk organik di dalam negeri, namun kebanyakan tidak memiliki standar yang jelas. Sedangkan empat BUMN yang ditugasi memproduksi dan memasarkan pupuk organik bersubsidi memproduksi pupuk organik sesuai dengan standar yang ditentukan Deptan.

Secara terpisah Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik (Petrogres) Bambang Tjahjono mengakui jumlah pupuk organik bersubsidi masih kecil, baru sebesar 345.000 ton, tapi tahun-tahun mendatang akan terus meningkat terkait kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas tanah.

Waralaba

Mengutip Peraturan Menteri, Bambang mengatakan harga eceran tertinggi (HET) pupuk organik Rp 1.000 per kilogram (kg) dan berlaku sejak 1 Januari 2008.

Lebih jauh Bambang mengatakan, sebagai BUMN yang diberi tugas produksi dan menyalurkan pupuk organik subsidi terbesar, Petrogres bekerjasama dengan sejumlah usaha kecil dan menengah (UKM) melalui sistem waralaba untuk memproduksi pupuk organik yang diberi merek Petroganik.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, saat ini ada 25 pabrik Petroganik yang tersebar di berbagai daerah di Jatim, Jateng, Jabar, dan Lampung, dengan kapasitas rata-rata sebesar 10.000 ton per tahun.

Selain itu juga ada 20 pabrik pupuk organik yang masih dalam tahap pembangunan. Pabrik baru tersebut antara lain akan berada di Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Lampung, dan Jawa Barat. Bambang memperkirakan investasi pupuk organik dengan kapasitas 10.000 ton per tahun mencapai sekitar Rp 800 juta.

Dengan dibangunnya pabrik-pabrik baru, diharapkan ketersediaan pupuk akan lebih baik lagi, ujarnya. [L-11]

## **Perpres Stabilisasi Pangan Pemerintah Tidak Memihak Petani**

[Jakarta] Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih mengatakan, materi Perpres Stabilisasi Pangan menunjukkan dominasi atau kemenangan kelompok menteri pro pasar bebas atas kelompok menteri pro petani. Perpres yang didominasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih memihak kepentingan importir menunjukkan Pemerintah tidak memihak kepentingan petani dan pembangunan pertanian.

Di saat banyak negara besar seperti Amerika Serikat melindungi petaninya dengan berbagai insentif, Pemerintah RI justru kian memudahkan jalan bagi masuknya produk pangan impor.

"Dari total dana Rp 13,7 triliun yang dialokasikan untuk stabilisasi pangan, hanya Rp 1 triliun yang dialokasikan untuk membantu petani, ujar Saragih, di Jakarta, Senin (4/2).

Itupun tidak jelas komitmen realisasinya. Kondisi tersebut sangat menyedihkan dan bisa berakibat makin rapuhnya kemandirian pangan akibat banjirnya pangan impor.

Kekecewaan juga diungkapkan pelaku usaha pertanian. Sekretaris Asosiasi Petani Padi, Palawija, dan Hortikultura Indonesia (AP3HI) Arum Sabil secara terpisah.

Arum mengatakan pihaknya menolak keras pelaku bisnis yang meminta pemerintah menurunkan bea masuk impor bahan pangan. Hal itu akan mengakibatkan nilai jual produk petani menjadi tidak kompetitif.

"Kami menuntut agar Perpres direvisi total dan diisi oleh kebijakan yang pro petani dan pembangunan pertanian dalam negeri. Ganti kebijakan yang menyubsidi petani asing," ujar Arum.

Lebih lanjut Arum mengatakan jika Perpres tidak direvisi, semangat petani untuk menanam padi dan bahan pangan lain akan merosot. Petani akan menjual tanahnya dan beralih pekerjaan. Kondisi yang lebih dari krisis pangan diperkirakan akan terjadi, begitu pun jumlah pengangguran akan meningkat tajam mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani. Ketergantungan ekspor yang juga akan memukul rakyat karena membuka peluang negara produsen memonopoli harga.

"Dampaknya, program menciptakan ketahanan pangan nasional yang digagas pemerintah selama ini akan jadi sia-sia kalau ternyata banyak produk pangan impor masuk pasar Indonesia tanpa terkendali," kata Arum.

Oleh karena itu, baik Saragih maupun Arum sepakat untuk menolak Perpres Stabilitas Pangan dan menuntut pemerintah menggantinya dengan Perpres yang lebih pro petani.

Rp 1 Triliun

Sementara itu, terkait program stabilisasi stok pangan, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, Departemen Pertanian akan mendapat anggaran Rp 1 triliun untuk meningkatkan produksi pertanian.

Menurut Anton pihaknya akan berusaha maksimal untuk meningkatkan produksi pertanian seperti jagung, padi, terutama sekarang ini kedelai meski dana yang dialokasikan tidak sebesar untuk sektor lain.

Berdasarkan pertemuan dengan Menteri Keuangan, akan disiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk mendorong produksi pertanian.

Kepada wartawan, usai berbicara dalam acara Dies Natalis ke-38 Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta, Sabtu (2/2) lalu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono menegaskan, anggaran tersebut sebagian besar difokuskan untuk sektor kedelai dan dalam program stabilisasi harga pangan, dana tersebut juga akan dimanfaatkan demi mendukung sarana produksi pertanian dari mulai benih, pupuk hayati dan juga pestisida yang dibutuhkan kedelai.

Dikatakan Anton, masalah kenaikan harga kedelai saat ini memang cukup dilematis. Di satu sisi konsumen khususnya pengrajin tempe dan tahu menginginkan harga kedelai yang terjangkau, namun petani juga ingin harga kedelai yang layak. "Karena itu, dalam menstabilkan harga kedelai tidak mungkin petani tidak dibantu," ujar Anton.

Ditambahkan, dana sebesar Rp 1 triliun juga untuk mensubsidi pengrajin kedelai. "Ini akan lebih banyak dikucurkan untuk kedelai. Hal ini mengingat padi dan jagung sudah teranggarkan, kami masih menghitung detilnya," kata Anton. [152/L-11]

## Stabilisasi Harga Pangan

Pekan lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengatasi kenaikan harga bahan pangan. Kebijakan tersebut menyangkut empat komoditas pangan yaitu beras, terigu, kedelai, dan minyak goreng, dan satu lagi kebijakan mengenai minyak tanah. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan harga bahan pangan untuk empat komoditas tersebut bisa dijangkau oleh rakyat kecil.

Program stabilisasi harga bahan pangan tersebut merupakan intervensi pemerintah untuk membantu rakyat kecil mendapatkan komoditas pangan dengan harga terjangkau. Cara yang dilakukan diantaranya adalah dengan menurunkan dan membebaskan bea masuk impor untuk komoditas pangan tersebut, menambah anggaran subsidi beras, melakukan operasi pasar, dan sebagainya. Konsekwensinya, pemerintah harus menyiapkan stimulus fiskal sebesar Rp 13,7 triliun, termasuk untuk menambah subsidi beras. Namun pemerintah menjamin tidak akan mengganggu APBN 2008.

Langkah tersebut memang menjadi populer sebagai wujud kepedulian terhadap kebutuhan rakyat. Cara-cara seperti itu lazim dilakukan pemerintah Orde Baru yang bahkan mematok harga pangan dengan menetapkan harga atas dan bawah. Konsep tersebut berlawanan dengan perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan yang sepenuhnya menyerahkan harga pada mekanisme pasar. Bagi Indonesia yang sebagian besar penduduknya belum siap mengikuti perdagangan bebas, campur tangan pemerintah untuk melindungi rakyatnya masih sangat diperlukan.

Kita mendukung upaya pemerintah untuk membantu rakyat kecil. Seperti pembebasan bea masuk impor kedelai merupakan langkah untuk menghidupkan kembali industri kecil yang berbasis kedelai. Demikian pula untuk beras, pemerintah juga menambah alokasi anggaran subsidi untuk menambah jatah beras murah dari 10 kilogram per rumah tangga menjadi 15 kilogram dengan harga tetap Rp 1.600 per kilogram. Tentu ini sangat membantu rakyat, asalkan tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kebijakan pemerintah ini kontraproduktif. Artinya di satu sisi membantu rakyat, namun di sisi lain mematikan para petani. Seperti pada kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan harga pangan murah, membuat petani tidak produktif karena beras dan produk pertanian yang dihasilkannya dinilai sangat rendah.

Kepentingan petani menjadi begitu penting karena dalam jangka panjang, kita harus mengurangi ketergantungan bahan pangan dari impor. Dengan memberikan kebijakan yang positif terhadap sektor pertanian, diharapkan produksi pangan nasional dapat terus ditingkatkan sehingga bisa mengurangi impor. Kebijakan stabilisasi harga pangan yang saat ini dikeluarkan pemerintah hanyalah solusi jangka pendek, dalam jangka panjang adalah bagaimana produksi pangan bisa mencukupi sehingga rakyat bisa membeli dengan harga yang terjangkau tanpa dibebani oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Untuk itu, kita berharap pemerintah juga melakukan pengawasan yang efektif agar kebijakan yang dikeluarkan bisa berjalan tepat sasaran sehingga pada akhirnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak.

## Target Produksi Gabah Kering Giling Naik 5 Persen

Selasa, 5 Februari 2008 | 01:51 WIB

Medan, Kompas - Kesuksesan melebihi target produksi padi tahun 2007, dari 3,1 juta ton menjadi 3,2 juta ton gabah kering giling, membuat Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara optimistis produksi padi tahun 2008 naik 5 persen.

"Sebenarnya setiap tahun kami menargetkan peningkatan produksi paling tidak 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2008 ini, kami pun optimistis bisa mencapai kenaikan target produksi sebesar 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumut Bintara Thahir di Medan, Senin (4/2).

Menurut Bintara, peningkatan target produksi tahun 2008 akan dicapai jika iklim dan cuaca mendukung. "Apalagi kalau hujan turun sepanjang tahun seperti tahun 2007, peningkatan 5 persen optimistis tercapai," ujarnya.

Meski di beberapa tempat dilaporkan terjadi banjir, menurut Bintara, hal itu tidak terlalu memengaruhi produksi padi. Faktor lain yang juga membantu pencapaian target produksi padi adalah stabilnya harga gabah di tingkat petani.

"Harga gabah saat ini kan rata-rata selalu di atas HPP (harga pembelian pemerintah) sebesar Rp 2.400 per kg. Harga di atas HPP membuat petani kembali bergairah menanam padi. Luas panen pun bisa bertambah setiap tahunnya," kata Bintara.

Bintara mengakui pencapaian produksi tahun 2007 antara lain dibantu program pemberian benih padi unggul secara gratis kepada petani lewat program peningkatan produksi beras nasional (P2BN). Dengan harga gabah yang relatif stabil, bantuan benih hanya diberikan ke lahan pertanian yang menjadi proyek percontohan. "Saya tidak mengatakan tidak akan ada lagi bantuan benih gratis karena mungkin saja dalam perubahan APBN, benih gratis ini kembali dianggarkan. Namun, benih gratis untuk tahun ini hanya untuk lahan-lahan pilot project saja yang menyebar di seluruh Sumut," katanya.

Bintara tetap optimistis target produksi padi kembali tercapai meski tak ada bantuan benih. "Kuncinya sebenarnya ada pada stabilitas harga. Petani mau bertanam padi kalau harga gabah dianggap masih menguntungkan mereka," ujarnya.

Buah lokal tersisih

Buah lokal di pasaran Medan untuk sementara ini tersisih dengan buah impor, terutama dari China. Para pembeli, terutama mereka yang akan merayakan Tahun Baru Imlek 2559, lebih memilih buah asal China meski harganya lebih mahal.

"Saya tadi baru bisa dapatkan buah setelah antre empat jam di Jalan Palangkaraya. Banyak pembeli yang mencari buah dari China. Saya bahkan sempat kehabisan buah pir. terpaksa saya mencari buah di kawasan Olympia," tutur Anan Sitepu saat ditemui di kedai buahnya di Jalan Setia Budi, Medan, Senin (4/2).

Anan mengatakan, buah impor mulai marak sejak sebulan silam. Buah yang mulai membanjiri pasar Medan di antaranya adalah aneka jenis jeruk, pir, apel, dan kelengkeng. "Ada buah yang sebelumnya tidak ada, sekarang muncul menjelang Imlek. Pembelinya banyak. Oleh karena itu, saya ambil untuk jualan," tutur Anan.

Aneka jenis jeruk China itu di pasaran dijual antara Rp 11.000 dan Rp 18.000 per kilogram (kg). Penjualannya, tutur Anan, dari hari ke hari cenderung meningkat. Adapun jeruk lokal, seperti jeruk madu, stagnan. Anan menjual jeruk asal Karo itu Rp 5.000 sampai Rp 9.000 per kg. Buah lokal yang penjualannya relatif tinggi hanya pisang dan pepaya.

Dia mengatakan antara buah lokal dan impor tidak jauh beda. "Saya heran juga orang lebih suka buah impor, dan harganya lebih mahal. Dari kemasan, buah jeruk impor ini lebih segar, menarik, dan cerah," katanya. (NDY/BIL)

## **Stabilisasi Pangan Perlu Rp 13,7 T Pengaruhnya Akan Terasa 2-3 Minggu ke Depan**

JAKARTA, (PR).-

Kebutuhan dana untuk pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga pangan pokok selama 2008 diperkirakan mencapai Rp 13,7 triliun. "Angka ini berfluktuasi tergantung realisasi berbagai faktor," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Senin (4/2).

Ia mencontohkan, besarnya pungutan ekspor (PE) dan bea masuk (BM) akan tergantung dari berapa besar volume barang yang diekspor atau diimpor. "Jadi tidak ada angka fixed-nya, nggak bisa ditentukan akan sebesar ini, magnitude kebijakan ini kisarannya sekitar Rp 13 triliun hingga Rp 14 triliun," katanya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal mengenai stabilisasi harga pangan pokok dengan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK itu adalah PMK Nomor 08/PMK.03/2008 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.

PMK ini berisi penurunan besarnya PPh pasal 22 atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh pengimpor yang mempunyai angka pengenalan importir (API) yang semula 2,5 persen jadi 0,5 persen dari nilai impor.

PMK lainnya PMK Nomor 09/PMK.011/2008 tentang penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif PE. PMK ini berisi penetapan PE untuk produk kelapa sawit, CPO, dan turunannya, untuk mengamankan harga minyak goreng dalam negeri.

PMK Nomor 10/PMK.011/2008 tentang PPN ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu. PMK Nomor 14/PMK. 011/2008 tentang PPN dibayar pemerintah atas penyerahan minyak goreng curah di dalam negeri. PMK Nomor 15/PMK.011/2008 tentang PPN dibayar oleh pemerintah atas penyerahan minyak goreng dalam kemasan di dalam negeri.

Kebijakan fiskal itu dikeluarkan dalam rangka menjaga stabilitas harga pokok pangan dengan mengurangi beban pajak, BM, dan membebaskan pengenaan PE atas komoditas pangan strategis. Pemerintah mengharapkan kebijakan itu akan menstabilkan harga yang selanjutnya dapat menyumbang stabilitas pangan pada umumnya.

### **Perubahan APBN**

Untuk mendukung stabilitas harga itu, dalam rangka memperlancar pasokannya, dilakukan penerapan jalur hijau bagi impor barang pokok strategis dengan memerhatikan profil pengimpor. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi pangan sebesar Rp 3,6 triliun dengan rincian penambahan anggaran subsidi pangan dengan menambah volume raskin sebanyak 5 kg per rumah tangga miskin sebesar Rp 2,6 triliun.

Pemerintah juga melanjutkan operasi minyak goreng dengan dana sebesar Rp 0,5 triliun. Demikian juga dengan adanya program bantuan langsung kepada perajin tempe dan tahu sebesar Rp 0,5 triliun.

Sehubungan dengan kebijakan itu dan karena perkembangan ekonomi serta kenaikan harga minyak, pemerintah akan mempercepat pengajuan RUU perubahan APBN 2008 kepada DPR pada pertengahan Februari 2008 ini. Pemerintah biasanya mengajukan APBNP setelah semester I tahun yang bersangkutan.



Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, Ardiansyah Parman, mengungkapkan paket kebijakan pangan yang dikeluarkan pemerintah diperkirakan baru akan terasa pengaruhnya pada masyarakat 2-3 minggu ke depan. Paket itu hanya ditargetkan untuk mengatasi gejolak harga pangan dalam jangka pendek.

Meski demikian, pemerintah juga sudah menyiapkan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. "Mudah-mudahan dalam waktu dua hingga tiga minggu bisa terasa pengaruhnya," ujarnya. Untuk jangka pendek, ada dua sasaran yang akan menjadi perhatian pemerintah yaitu mengurangi gejolak harga.

Namun, ia menegaskan bahwa upaya stabilisasi harga ini jangan sampai kebablasan. Artinya, harga komoditi di dalam negeri jangan terlalu jauh dari harga pasar internasional. "Kalau terlalu jauh justru komoditi tersebut bisa keluar dari pasar dalam negeri," ujarnya. (dte/tnr/A-68)\*\*\*

## 80 Ribu Hektare Lahan di Garut Kritis

GARUT -- Dinas Kehutanan Kabupaten Garut merilis data terbaru mengenai lahan kritis di wilayah yang bersangkutan. Sedikitnya ada 80 ribu hektare lahan di Garut saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, Eddy Muharram, menjelaskan luas lahan yang rusak itu tersebar di 42 kecamatan. Selain yang berada di dalam hutan, kata dia, lahan yang dikategorikan kritis itu juga ada yang masih dikelola masyarakat.

"Melihat kondisi lahan yang kritis itu, kami sungguh ngeri melihatnya," kata Eddy, Senin (4/2). Menurut dia, untuk mencegah meluasnya lahan kritis, pihaknya terus melakukan berbagai upaya penanganan. Salah satunya, kata Eddy, dengan melakukan penghijauan di lahan atau hutan yang kondisinya sangat parah. Untuk 2007 saja, papar dia, aksi penanganan itu mampu menghijaukan kembali 28 ribu hektare lahan kritis.

Eddy mengungkapkan, terus meluasnya kerusakan hutan dan lahan itu terjadi karena kerusakan ekosistem alam di daerah tersebut. Dampaknya, kata dia, ketika terjadi hujan, maka wilayah di sekitarnya menjadi rawan erosi. "Bahaya erosi itu pun mengakibatkan pepohonan yang ada di sekitarnya dan di sekitar sungai turut menjadi rusak dan mati," kata dia.

Sementara untuk hutan di lahan milik masyarakat, kata Eddy, rata-rata rusak karena mereka banyak yang mengubahnya menjadi lahan pertanian. Padahal, bila memang ingin mengubah lahan hutan menjadi lahan pertanian, maka pemilik atau pengolah lahan harus memperhatikan beberapa hal. Termasuk, kata dia, dengan menerapkan sistem atau pola tanam yang benar dan disesuaikan.

Eddy mencontohkan, bila lahan tersebut berada di punggung bukit atau gunung, maka pola tanam yang dilakukan adalah menggunakan konsep sengkedan pada lahan. "Jika itu diterapkan, maka saat hujan turun pun tidak akan terjadi banjir di bawahnya," tutur dia.

Kepala Bidang Pengembangan dan Rehabilitasi Dishut Kabupaten Garut, Sutarman, mengatakan bahwa untuk memulihkan lahan menjadi hijau dan subur diperlukan penanaman jenis pohon tertentu. Beberapa jenis pohon itu adalah mahoni, jati, albasia, buah-buahan, mangga dan rambutan.

"Contohnya, jika lahan yang kritis itu 100 hektare, maka pohon yang harus ditanam minimalnya ada 40 ribu tangkai," ungkap dia. Menurut Sutarman, lahan kritis itu rata-rata berada di kawasan Garut selatan seperti di Kecamatan Cibalong dan Cikelet. "Kawasan di sana itu perpaduan antara kawasan hutan dan pantai," tutur dia.

(mus )

## Petani Khawatirkan Serangan Hama Padi

SUKABUMI -- Musim tanam padi rendengan 2008 di Kabupaten Sukabumi, dibayangi kegagalan. Selain sulit mendapatkan sarana produksi tanaman (saprotan) berupa pupuk, para petani di daerah ini pun dihadapkan pada meningkatnya serangan hama dan penyakit (hapen).

Saat ini, serangan hapen itu telah menyebabkan sebagian besar tanaman padi milik petani rusak dan tidak bisa dipanen (puso). Informasi yang dihimpun dari para petani di sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Sukalarang, menyebutkan serangan hama jenis wereng mulai marak sejak beberapa bulan lalu.

Sementara di Kecamatan Cirenghas, petani mulai disibukkan dengan serangan hama penggerek batang. Dampaknya, para petani harus menanggung kerugian yang cukup besar. "Serangan hama wereng menyebabkan hasil panen berkurang drastis," ujar salah seorang petani di Sukalarang, Ahmad (46 tahun).

Dia mengatakan, kondisi tersebut berpengaruh pada berkurangnya jumlah penghasilan para petani. Kata Ahmad, hasil panennya hanya mencapai 25 persen dari kondisi normal. "Meskipun sudah dicoba diatasi dengan obat, tetap saja serangan hama tidak bisa dikendalikan," tutur dia.

Menurut Ahmad, serangan hama wereng juga menjangkau hampir sebagian besar sawah petani lainnya. Menurut penilaiannya, jika serangan ini tidak segera ditangani, para petani akan menanggung kerugian besar.

Hingga kini, kata Ahmad, pihak Dinas Pertanian belum terjun ke lapangan membantu para petani. Sebenarnya, kata dia, petani sangat berharap ada bantuan dari pemerintah dalam mengatasi serangan hama tersebut.

Mansyur Sulaeman, petani lain di Kampung Gandosoli, Kecamatan Cirenghas, mengaku tanaman padinya rusak akibat serangan hama penggerek batang. "Dari satu petak sawah saja kerusakan akibat hama penggerek batang mencapai 45 persen," ungkap dia. Mansyur mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mencabut serta membakar tanaman yang terkena hama itu.

Sementara itu, ketua kelompok tani di Kecamatan Cirenghas, Muhammad Yusuf menjelaskan, banyaknya serangan hapen disebabkan pola musim tanam yang tidak seragam. Akibatnya, ketika satu tanaman terserang hama, maka tanaman lainnya secara mudah dapat terkena hama serupa.

"Serangan hama memang mulai menyerang tanaman padi. Namun, serangan hama tersebut belum terlalu mengkhawatirkan dan masih bisa ditangani," ujar Kasubdin Padi, Palawija dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sukabumi, Sudrajat.  
(rig )

## Ribuan Petani Gelar Unjuk Rasa di Semarang Hari Ini

Selasa, 05 Pebruari 2008 | 08:21 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang:

Ribuan petani yang tergabung dalam Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) pada hari ini akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi akan dibuka pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh anggota FPPB dengan jumlah massa 10 ribu orang dari 18 OTL (Organisasi Tani Lokal).

Koordinator aksi Muhamad Asari menyatakan, unjuk rasa kali ini adalah untuk menuntut tiga permasalahan, yakni segera diselesaikan konflik agraria yang terjadi dengan seadil-adilnya, laksanakan landreform secepatnya, dan hentikan tindak kekerasan aparat keamanan yang selama ini sering terjadi.

Muhammad Asari menjamin, meski melibatkan ribuan massa tapi aksi kali ini akan tetap dilakukan tanpa kekerasan. "Aksi ini kami beri nama aksi damai," kata Muhammad Asari hari ini (Selasa, 5/2).

Asari mengatakan, aksi kali ini dilatarbelakangi masih maraknya konflik sumber agraria yang terjadi di Kabupaten Batang. Petani Batang, kata dia, selama ini sudah sering berkonflik dengan berbagai perkebunan-perkebunan, seperti PTPN, HGU, dan Perhutani. Konflik tersebut mencuat terutama pascakejatuhan rezim kekuasaan Suharto. "Para pengusaha menolak untuk memberikan bagi hasil yang adil bagi petani," katanya.

Asari mencontohkan konflik antara HGU, PT. Tratak dengan petani Batang. Perkebunan yang terletak di Kecamatan Bandar ini diterlantar oleh pemegang hak sejak tahun 1980-an. Lahannya sudah digarap petani sejak tahun 1988.

Dari hasil tinjau lapangan yang dilakukan oleh Tim B--tim yang diberi tugas untuk melakukan peninjauan dan penilaian untuk perkebunan-perkebunan yang dibentuk oleh BPN Propinsi--menyatakan, bahwa HGU telah diterlantarkan. Dari situ Bupati Batang merekomendasikan pencabutan atas HGU PT Tratak.

Tapi, kata Asari, ketika kasus tersebut naik ke tingkat propinsi, ternyata hingga kini belum juga diambil tindakan pencabutan atas HGU tersebut. "PT Tratak hanya satu contoh saja, masih banyak sekali konflik-konflik lain," katanya.

Konflik ini tidak hanya terjadi di jalur hukum. Kadang kala, konflik dilakukan secara terbuka dengan kekerasan. "Modus kekerasannya adalah melalui aparat kepolisian yang secara langsung yang menampakkan dukungan mereka terhadap pihak perkebunan ataupun preman-preman sewaan," katanya.

## Enam Langkah Capai Ketahanan Pangan (2)

KRISIS pangan yang terjadi di Indonesia, seperti awal tahun ini menunjukkan pasar bebas tidak berlaku bagi keselamatan umat manusia terutama masalah pangan. Sejak perdagangan bebas dipromosikan World Trade Organization (WTO), angka kelaparan di dunia makin meningkat. Dari 800 juta jiwa tahun 1996, naik menjadi 853 juta jiwa tahun lalu.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih mengatakan, Serikat Petani Indonesia (SPI) dan International La Via Campesina dengan tegas menyatakan WTO keluar dari pertanian, dari 1996 hingga kini. Dalam jangka panjang, katanya, petani menuntut dilaksanakan pembaruan agraria dalam kebijakan agraria dan pertanian.

Untuk jangka pendek dan menengah, masalah krisis pangan sebenarnya terkait dengan tiga hal, yakni produksi pangan, luasan lahan, dan tata niaga. Dengan memerhatikan ketiga hal ini, ucap Saragih, petani menuntut solusi jangka pendek kepada pemerintah.

Pertama, mematok harga dasar pangan yang menguntungkan petani dan konsumen. "Harga tak boleh tergantung internasional karena tak berkorelasi langsung dengan ongkos produksi dan keuntungan. Harga harus sesuai ongkos produksi dan keuntungan petani serta kemampuan konsumen," katanya.

Kedua, memberikan insentif harga kepada petani komoditas pangan terutama beras, kedelai, jagung, singkong, gula, dan minyak goreng jika terjadi fluktuasi harga. Hal ini, ujarnya, sebagai jaminan tetap menggairahkan produksi pangan dalam negeri. Ketiga, mengatur kembali tata niaga pangan. Pangan harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bulog, bisa diberikan peran ini, tapi harus dengan intervensi kuat dari Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, dan Departemen Keuangan. Keempat, menambah produksi pangan secara terproyeksi dan berkesinambungan. Dengan meredistribusikan tanah obyek landreform yang segera dipakai untuk pertanian pangan. Kelima, menyediakan insentif bagi petani komoditas pangan, terutama bibit, pupuk, teknologi, dan kepastian beli. Keenam, memberikan dukungan kelembagaan organisasi petani komoditas pangan, yakni kelompok tani, koperasi, dan ormas tani. (habis)  
Sapariah

## Petani Tak Menikmati Harga Tinggi

Rabu, 6 Februari 2008 | 02:03 WIB

Karawang, Kompas - Tingginya harga beras tak dinikmati sebagian petani padi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang kini mulai panen. Harga gabah bahkan terus turun sejak panen musim rendeng dimulai pada akhir Januari 2008.

Maman Abdurrahman (44), petani di Desa Curug, Kecamatan Klari, Selasa (5/2), mengatakan, harga gabah kering panen (GKP) turun dari Rp 2.800 per kilogram (kg) pada akhir Januari menjadi Rp 2.400 saat ini. Padahal, harga beras di pasar-pasar tradisional di Karawang stabil di kisaran Rp 5.000-Rp 5.500 per kg.

Dengan harga beras yang masih lebih dari Rp 5.000 per kg, lanjut Maman, petani idealnya menikmati harga GKP Rp 3.000- Rp 3.500 per kg. Saat ini ongkos produksi beras mulai pengeringan hingga penggilingan mencapai Rp 1.500-Rp 2.000 per kg.

"Dari tahun ke tahun, jumlah tengkulak semakin banyak. Petani tak bisa menikmati untung karena jalur pembelian gabah kini bisa 3-5 rantai sebelum tiba di penggilingan," ujarnya.

Tarma (70), petani lain di Desa Curug, mengatakan, petani tidak memiliki pilihan selain menjual gabah seussai panen. Sebagian besar petani tidak memiliki tempat atau alat pengering serta tempat penyimpanan gabah.

Menurut Tarma, hujan yang turun beberapa hari ini membuat kadar air dalam gabah tinggi. Jika tidak segera dikeringkan, gabah akan membusuk. Jika dipaksa digiling, kualitas beras akan buruk.

Di Kota Sukabumi, Jawa Barat, harga beras berbagai jenis kualitas di Kota Sukabumi naik hingga Rp 500 per kg, Selasa. Kenaikan terjadi setelah perdagangan di Pasar Induk Beras Cipinang normal kembali sehingga para pemasok dari Jawa Tengah yang semula mengirim langsung beras ke pasar tradisional di beberapa daerah sudah kembali mengirimkan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang.

Sementara itu, pagu beras untuk rakyat miskin (raskin) di Kalimantan Tengah pada tahun ini dinaikkan dari 19.746.000 kg menjadi 28.632.280 kg, dengan sasaran 197.464 rumah tangga miskin. Revisi dilakukan menyusul kebijakan paket 1 Februari, khusus masalah pangan dalam upaya pengendalian inflasi. (CAS/AHA/MKN)

## Ribuan Petani Unjuk Rasa

Rabu, 6 Februari 2008 | 11:59 WIB

Semarang, Kompas - Sekitar 5.000 petani dari Kabupaten Batang, Selasa (5/2), berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Mereka menuntut realisasi penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut lebih dari sepuluh tahun.

Secara khusus, mereka meminta Gubernur Jateng turun tangan secara langsung untuk melindungi hak-hak petani setempat atas tanah yang jadi sumber pencaharian satu-satunya.

Dalam aksinya, para petani meminta penyelesaian tiga sengketa tanah di Kabupaten Batang yaitu dengan lahan PT Tratak, PT Pagilaran, dan PT Segayung. Beberapa perwakilan petani dari Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB), Organisasi Tani Jawa Tengah, Paguyuban Petani Sido Dadi (P2SD) didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang akhirnya ditemui pihak pemprov yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan Setda Jateng Suko Mardiono.

Terkait PT Tratak, para petani meminta pemprov mencabut hak guna usaha (HGU) PT Tratak yang telah bangkrut dan berhenti beroperasi sejak tahun 1994. Selama ini, areal lahan PT Tratak yang ditelantarkan telah digarap oleh warga dengan tanaman-tanaman menghasilkan.

Koordinator Aksi FPPB Muhammad Asari mengatakan, Bupati Batang telah merekomendasikan pencabutan HGU PT Tratak. Badan Pertanahan Nasional di tingkat pusat juga telah mengakomodasi tuntutan warga sejak dua tahun lalu. "BPN baru bisa memutus HGU jika ada persetujuan dari gubernur. Itulah yang sekarang kamiuntut," katanya.

Menurut Asari, para petani yang menggarap lahan yang ditelantarkan PT Tratak sering mendapat intimidasi dari para oknum yang menginginkan para petani pergi dari areal PT Tratak. Jika tidak diantisipasi secara cepat oleh pemprov, hal ini dapat berujung pada konflik horizontal.

Dalam kesempatan yang sama, para petani juga mengadukan perlakuan semena-mena yang diterima warga yang selama bertahun-tahun menggarap lahan PT Segayung yang sudah telantar. "Tanaman warga berupa pisang, jagung, serta petai yang sudah menghasilkan, satu bulan lalu diratakan dengan bulldoser. Kerugian petani saat itu ditaksir mencapai Rp 530 juta," ujar Damin dari P2SD.

Proses negosiasi tersebut berlangsung alot. Para petani tetap ngotot meminta pernyataan tertulis dari pemprov.

Setelah didesak, akhirnya Suko Mardiono mewakili pemprov berjanji untuk mengecek ke lapangan selambat-lambatnya hingga akhir bulan ini. Menanggapi respons pemprov, divisi hukum FPPB, Handoko Wibowo dan juga Siti Rahma dari LBH Semarang mengaku kecewa. (A03/A05/WHO)

## **Jatah untuk Serang Berkurang Dikhawatirkan Pupuk Tetap Langka**

[SERANG] Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dikhawatirkan dalam tahun 2008 akan tetap mengalami kelangkaan pupuk urea bersubsidi karena jatahnya dari pemerintah pusat dikurangi. Untuk Kabupaten Serang pada tahun 2008, sebanyak 18.562 ton dari total kebutuhan 22.000 ton lebih.

Dalam bulan Januari 2008, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Serang telah menyalurkan pupuk urea 6.000 ton untuk memupuk luas area tanam 24.387 hektare (ha).

Kepala Bidang Bina Usaha, Dinas Pertanian Kabupaten Serang Arief Moch Yasin di Serang, Selasa (5/2) mengatakan alokasi pupuk yang diberikan pemerintah pusat kemungkinan hanya mampu bertahan hingga April 2008. Untuk bulan selanjutnya, pasti mengalami kelangkaan pupuk urea.

Ia menjelaskan dari alokasi pupuk urea sebanyak 18.562 itu, untuk tanaman padi hanya mendapatkan jatah 12.066 ton. Sisanya untuk tanaman jenis lain, yaitu hortikultura 1.711 ton, perkebunan 4.096 ton, peternakan 55 ton, dan perikanan 6 ton.

"Kami berencana akan berupaya mengalihkan pupuk di beberapa wilayah yang kelebihan, untuk didistribusikan ke daerah yang masih membutuhkan.

Untuk itu, kami mencoba mengajukan permohonan kembali kepada pemerintah pusat melalui Distanak Banten agar Serang dikirim pupuk sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian No 76/Permentan/OT/140/12/ 2007, jatah subsidi pupuk untuk wilayah Banten tahun 2008 ini, yakni pupuk urea 73,059 ton, SP36 15.200 ton, ZA 1350 ton, NPK 14,850 ton. Padahal, di tahun 2007, jatah pupuk urea 74,798 ton, NPK 11,587, ZA 1350 ton. Sedangkan untuk jenis pupuk SP36 mengalami kenaikan, yakni 18.817 ton.

Pengurangan jatah pupuk bersubsidi untuk wilayah Banten disebabkan oleh kecilnya daya serap pupuk bersubsidi pada tahun 2007.

Kasubdin Pertanian Distanak Banten Agus Muhamad Taucid mengatakan kendati jatah pupuk bersubsidi untuk Banten tahun 2008 dikurangi, namun para petani Banten tidak akan kekurangan pupuk. Sebab berdasarkan pengalaman 2007, alokasi pupuk 74,798 ton, yang terserap hanya sekitar 60.000 ton lebih.

Ketua Perhimpunan Pedagang Pupuk Banten Toyib Fanani mengungkapkan, pengurangan jatah pupuk bersubsidi akan menimbulkan terjadinya kelangkaan pupuk di lapangan.

"Alokasi pupuk tahun 2008 ini jauh lebih kecil dari kebutuhan petani di lapangan yang mencapai 110.000 ton. Kurang terserapnya pupuk bersubsidi pada tahun 2007, karena Dinas Pertanian baik provinsi maupun kabupaten/kota lamban menyerahkan data alokasi kebutuhan pupuk," kata Toyib.

### **Pengawasan**

Untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Banten, Distanak Banten maupun Distanak kabupaten/kota diminta untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk urea ke sejumlah distributor dan pengecer.



Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kabupaten Serang, Subagyo mengatakan pengawasan sangat penting untuk dilakukan agar jumlah pupuk yang didistribusikan dapat dipantau. Ia menjelaskan berdasarkan catatan KTNA Kabupaten Serang, area tanam di Kabupaten Serang seluas 54.000 ha dengan kebutuhan pupuk urea mencapai 10.000 ton lebih.

Sementara itu, pemerintah provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mulai menyikapi kelangkaan pupuk yang terjadi di sejumlah wilayahnya.

"Dari 133.505 ton pupuk bersubsidi yang diproduksi PT Pusri dan PT Petrokimia Gresik, hampir 9.451 ton telah disalurkan ke-55 distributor yang ditunjuk perusahaan tersebut. Saat ini, pupuk tersebut telah berada di distributor dan siap diturunkan ke pengecer. Namun untuk kelangkaan yang dilaporkan tersebut, akan segera ditindaklanjuti Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida di kabupaten dan kota bersama instansi terkait di provinsi," kata Asisten II Setprov Sumbar, Surya Dharma Sabirin. [BO/149]

## Kebijakan Pangan Picu Konversi Lahan

[JAKARTA] Peraturan Presiden (Perpres) berisi paket kebijakan stabilisasi harga pangan dikhawatirkan akan memicu petani menjual lahan pertaniannya karena tidak memihak kepentingan petani. Paket kebijakan yang membuka lebar pintu impor tersebut akan semakin menekan harga produk petani sehingga mereka merasa tidak mendapat keuntungan ekonomis dari lahan pertanian yang dimilikinya.

Menurut Ahli Ekonomi Pertanian Universitas Bengkulu, Dr Andi Irawan kepada SP, Rabu (6/2) diperkirakan konversi lahan sebagai dampak kebijakan tersebut mencapai lebih dari 150 ribu hektar. Saat ini secara nasional rata-rata kepemilikan lahan oleh petani turun dari 0,80 ha menjadi 0,72 ha. Di Jawa, rata-rata kepemilikan lahan pertanian turun dari 0,47 ha menjadi 0,38 ha.

Akibatnya, lanjut Andi, jumlah petani gurem, yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha, meningkat 2,17 persen per tahun. Sedangkan jumlah petani yang meninggalkan profesinya juga meningkat, namun belum ada angka pastinya. Yang jelas, menurut Andi akibat kebijakan yang memihak importir tersebut, jumlah petani miskin sulit untuk berkurang.

"Pemerintah secara sadar mengambil pilihan kebijakan yang justru menjadi disinsentif bagi petani. Pemerintah memilih jalan impor pangan yang terbukti telah membuat bangsa ini terpuruk," ujar Andi.

Sempitnya lahan membuat pengusahaan tidak efisien sehingga menyebabkan pendapatan yang rendah. Tidak mengherankan sekitar 70 persen penduduk miskin di pedesaan ada di sektor pertanian. Selain lahan sempit, soal lainnya adalah modal dan kesulitan mendapat sarana produksi. Dengan kebijakan yang bisa menyebabkan turunnya harga produk petani dalam negeri, membuat lembaga Perbankan makin sulit mengucurkan modalnya untuk pertanian, ujar Andi.

Untuk mencukupi kebutuhan, petani terpaksa menjadi buruh di luar pertanian. Tahun 2004, rata-rata pendapatan petani Rp 9,3 juta per tahun atau Rp 775.000 per bulan, dengan catatan, 33 persen diperoleh dari usaha dan buruh di luar pertanian. Bekerja sebagai buruh lebih menjanjikan. Secara nasional, rata-rata upah nominal harian buruh tani Rp 13.510 pada Maret 2006, sementara upah buruh bangunan Rp 33.917.

Sementara itu Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai kebijakan dengan stimulus fiskal tersebut lebih berpihak kepada para pedagang dan konsumen atau hilir. Pembebasan bea masuk dan sejumlah pajak ditanggung pemerintah lebih menguntungkan pihak asing ketimbang petani dalam negeri.

Sementara itu, petani atau sektor hulu yang justru menjadi sumber pasokan komoditi pangan hanya mendapat percepatan bantuan benih bermutu.

"Yang harus diperkuat itu adalah berbagai insentif untuk petani. Peningkatan produksi dalam negeri jauh lebih penting untuk membangun kemandirian pangan," tegasnya.

### Alat Produksi

Ketua Wahana Masyarakat Tani Indonesia (WAMTI), Agusdin Pulungan mengecam pemerintah karena hanya menempatkan petani sebagai alat produksi. Seharusnya mengatasi mahalannya harga pangan harus diatasi dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan melakukan percepatan produksi. Paket kebijakan kreasi pemerintah hanya membuat kemandirian pangan semakin rapuh dan memiskinkan petani. Padahal dengan mensejahterakan petani pemerintah bisa menurunkan angka kemiskinan lebih dari separuhnya.

"Kebijakan menyubsidi importir dan petani asing adalah keblinger," tegas Agusdin.

Sementara itu, kalangan pengusaha minyak sawit menilai kebijakan pemerintah sebelumnya sebetulnya sudah tepat. Kenaikan pajak ekspor menjadi 15 persen dikhawatirkan menurunkan volume ekspor sawit Indonesia ke luar negeri, ujar Direktur PT Smart Tbk, Daud Dharsono.

Ia melihat persoalan yang harusnya dibenahi pemerintah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan kata lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan harus cepat direalisasikan. [L-11]

## Ketahanan pangan & misi komersial Bulog

Setiap kali krisis pangan terjadi, pada saat itu pula peran Bulog selalu diperdebatkan. Banyak yang bertanya-tanya mengapa sewaktu Bulog memegang hak monopoli pangan pokok, harga dan ketersediaan pangan stabil dengan kualitas yang baik, harga terjangkau tidak ada antri beras dan tidak ada beras untuk orang miskin (raskin).

Pada masa lalu, kita sudah berada di jalur yang tepat dengan menempatkan Bulog sebagai penjaga stabilitas pangan. Bulog diberi tanggung jawab penuh untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan berbagai komoditas mulai dari beras, gula, terigu, kedelai, jagung, minyak goreng, palawija hingga cabai.

Posisi Bulog yang demikian telah sesuai dengan amanat UUD 45. Menurut UUD 45, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Jika cabang-cabang produksi itu dikuasai orang perorang, maka rakyat banyak akan ditindasnya.

Dengan peran yang demikian itu, selama tiga dasawarsa Bulog berhasil menjaga stabilitas harga pangan dan menghindarkan rakyat banyak dari penindasan spekulasi pangan. Indikatornya, dalam komoditas beras misalnya, selama hampir 300 bulan hanya 10 kali harga gabah jatuh di bawah harga dasar. Kenaikan harga yang terlampau tinggi juga jarang terjadi.

Saat ini, rakyat terpaksa membiasakan diri hidup dalam kisruh pangan, mulai dari kisruh beras, minyak goreng, terigu, kedelai, dan tak menutup kemungkinan juga terjadi pada komoditas lain seperti susu.

Pangan sebagai public goods kini telah berubah statusnya bukan lagi menjadi persoalan politik namun sudah menjadi masalah politik. Namun, belum terlambat untuk mengatasi masalah ini. Caranya, kelola pangan sesuai dengan amanat konstitusi, kembalikan peran Bulog seperti semula.

Dengan kedudukannya semula, Bulog terbukti mampu menjaga stabilitas harga pangan selama puluhan tahun. Tak kalah pentingnya, Bulog juga dapat meneruskan program diversifikasi pangan yang saat ini terbengkalai. Program ini tak bisa ditunda-tunda lagi karena sangat menentukan hidup-matinya bangsa.

Demi menyukseskan penganekaragaman pangan, Bulog perlu 'melebarkan sayap' menjadi pelopor industri pangan berbasis komoditas lokal. Sesungguhnya hal ini telah tertuang dalam UU Pangan No. 7 tahun 1996, dan telah pula didiskusikan dalam berbagai seminar dan lokakarya sejak puluhan tahun lalu.

Sektor pengolahan pangan penting untuk diperkuat agar sumber-sumber pangan lokal itu dapat menyesuaikan diri dengan preferensi konsumen. Hal ini tentu dimungkinkan, sebab teknologi pengolahan makanan telah berkembang sedemikian rupa dan telah pula kita kuasai.

Dalam konteks inilah Bulog dapat memainkan peranannya lebih besar, yaitu sebagai pelopor industri pangan berbasis komoditas lokal, sebagai instrumen pemerintah untuk penganekaragaman pangan.

Memang, untuk mendorong usaha ini pada tahap-tahap awal dibutuhkan biaya yang cukup besar.

Dalam PP No. 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perum Bulog disebutkan bahwa Bulog diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha logistik pada pangan pokok dan usaha lainnya. Dalam hal tertentu, Bulog melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk pengamanan harga pangan pokok, pengolahan cadangan pangan pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya.

#### Pemanfaatan gudang

Ketika Bulog melaksanakan tugas khusus pemerintah, mungkin saja Bulog mengalami kerugian yang harus disubsidi oleh pemerintah. Subsidi ini sesuai dengan pengalaman Bulog dapat ditutup dengan keuntungan dari sektor perdagangan lainnya, selain itu mengurangi beban subsidi ini, Bulog dapat saja diberi tugas sebagai pelopor industri pangan berbasis komoditas lokal.

Salah satu kekuatan Bulog dalam posisinya sebagai pelopor industri pangan berbasis komoditas lokal adalah kepemilikan infrastruktur gudang dan perkantoran dan pengalamannya yang cukup baik di seluruh wilayah.

Keberadaan gudang-gudang penyimpanan makanan ini sangat vital artinya bagi perusahaan yang bergerak di bidang pangan, termasuk Bulog. Gudang-gudang inilah yang akan menjamin keamanan dan penyediaan pangan agar sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Arti penting gudang-gudang ini semakin terasa jika mengingat geografi wilayah negara kita yang sangat luas dan tersebar sebagai banyak pulau. Serta sifat produk2 pertanian yang inelasstis dan perisheable.

Pembangunan gudang Bulog telah dilakukan sejak tahun 70-an. Pada waktu itu pemerintah memiliki dana yang cukup besar akibat membumbungnya harga minyak dunia. Sebelum dibangunnya gudang-gudang tersebut, gudang-gudang pangan lama milik pemerintah maupun milik swasta keadaanya sangat buruk.

Pada masa Orde Baru, Bulog memegang monopoli impor pangan sehingga tidak saja mengelola komoditas beras, tetapi juga komoditas gula, kedelai, pakan ternak dan sebagainya. Sekarang Bulog sudah tidak mempunyai hak monopoli lagi dan tidak mengelola stok dalam jumlah yang besar.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bilamana kita menyaksikan banyaknya space gudang Bulog yang kosong. Dengan demikian, peran baru Bulog sebagai pelopor industri pangan berbasis komoditas lokal sangat relevan jika dikaitkan dengan pemanfaatan gudang-gudang yang kosong tersebut.

Ke depan, gudang-gudang tersebut di samping dimanfaatkan sebagai tempat penampungan hasil pengadaan, gudang penyaluran dan penyimpanan cadangan pangan pemerintah, juga dapat disewakan pada pihak swasta dengan tetap dipertahankan statusnya sebagai gudang pangan. Dengan demikian, pemerintah lebih mudah memonitor stok cadangan pangan nasional karena cadangan pangan nasional juga termasuk cadangan pangan milik masyarakat atau swasta.

Selain itu, gudang-gudang itu dapat pula dimanfaatkan sebagai tempat processing atau reprocessing stok pangan milik Bulog. Misal Bulog melengkapi dengan peralatan penepungan umbi-umbian. Gudang-gudang Bulog juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat processing industri pangan olahan yang bahan bakunya diperoleh dari produksi lokal. Industri pangan olahan dimaksud dapat dimiliki atau dikelola oleh Bulog sendiri atau oleh pihak swasta.

Jika Bulog melaksanakan fungsi ini, maka peran Bulog sebagai lembaga pemerintah yang berperan dalam ketahanan pangan sekaligus lembaga yang memiliki misi komersil dapat terlaksana. Keberadaan Bulog harus berani kita lihat dengan akal sehat dan hatinurani.

Oleh Muslimin Nasution  
Mantan Menteri Kehutanan RI

## Petani Masih Sulit

Jantho, Kompas - Petani sampai saat ini masih sulit mengakses informasi mengenai kemajuan teknologi di bidang pertanian, terutama untuk bibit unggul dan cara pengolahan tanah. Tidak adanya bimbingan yang memadai dari dinas terkait membuat para petani melakukan penanaman dengan serampangan.

Beberapa petani dan pemilik ladang jagung di Desa Jalin, Kecamatan Jantho, Aceh Besar, Rabu (6/2), mengatakan, selama ini tidak pernah ada petugas penyuluh lapangan yang memberikan bimbingan kepada mereka mengenai cara bertani yang baik.

"Saya belajar menanam palawija, padi, dan sebagainya dari para transmigran asal Pulau Jawa. Dari mereka saya bisa tahu cara menanam, merawat, dan memanen hasil," kata M Juned (45), petani di Desa Jalin.

Juned belajar mengenai cara menanam padi, kacang tanah, dan jagung dari warga transmigran asal Jawa. Dari transmigran itulah, dia bisa mengolah lahannya yang semula tidak begitu produktif menjadi cukup produktif.

Sebelum ini, Juned hanya bisa menanam padi di ladang. Minimnya air yang bisa disalurkan dari mata air ke sawah membuat warga hidup kekurangan. "Dulu kami terlalu bergantung pada padi ladang yang hanya setahun sekali, tidak cukup untuk makan keluarga," tuturnya.

Informasi mengenai pertanian, ujar Syaiful, terutama cara peningkatan produksi, tidak pernah didapat dari petugas instansi mana pun. Di Desa Jalin, Syaiful dan banyak petani lain tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan hasil tanaman.

Dengan luas lahan sawah sekitar 7.000 meter persegi, Juned hanya mendapatkan gabah sekitar dua ton per tahun. "Panen hanya sekali setahun karena air di sini tak mencukupi. Kami hanya berharap hujan," ucap Juned.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Iskandar Ahmad mengakui, hingga saat ini petugas penyuluh lapangan tidak banyak bergerak. "Padahal, selain membina para petani, mereka juga bisa memantau berbagai permasalahan di lapangan, termasuk distribusi pupuk subsidi yang sering kali langka terutama pada musim tanam," paparnya.

### Sosialisasi komposit

Sementara itu, sosialisasi program Pemerintah Provinsi NAD mengenai rencana penggunaan bibit komposit masih belum berjalan. Petani ingin mencoba bibit tersebut, tetapi belum ada di pasaran. "Paling tidak, satu kilogram dulu. Kalau hasilnya bagus dibandingkan dengan bibit yang lama, saya akan memakainya," ujar Juned.

Juned mengatakan, hasil panen bibit jenis C-7 yang banyak digunakan warga cukup bagus. Lima kilogram bibit bisa menghasilkan sekitar 20 karung penuh berisi tongkol jagung.

Kepala Subdinas Produksi Padi dan Palawija Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NAD Naswir Aiman mengatakan, bibit komposit Aceh masih terus dikembangkan di balai benih Sare, tetapi sampai sekarang belum ada yang dilepas ke pasaran. "Sebagian besar masih menggunakan bibit yang lama. Bibit jagung hibrida," katanya.

Jumlah luas tanam jagung pada tahun 2007 mencapai 3.990 hektar dan pada tahun 2008 ditargetkan naik 23 persen. (MHD)

## **Perpres Belum Berdampak Harga Pangan Tetap Tinggi**

[JAKARTA] Perpres tentang Paket Stabilisasi Harga Bahan Pokok yang dikeluarkan seminggu lalu, yakni Jumat (1/2) tidak berdampak positif terhadap penurunan harga. Terbukti, sampai Jumat (8/2) harga komoditas bahan pokok justru naik 2-10 persen. Bahkan harga cabai merah keriting dan bawang merah masing-masing naik 19 persen sampai 24 persen.

Berdasarkan pantauan di Pasar Senen dan Pasar Rawamangun, harga empat bahan pokok utama, yakni beras, gula pasir, minyak goreng, dan kedelai masih tetap naik. Harga minyak goreng curah tertinggi Rp 11.000/kg (Pasar Rawamangun) dan terendah Rp 9.000/kg (Pasar Senen).

Sementara itu, harga minyak goreng curah rata-rata nasional naik dari Rp 9.250/kg (Agustus 2007) menjadi Rp 10.450/kg. Harga gula pasir juga naik 2,6 persen, dari Rp 6.700/kg menjadi Rp 6.900/kg. Harga gula pasir rata-rata masih Rp 6.500/kg. Harga cabai merah naik dari Rp 16.200 per kilogram (kg) menjadi Rp 19.400/kg, dan bawang merah dari Rp 16.000/kg menjadi Rp 20.600/kg.

Eko (31), pedagang di Pasar Rawamangun mengatakan, harga kedelai impor masih tetap tinggi yakni naik dari Rp 8.500/kg menjadi Rp 8.700/kg. Sementara harga kedelai lokal tetap di kisaran Rp 7.550/kg.

"Janji pemerintah menurunkan harga kedelai impor belum terbukti. Harga kedelai masih bertahan di Rp 8.000/kg, padahal produsen tahu tempe meminta harga turun sampai Rp 6.000/kg," ujar Eko.

Ketua Umum Induk Koperasi Tahu Tempe (Inkopti) Sulchan RM mengatakan, harga kedelai impor maupun lokal di kalangan pengusaha yang tepat sebesar Rp 6.000/kg. Sehingga harga jual tempe dan tahu ke konsumen tidak terlalu tinggi, sementara petani juga mendapatkan untung. Jadi, jalan keluar yang dipakai menguntungkan semua pihak.

Langkah pemerintah yang tertuang dalam Perpres untuk kedelai antara lain membebaskan bea masuk (BM) kedelai dari 10 persen menjadi nol persen.

Langkah kedua, yaitu menurunkan pajak penghasilan (PPh) impor kedelai dari 2,5 persen menjadi 0,5 persen. Ketiga, memberikan subsidi sebesar Rp 1.000/kg untuk bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe selama enam bulan. Langkah keempat, yakni meningkatkan produksi kedelai di 2008 melalui pemberian bibit unggul dan penyuluhan pada petani.

"Langkah-langkah tersebut jangan hanya wacana saja, tetapi harus ada implementasi. Sehingga ke depannya Indonesia tidak mengalami kekurangan bahan baku kedelai lagi," tambah Sulchan.

Selain kedelai, harga beras juga belum stabil. Rata-rata kenaikan dan penurunan per hari Rp 100/kg. Sampai Rabu (6/2) harga beras rata-rata Rp 5.500/kg. Stok di pasar beras Induk Cipinang (PIBC) sebesar 21.203 ton atau cukup sampai tujuh hari untuk pasar-pasar di wilayah DKI Jakarta.

Khusus untuk beras, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada penambahan subsidi beras bagi rakyat miskin sebesar Rp 2,6 triliun. Jatah beras bersubsidi juga ditambah dari 10 kg per rumah tangga menjadi 15 kg dengan harga Rp 1.600/kg.



### Program Raskin

Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Departemen Perdagangan, realisasi penyaluran program raskin 2008 sampai Senin (4/2) sebesar 140.249 ton, dari rencana sebesar 383.351 ton. Sementara operasi pasar khusus yang dilakukan Bulog telah menggelontorkan 101.735 ton beras ke pasaran.

Terkait dengan harga beras yang masih di atas harga termurah sebesar Rp 4.750/kg, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Ardiansyah Parman mengatakan, harga beras kemungkinan turun di Maret 2008. Hal tersebut dikarenakan petani mulai panen kembali. Namun, ditegaskannya kenaikan harga bukan karena stok yang kurang tetapi lebih pada masalah eksternal seperti biaya distribusi.

"Kalau harga di retail sulit dikontrol, karena ada biaya angkutan dan biaya lainnya. Tetapi yang paling penting masyarakat berpendapatan rendah bisa mendapat bantuan melalui raskin yang diberikan pemerintah," papar Ardiansyah. [EAS/M-6]

## Irigasi Teknis Sulut Diperbaiki

[MANADO] Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan memperbaiki irigasi yang rusak dan membangun sekitar 14 daerah irigasi teknis, yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 17 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Wakil Kepala Dinas Sumber Daya Air Sulut, Boy Tamon, kepada SP, di Manado, Jumat (8/2) mengatakan, dari 14 daerah irigasi tersebut, luas areal sawah yang akan dilayani air irigasi bila sudah berfungsi sekitar 75.000 hektare (ha) hingga 100.000 ha.

Perbaikan irigasi yang rusak itu, merupakan upaya menunjang program revitalisasi pertanian yang merupakan, program pemerintah pusat dan daerah. "Jadi, kami memprioritaskan irigasi teknis," katanya.

Bila sudah terealisasi, akan banyak manfaat, terutama bisa menunjang produksi pangan yang nantinya sekaligus untuk mengatasi kekurangan pangan bila ada bencana.

### Program Penting

Pakar Pertanian dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr Ir Wisye Rotinsulu MSc mengatakan, sangat baik perbaikan irigasi yang rusak dan menambah daerah irigasi baru. Daerah Sulut potensial, namun belum tergarap semua. Masalah pesediaan air untuk menunjang program pangan itu penting. Namun, harus ada koordinasi yang baik karena hutan yang rusak di hulu sungai itu bisa mempengaruhi tersedianya air irigasi.

Asisten II Pemprov Sulut, Marita Kuntag mengatakan, pertanian menjadi andalan Sulut untuk mendorong pembangunan ekonomi. Semua sarana dan prasarana di bidang pertanian harus dibangun, termasuk irigasi. Semua aparat yang bekerja di sektor pertanian, harus turun ke lapangan.

"Kami minta aparat bekerja keras dalam menunjang, pembangunan pertanian," katanya.  
[136]

## Distributor Pupuk Akan Dikurangi

Sabtu, 9 Februari 2008 | 04:35 WIB

Medan, Kompas - Jumlah agen pupuk bersubsidi akan dikurangi. Selain terkait dengan pengurangan kuota pupuk urea subsidi untuk Nanggroe Aceh Darussalam, pengurangan juga dilakukan untuk mencegah perembesan pupuk ini.

Kepala Badan Ketahanan Pangan NAD Iskandar Ahmad di Banda Aceh, Jumat (8/2), mengatakan, pihaknya sudah mengajukan pengurangan agen karena melihat ketidakefektifan distribusi pupuk. "Namun, kalau mengenai jumlah saya belum bisa memastikan. Kami juga belum bicara kepada PT Pusri selaku distributor di Aceh," katanya.

Dia menjelaskan, Departemen Pertanian mengurangi jatah pupuk urea bersubsidi untuk tahun 2008 menjadi hanya 51.000 ton, dari 67.000 ton pada tahun 2007. Pengurangan jatah tersebut terkait dengan rendahnya tingkat penyerapan urea oleh petani yang hanya sekitar 59.000 ton.

Meski terjadi pengurangan, kata Iskandar, beberapa daerah sentra beras di Aceh meminta tambahan kuota. Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara.

Iskandar mengaku sudah meneruskan permintaan tersebut kepada pemerintah pusat, namun belum ada jawaban. "Realisasi jatah untuk tahun 2008 juga belum ada. Mungkin pada pertengahan tahun sudah ada kepastian itu," katanya.

Pengurangan jumlah agen, kata Iskandar, juga untuk memangkas dan mempermudah penyaluran serta pengawasan distribusi pupuk subsidi tersebut kepada para petani. "Selama ini sangat sulit pengawasannya karena tidak ada yang mengawasi sampai pada level terendah. Tidak ada yang tahu kalau memang terjadi perembesan pada perkebunan karena subsektor ini memang banyak membutuhkan," katanya.

Khawatirkan pupuk

Dewan Jagung Nasional mengkhawatirkan penurunan produksi jagung akibat kelangkaan pupuk di seluruh Indonesia. Ketua Bidang Usaha dan Kemitraan Sumatra Corn Belt Dewan Jagung Nasional Adhie Widihartho, Jumat (8/2), mengatakan, petani jagung mengeluhkan tidak adanya pupuk urea, KCl, dan Sp36. Kalaupun ada, harganya melambung.

"Para stakeholder perlu duduk bersama dan membicarakan ini. Sulitnya memperoleh pupuk kontraproduktif dengan rencana pemerintah mendorong produksi tanaman pangan," kata Adhie.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi memastikan stok pupuk urea di Sumbar mencukupi. "Memang ada kapal pengangkut pupuk yang terlambat masuk. Namun, kita punya cadangan dari stok Januari," katanya. (ART/MHD)

## Petani Kopi Menaruh Harapan Besar

Senin, 11 Februari 2008 | 15:44 WIB

Didi (54) dan Yoyo (32) tampak serius berdiskusi tentang tanaman kopi. Keduanya adalah petani hutan yang menanam kopi pada lahan milik Perhutani dengan pola pemanfaatan hutan bersama masyarakat atau PHBM di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

"Kalau saya, lebih baik daunnya dipangkas agar buahnya bisa berkembang lebih baik," ujar Didi sambil memeragakan ucapannya pada tanaman kopi milik Yoyo, sementara pemilik tanaman hanya manggut-manggut sambil mendengarkan dengan saksama.

Yoyo mengakui, tanaman yang baru berusia tiga tahun itu belum berproduksi seperti diinginkan. Saat ini jumlah produksi setiap pohon hanya 0,5 kilogram. Padahal, yang dia idamkan sebanyak 5 kilogram per pohon. Salah satu penyebab rendahnya produksi adalah perawatan tanaman kopi.

"Kalau produksi kopi setiap pohon meningkat, pasti keuntungan pun lebih banyak," kata Yoyo yang memiliki 400 pohon kopi. Koperasi

Didi dan Yoyo tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wanasari Kecamatan Pangalengan. Keduanya juga menjadi anggota Koperasi Agroforestry Indonesia (KAI). Koperasi itu resmi berdiri pada Desember 2007, dan khusus membidik pengembangan komoditas kopi di Pangalengan. Namun, kini baru LMDH tersebut yang tergabung dengan anggota yang mencapai 220 orang.

Ketua KAI Abdurrahman Tardjo menjelaskan, tujuan dari koperasi itu adalah menyokong pola kerja sama masyarakat desa hutan dan Perhutani. Koperasi membantu LMDH dari masa penanaman hingga pascapanen. Bantuan sebelum penanaman berupa pengadaan pupuk dan bimbingan teknis mengenai cara tanam yang mengikuti kaidah konservasi karena lahan mereka berada di lahan kawasan hutan lindung.

"Untuk pascapanen, kami upayakan untuk membuka akses para petani terhadap kucuran modal dari bank dan pasar, termasuk pengolahan. Jangan sampai kopi yang keluar dari Pangalengan hanya dalam bentuk pascapanen, tetapi harus ada nilai tambah seperti produk olahan," kata Abdurrahman.

Tenaga pendamping masyarakat Kecamatan Pangalengan, Daud Yusuf, menjelaskan, hingga kini belum ada koperasi yang khusus menangani komoditas kopi. Padahal, lahan kopi yang tersedia mencapai 6.000 hektar, tetapi yang tergarap secara optimal baru 150 hektar.

Keterlibatan koperasi bisa menjadi angin segar bagi peningkatan perkebunan kopi dan kesejahteraan petani. Pengurus koperasi juga diingatkan agar tak mengulangi praktik yang selalu terjadi pada koperasi lain, yaitu ketua untung duluan. (Didit Putra Erlangga Rahardjo) Foto : 1 Kompas/Didit Putra Erlangga Rahardjo Kopi merupakan salah satu komoditas pokok untuk pemanfaatan hutan bersama masyarakat di wilayah Perhutani di Kecamatan Pangalengan dengan luas lahan 1.000 hektar. Meskipun demikian, petani masih mengharapkan bimbingan teknis untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Foto diambil Sabtu (9/2).

## Petani Sulit Dapat Pupuk

Senin, 11 Februari 2008 | 03:04 WIB

Padang, Kompas - Para petani di Sumatera Barat kesulitan mendapatkan pupuk dalam sepekan terakhir. Mereka khawatir bila kelangkaan pupuk tidak segera tertangani, produksi pertanian akan merosot. Namun, pemerintah berkeras bahwa ketersediaan pupuk di Sumatera Barat cukup terjamin.

Suprpto, petani jagung di Jorong Pujorahayu Kanagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman, Minggu (10/2), mengatakan, pupuk yang sulit diperoleh adalah urea serta NPK. Kedua jenis pupuk itu dibutuhkan untuk jagung hibrida.

"Di kios-kios, harga pupuk masih tetap tetapi mereka tidak punya barangnya. Mereka memperkirakan pupuk baru datang minggu depan," kata Suprpto.

Dia menambahkan, pupuk yang sulit diperoleh akan membuat hasil panen berkurang. Apalagi, saat ini panas masih cukup banyak di Pasaman sehingga hasil panen akan semakin sedikit.

Panen jagung maksimal, menurut Suprpto, bisa mencapai 2 ton dari luas lahan sekitar 2500 meter persegi. Namun, dengan pupuk yang minim maupun panas yang terlalu banyak, hasil panen diperkirakan turun menjadi 1,6 ton. Padahal, harga jagung mencapai Rp 2.150 per kilogram.

Di tempat terpisah, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi memastikan stok pupuk urea dari suplai bulan Januari masih tersisa 788 ton dan tersimpan di Gudang Pusri, Padang.

"Memang ada kapal pengangkut pupuk yang terlambat masuk, sehingga pupuk urea untuk bulan Februari baru didistribusikan tanggal 13 nanti. Namun, kita masih punya cadangan dari stok bulan Januari. Hingga kini belum ada permintaan tambahan pupuk dari kabupaten dan kota," ujar Gamawan.

Dia meminta bupati atau wali kota mengawasi pendistribusian pupuk dari distributor ke pengecer di wilayah masing-masing.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat Djoni mengatakan, kebutuhan pupuk urea untuk wilayah Sumatera Barat mencapai 71.000 ton per tahun. Kebutuhan ini sudah terpenuhi dengan kuota pupuk dari PT Pusri.

### Kompos

Djoni menambahkan, pemerintah terus menggalakkan pembuatan dan penggunaan pupuk kompos sebab bisa menghemat pemakaian pupuk buatan sampai 50 persen.

Ketua Bidang Usaha dan Kemitraan Sumatera Corn Belt Dewan Jagung Nasional Adhie Widihartho mengatakan, pemerintah perlu duduk bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membicarakan masalah pupuk ini agar produksi pertanian tidak melorot karena petani kesulitan mendapatkan pupuk.

"Dengan program percepatan tanaman pangan, kebutuhan pupuk pasti akan bertambah. Ini yang perlu dibahas oleh pemerintah bersama seluruh stakeholder," katanya. (ART)

## Ribuan Hektare Sawah di Pantura Tergenang Air

CIREBON, (PR).-

Ribuan hektare (ha) sawah di sepanjang jalur pantura, mulai dari Kab. Indramayu hingga Cirebon tergenang air. Para petani mengaku khawatir, genangan air itu bisa membusukkan tanaman padi, sehingga menggagalkan tanam musim rendeng.

Dari hasil pemantauan "PR", Minggu (10/2), menunjukkan hujan deras yang turun dalam sepekan terakhir, telah mengubah areal pertanian menjadi seperti danau yang luas. Areal sawah di sebelah kiri dan kanan jalur pantura, tergenang air dengan ketinggian 30 cm sampai 50 cm.

Di sepanjang Kecamatan Sukra-Patrol-Kandanghaur sampai Losarang, Kab. Indramayu, tanaman padi yang baru ditanam bahkan tidak terlihat. Sepanjang mata memandang, areal yang merupakan sawah tadah hujan dengan luas lebih dari 10.000 ha itu tertutup air.

Tarma (40), petani Desa Eretan Kulon, Kec. Kandanghaur mengaku khawatir. Tanaman padi yang baru berusia tiga minggu terancam membusuk. "Sudah lima hari ini, tanaman padi kita tergenang. Bila sampai lebih dari tujuh hari, saya khawatir tanaman padi akan membusuk," ujarnya.

Pemandangan yang sama, juga terlihat di Kec. Balongan dan Krangkeng. Radiwan (45), petani Desa Tegalurung, Kec. Balongan, mengaku tidak bisa menanam, karena sawahnya terendam air setinggi 50 cm.

"Tadinya, minggu ini akan mulai menanam, tetapi melihat kondisi itu rasanya tidak mungkin. Terpaksa harus menunggu air turun sampai di bawah 10 cm," katanya.

Tidak hanya memundurkan jadwal tanam, Radiwan juga kini justru disibukkan untuk menyelamatkan benih padi di tempat persemaian. Sebab, air merendam tempat yang disediakan untuk persemaian.

Petani pasrah

Sementara itu, di Kab. Cirebon para petani yang sawahnya tergenang air mengaku pasrah. Mereka hanya bisa berharap, hujan reda dan genangan air menyusut.

"Tanaman padi sudah berumur lebih dari sebulan, kendati sebenarnya relatif kuat, tetapi saya dan petani lain merasa khawatir kalau genangan air terus meninggi," kata Sutara (43), petani Desa Kedaton, Kec. Kapetakan.

Sedangkan, di Kec. Gegesik, Tengahtani dan Suranenggala, petani terpaksa memundurkan jadwal penanaman ulang (replanting). Sekitar 2.000 ha sawah di tiga kecamatan itu, terlebih dulu gagal tanam sehingga harus dilakukan penanaman ulang.

"Tadinya, akhir Januari atau awal Februari mau tanam ulang, tetapi karena kondisi tidak memungkinkan terpaksa diundur," ujar Darkam (49), petani Desa/Kec. Tengahtani.

Kepala Dinas Pertanian & Peternakan (Kadistanak) Kab. Cirebon Ir. H. Ali Effendi, M.Si., mengatakan, petani tidak perlu buru-buru tanam bila memang kondisi tidak memungkinkan. Dia meminta bibit padi yang ada di persemaian, sebisa mungkin diselamatkan supaya tidak ikut membusuk. (A-93)\*\*\*

## Hama Serang Tanaman Kelapa

[MANADO] Sekitar 5.167 hektare (ha) tanaman kelapa di Sulawesi Utara (Sulut) terkena penyakit busuk pucuk, yang mengakibatkan produksi turun dan petani mengalami rugi.

Areal tanaman kelapa yang terserang penyakit mematikan itu, tersebar di empat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa, dan Sangihe.

Kepala Dinas Perkebunan Sulut, Rene Hosang kepada SP, Sabtu (9/2), di Manado mengatakan, serangan penyakit itu, sudah berlangsung sejak pertengahan 2007. Ini kebanyakan menyerang tanaman kelapa yang sudah tua. Dalam satu ha, diperkirakan tanaman kelapa jumlahnya sekitar 100 pohon.

Menurutnya, jumlah produksi kelapa menurun saat ini. Produksi setiap tahun sekitar 250.000 ton lebih. Sementara, untuk mengatasi masalah busuk pucuk, pihaknya telah menghitung perlu dana sekitar Rp 4,25 miliar.

Kelapa merupakan tanaman yang potensial di Sulut dan sekitar 80 persen masyarakat memiliki tanaman kelapa. Karena itu, kalau tanaman itu terkena penyakit, akan mempengaruhi pendapatan masyarakat Sulut. Pihaknya akan berupaya mengatasi penyakit mematikan itu. Kelapa sangat berguna membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, apalagi harganya saat ini sangat tinggi.

Pantauan SP, harga kopra saat ini Rp 6.500 per kilogram. Ini cukup baik, dan pertama kali terjadi dalam sejarah sejak 20 tahun lalu. "Kami bangga harga kopra naik terus, ini menguntungkan kami," kata Jeffry K, petani kelapa di Minahasa. [136]

## **Lahan milik petani makin berkurang**

JAKARTA: Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengungkapkan saat ini rata-rata kepemilikan lahan setiap petani di Indonesia turun dari sebelumnya 0,5 hektare (ha) menjadi 0,3 ha.

Ketua KTNA Winarno Tohir mengatakan idealnya setiap petani bisa memiliki lahan garapan sebanyak 2 ha sehingga mereka bisa masuk katagori sejahtera.

"Luas lahan rata-rata garapan petani memang semakin turun dari tahun ke tahun. Padahal lahan pertanian merupakan salah satu faktor produksi dalam usaha tani dan masalah mendasar dalam pertanian," katanya kemarin.

Menurut Winarno, penurunan luas lahan garapan petani disebabkan sejumlah hal seperti fragmentasi kepemilikan akibat sistem warisan, bertambahnya jumlah petani dan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. (Antara)



## **Nusantara Kemarau Ancam Petani Sumut**

Medan | Selasa, 12 Feb 2008

PETANI di sejumlah daerah di Sumatera Utara diimbau segera memperbaiki saluran irigasi dan menghemat air. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), musim kemarau yang berdampak pada kurangnya air diperkirakan akan melanda Sumatera Utara hingga pertengahan Maret 2008.

Kepala Bidang Informasi dan Management Data BMG Wilayah I Medan, Rifwar Kamin di Medan, Senin (11/2) mengatakan, suhu udara dapat mencapai 33 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius.

Musim kemarau kali ini berpotensi menimbulkan kurangnya ketersediaan air di beberapa daerah. Seperti di Kabupaten Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal Madina, langkat dan Deli Serdang.

Dengan kondisi cuaca seperti itu, Rifwar menyarankan, petani untuk beralih ke tanaman palawija. Sebab, tanaman tersebut memiliki ketahanan pada musim kemarau. Kondisi itu juga sangat rawan terhadap terjadinya kebakaran hutan.

### **Pantauan Satelit**

Hasil pantauan satelit, saat ini sudah didapati sedikitnya 20 titik api atau hot spot. Karena itu Rifwar berharap, masyarakat tidak melakukan pembakaran besar-besaran. Sehingga Hot Spot dapat dikurangi. "Hal itu bisa diantisipasi dengan menghemat dan memperbaiki saluran irigasi. Karena suhu dapat mencapai 33 derajat hingga 35 derajat celcius." katanya.

Sementara itu, Kasubdin Pengolahan OPT dan Lingkungan Dinas Pertanian Sumut, Adam B Nasution menyatakan, sudah memperingatkan seluruh Dinas Pertanian kabupaten dan kota dan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A) di Sumut melalui surat edaran. Agar melaksanakan tindakan antisipasi termasuk melakukan perawatan dan membersihkan saluran irigasi. Sehingga kegagalan panen dapat di antisipasi.

Pantauan Jurnal Nasional di wilayah Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, kondisi irigasi di tempat tersebut masih berfungsi normal sesuai yang diharapkan. Hanya saja di butuhkan peran aktif penyuluh-penyuluh pertanian guna mengingatkan petani pentingnya merawat irigasi yang telah ada. n Heri Arland

## Bulog Didesak Percepat Serap Gabah

Selasa, 12 Februari 2008 | 02:52 WIB

Palembang, Kompas - Dinas Pertanian Sumatera Selatan meminta Bulog Sumsel mempercepat program penyerapan gabah petani pada periode awal 2008. Alasannya, cara itu dinilai tepat untuk mencegah semakin anjloknya harga gabah petani di beberapa kabupaten di Provinsi Sumsel yang sedang terjadi pada saat ini.

Demikian diutarakan Wakil Kepala Dinas Pertanian Sumsel Leonardo Hutabarat, Senin (11/2) di Palembang. Menurut dia, sampai sekarang Bulog Sumsel belum melaksanakan program penyerapan gabah 2008.

"Meskipun kami cukup paham bahwa Bulog saat ini masih menunggu tahun anggaran, menurut saya itu salah satu cara yang tepat agar harga gabah tidak semakin anjlok," kata Leonardo.

Menanggapi pernyataan itu, Kepala Bidang Pelayanan Publik Bulog Sumsel Sarjono menjelaskan, pihaknya saat ini juga sedang menunggu keluarnya keputusan pemerintah pusat tentang revisi harga pembelian pemerintah (HPP) 2008. Tanpa itu, Bulog Sumsel tak akan bisa menyerap gabah petani.

"Artinya, apabila kebijakan revisi HPP 2008 tak kunjung diputuskan, Bulog juga tak akan mendapat dropping kuota uang yang digunakan untuk membeli gabah petani," ujarnya.

Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Sarjono memperkirakan kebijakan revisi HPP 2008 akan turun Februari ini. Dengan demikian, seperti biasanya pula, program penyerapan gabah petani akan mulai efektif berlaku pada Maret. (ONI)

## Pupuk Urea Langka di Cirebon & Kuningan

SUMBER, (PR).-

Krisis atau kelangkaan pupuk urea, ternyata masih berlangsung di Kab. Cirebon maupun Kab. Kuningan. Petani mengaku resah, sebab bila tidak segera diatasi maka jadwal pemupukan akan mundur dan bisa berdampak pada penurunan produksi saat panen datang.

Dari hasil pemantauan "PR", di lapangan sampai, Senin (11/2), kebutuhan pupuk Februari yang mencapai 3.000 ton untuk Cirebon belum tersalurkan. Distribusi mengalami kemacetan dan belum ada kejelasan kapan masalah itu bisa teratasi.

Dari Gudang Kedawung diperoleh keterangan, stok pupuk urea sangat minim. Hanya ada 135 ton dari total kapasitas gudang yang mencapai lebih dari 10.000 ton. "Tapi, mulai hari ini rencananya akan dikirim 300 ton lebih. Tahap pertama sudah masuk satu tronton berisi 35 ton," ujar petugas di Gudang Kedawung.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Cirebon Ir. H. Ali Effendi, M.Si., membenarkan soal krisis urea yang belum teratasi di wilayahnya. Dijelaskan, dia sudah mendesak PKC dan Pusri mengambil langkah cepat agar kelangkaan tidak berlarut-larut.

"Rencananya Selasa saya dan Komisi B DPRD akan langsung ke pabrik urea PKC di Cikampek. Kami ingin mendengar langsung, di mana sebenarnya pokok kendalanya. Apakah memang karena masalah kekurangan armada atau juga karena gangguan produksi," ujarnya.

Ali menjelaskan, distribusi urea Januari kemarin, dari kebutuhan 8.000 ton, ternyata hanya bisa disalurkan 7.000 ton atau masih ada kekurangan 1.000 ton. Sedangkan kebutuhan untuk Februari 2008 ini mencapai 3.000 ton, belum tersalurkan. (A-93)\*\*\*

## **SUARA MAHASISWA, Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian**

Selasa, 12/02/2008

MENDADAK harga kedelai langka dan mahal. Pemerintah segera mengambil kebijakan untuk mengendalikan harga, yaitu membebaskan tata niaga kedelai dengan tarif bea masuk (BM) 0%.

Bahasa lain dari kebijakan pemerintah adalah menyilahkan pihak ketiga (perusahaan komoditi pangan) mengimpor kedelai. Selalu saja pemerintah kedodoran mengendalikan stabilitas harga komoditi biji-bijian, mulai dari beras, gandum, kini kedelai. Pemerintah tampak tidak mempunyai visi yang jelas untuk mendorong sektor pertanian. Setidaknya ada tiga hal kontradiktif dari slogan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, sedangkan kebijakannya berbicara lain.

Pertama, Undang-Undang Agraria membiarkan para pemilik modal menguasai lahan/tanah dengan batasan yang sangat luas, ironisnya para tuan tanah membiarkan tanahnya tidak produktif. Padahal, petani-petani kecil yang mempunyai lahan sempit, bahkan yang tidak punya lahan sama sekali berupaya menggarap seoptimal mungkin. Kedua, pemerintah berupaya mempertahankan harga-harga hasil pertanian pada tingkat yang rendah sebagai usaha menyediakan bahan pangan murah untuk sektor modern perkotaan. Tentu saja, kebijakan ini merugikan petani karena terpaksa selalu menerima harga rendah.

Semakin parah, kebijakan pemerintah justru lebih melanggengkan liberalisasi pertanian yang ditandai sejak penandatanganan letter of intent (LoI) dengan IMF, yaitu menghapus monopoli impor, pemasaran, dan pengendalian harga komoditas pertanian. Ketiga, perhatian pemerintah untuk melakukan riset terkait inovasi komoditi pangan sangat kecil. Hal ini ditunjukkan dari alokasi dana yang sangat terbatas bagi peneliti. Di samping itu, peningkatan infrastruktur yang terkait sektor pertanian juga kurang menjadi prioritas utama.

Berdasarkan masalah-masalah mendasar di atas, kebijakan pemerintah yang bertele-tele harus segera dihentikan. Terkait penyediaan lahan pertanian, tentu saja solusi atas permasalahan ini adalah political will dari pemerintah untuk melakukan land reform. Pelaksanaan land reform dapat dilakukan dengan beberapa cara: mengalihkan kepemilikan lahan kepada penyewa atau penggarap lahan (tindakan ini pernah dilakukan oleh pemerintah Jepang, Korea Selatan, Taiwan); mengalihkan lahan dari perkebunan besar kepada petani kecil (seperti yang pernah terjadi di Meksiko); pembentukan koperasi pedesaan (strategi land reform di Kuba); dekrit pemerintah yang menyatakan semua lahan pertanian merupakan milik negara (seperti yang dilakukan pemerintahan Peru).

Solusi lain yang menunjang tumbuhnya sektor pertanian adalah menghapus kebijakan yang sarat dengan liberalisasi komoditi pertanian. Di samping itu, untuk mengakselerasi efektifnya program land reform maka pemerintah juga memberikan rangsangan atau insentif-insentif, peluang-peluang ekonomi, dan berbagai kemudahan yang diperlukan.

Hal itu untuk mendapatkan faktor input utama yang melapangkan para petani kecil meningkatkan tingkat output dan produktivitasnya. Indonesia harus mampu mandiri dalam rekayasa genetika sesuai kondisi lokal. Upaya riset yang mendalam juga harus ditunjang perbaikan irigasi, peningkatan produktivitas di lahan-lahan marjinal, perbaikan mutu gizi, dan memberikan perhatian besar terhadap perubahan iklim (kekeringan, banjir, dan sebagainya).(\*)

ARIA GANNA HENRYANTO Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Ilmu Ekonomi, UGM

## Mentan: RI Krisis Harga, Bukan Pangan

[JAKARTA] Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, Indonesia dewasa ini tengah menghadapi krisis harga pangan, meski ketersediaan pangan itu sendiri relatif mencukupi. Naiknya harga pangan akibat naiknya biaya produksi tidak diikuti oleh naiknya daya beli masyarakat, bahkan daya beli cenderung merosot.

Oleh karena itu, persoalan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat harus menjadi perhatian bersama semua komponen masyarakat. "Yang terjadi saat ini adalah kita menghadapi krisis harga, bukan krisis ketersediaan pangan karena barangnya justru tersedia cukup," katanya kepada SP, Selasa (12/2).

Menurut dia, Indonesia saat ini memiliki persediaan beras yang mencukupi, demikian juga dengan minyak goreng, jagung, CPO, serta sejumlah bahan pangan lainnya. Namun faktanya, harga tidak selalu berhubungan dengan produksi.

"Persediaan beberapa komoditas pangan kita bahkan bisa dikatakan melimpah, tapi harganya naik juga karena dipengaruhi harga-harga dunia," jelasnya.

Ketika ditanyakan apakah Indonesia tidak bisa menghindari dari pengaruh harga internasional, Anton mengaku sulit, kecuali jika Indonesia menganut sistem perekonomian tertutup. Sistem perekonomian yang terbuka, menurut dia, membuat Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh harga pangan dunia.

"Tapi masalah ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di dunia. Bahkan, Amerika dan Tiongkok menjadi negara yang paling parah terkena dampak krisis harga pangan ini," katanya.

Karenanya, menurut dia, tugas pemerintah saat ini adalah meringankan beban rakyat, di antaranya dengan menerapkan kebijakan subsidi dan membebaskan berbagai bentuk pajak produk pertanian. "Pada akhirnya, keseimbangan merupakan hal yang sangat kita harapkan sehingga tidak membebani rakyat dan juga tidak menyulitkan pemerintah," katanya.

### Bom Waktu

Namun, anggota Komisi IV DPR Bomer Pasaribu menyebutkan apa yang terjadi sekarang ini merupakan krisis pangan. Bahkan dia mengatakan, krisis ketahanan pangan nasional menjadi bom waktu yang masih melekat di sektor pertanian dan perkebunan. Pemerintah belum mampu menjinakan bom waktu tersebut. Terbukti ketersediaan dan kestabilan harga komoditas bahan pangan masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat.

"Pemerintah belum bisa menjamin keterjangkauan daya beli dan ketersediaan stok pangan masyarakat. Karena sampai saat ini belum ada langkah konkret yang mampu menyelesaikan krisis pangan. Terbukti harga bahan pangan masih turun naik," tutur Bomer Pasaribu dalam seminar bertajuk Mencegah Krisis dan Menjamin Ketahanan Pangan, Senin (11/2).

Krisis pangan juga ditandai dengan degradasi (penurunan) lahan di Indonesia. Setiap tahun sebanyak 2,8 juta hektare lahan degradasi, sementara rehabilitasi lahan hanya 260.000 ha. Sehingga antara penurunan dan peremajaan lahan tidak berimbang. Bomer menegaskan, pemerintah wajib menyediakan lahan sebanyak 15 juta-17 juta ha apabila ingin keluar dari krisis pangan.

Bom waktu lainnya dalam ketahanan pangan, yakni pemakaian sekitar 80 persen bahan pangan untuk industri biofuel. Hasil perkebunan seperti kedelai serta CPO di Amerika Serikat dan Eropa lebih banyak dipakai untuk industri biofuel. Akibat dari pemakaian bahan pangan untuk energi tersebut, berdampak pada kelangkaan pangan dan menimbulkan lonjakan harga.

Senada dengan itu, Staf Khusus Menteri Perindustrian Rauf Purnama mengemukakan, kendala lain berupa ketergantungan Indonesia pada bahan pangan impor. Terbukti dari peringkat Indonesia menduduki posisi ke-3 untuk negara terbesar pengimpor beras. Selain beras, Indonesia juga mengimpor gula 1,8 juta ton serta impor kedelai 1,3 juta ton setiap tahun.

"Pemerintah, dalam hal ini semua instansi terkait harus meeningkatkan produktivitas pertanian melalui intensifikasi pangan. Sehingga nantinya Indonesia bisa bebas dari impor bahan pangan," ujarnya. [L-11/EAS/M-6]

## **Petani Bengkulu Tak Berminat Tanam Kedelai**

[BENGKULU] Sebagian besar petani di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tidak berminat menanam kedelai karena khawatir ketika panen harga komoditas tersebut tidak menjanjikan. Sementara produktivitas kedelai di Bengkulu sangat rendah hanya 1,3 ton per hektare (ha).

"Untuk saat ini, kita belum tertarik untuk menanam kedelai meski harganya di Bengkulu masih tinggi Rp 8.000 per kilogram (kg). Kami khawatir kalau mengembangkan tanaman ini saat panen harganya turun, sehingga petani tidak mendapat apa-apa," kata Arsul (35), petani Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu kepada SP, di Bengkulu, Senin (11/2).

Dia mengaku sedikit kapok untuk kembali menanam kedelai. Pasalnya, beberapa tahun silam ketika mereka ramai-ramai menanam kedelai saat panen harganya anjlok hanya Rp 3.000 per kg. Akibatnya, hasil panen tidak bisa mengembalikan modal.

Karena itu, meski harga kedelai di Bengkulu cukup bagus Rp 8.000 per kg, petani di Kota Bengkulu tetap tidak tertarik menanam kedelai.

Untuk sementara ini masih enak menanam padi karena harga beras di Bengkulu bagus dan hasil panen sawah beririgasi di daerah ini tinggi di atas 6 ton per ha gabah kering giling (GKG).

Sebelumnya Gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono mengatakan, Pemprov Bengkulu belum memprogramkan mengembangkan tanaman kedelai secara besar-besaran karena Bengkulu masih memfokuskan pengembangan tanaman padi. [143]

## Ratusan Ha Sawah di Tuban Terendam Banjir

[TUBAN] Pascabanjir bandang akibat meluapnya Bengawan Solo, hingga Selasa (12/2) pagi masih menyisakan masalah serius. Beberapa jembatan yang semula menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim) dan Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jatim masih terputus, juga sebagian jalan belum dapat dilalui akibat endapan lumpur di sepanjang ruas jalan itu masih belum rampung disingkirkan.

"Ratusan hektare (ha) areal persawahan di sini sampai pagi ini masih terendam banjir setinggi dada. Jadi ya seperti lautan," ujar H Nurudin (52), warga Widang yang rumah tinggalnya hanya berjarak sekitar dua kilometer utara Jembatan Widang, Tuban.

Ditambahkan, sampai Selasa pagi, masih banyak penduduk rumahnya terisolasi akibat genangan banjir Bengawan Solo masih belum juga surut. "Pokoknya sebentar air surut, namun jika sebentar saja hujan turun dengan lebat, banjir tidak lama kemudian datang lagi," ujar Nurudin, pedagang beras yang biasa memasok ke pedagang sembako di Pasar Blimbing, Kota Malang.

Dia terpaksa menunda pengiriman beras ke Malang karena masih disibukkan menyelamatkan keluarga dan harta benda miliknya.

Demikian pula dengan kondisi di daerah langganan banjir Laren, Lamongan, disebutkan Zaenuri (49), pedagang tahu tek-tek yang baru kembali dari kampung halamannya merantau ke Kota Malang menambahkan, ia nekat kembali ke Malang setelah berhasil naik perahu dari Desa Jabung, Laren ke tepian jalan raya Pantura Lamongan-Surabaya. Istri dan dua anaknya terpaksa diajak serta ke Malang karena kondisi banjir di desanya terus mengancam sepanjang musim penghujan dewasa ini.

Baik di Widang maupun di Laren, pascabanjir warga mulai terserang penyakit diare. Penduduk di kedua kecamatan itu tidak dapat berangkat berobat ke puskesmas setempat karena juga ikut dilanda banjir. Petugas pelayanan medisnya juga terbatas karena masing-masing juga disibukkan mengamankan dan menyelamatkan keluarga mereka dari sergapan banjir.

### Persediaan Obat

Jumlah korban banjir Situbondo bertambah satu orang. Sampai Senin (11/2) petang, jumlah korban tewas akibat terjangan banjir bandang 12 orang.

Korban yang teridentifikasi adalah Ning, warga Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo. Saat banjir Jumat (8/2) malam lalu Ning kena serangan jantung, kata Solikin, Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, di Situbondo, Senin (11/2).

Saat ini persediaan obat-obatan cukup karena ada suplai dari pemerintahan provinsi. Jenis obat yang disuplai kepada pengungsi untuk infeksi kulit, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan antibiotik.

Tiga hari pascabanjir kebanyakan warga mengeluh gatal-gatal dan pusing karena tidak tidur semalaman. Sementara persediaan sembako menipis.

Korban yang dirawat inap di RSUD Situbondo ada sekitar 8 orang, namun tidak ada yang dirujuk di RSUD Dr Soebandi Jember.



Sementara itu, dr Arif Wiyanto, Direktur Rumah Sakit Elizabeth mengatakan, sebelum banjir, merawat 42 pasien. Begitu air mulai menerjang, para pasien berhamburan tak tentu rimbanya. Petugas rumah sakit pun ikut panik.

"Saya hitung tak sampai sepuluh pasien yang melewati banjir malam itu di rumah sakit," katanya.

Banjir menyebabkan tembok rumah sakit jebol, sehingga lubang harus ditutupi dengan pagar seng sepanjang 50 meter dan selesai dikerjakan Minggu siang.

RS Elizabeth belum bisa menerima pasien kembali. Kondisi rumah sakit belum memungkinkan. Namun, Wiyanto berupaya agar kegiatan rumah sakit bisa berjalan normal kembali.

"Ke depan, kita perlu merenovasi gedung ini menjadi dua atau tiga tingkat. Ini untuk mengantisipasi banjir yang bisa sewaktu-waktu kembali terjadi. Tapi semua tergantung dengan kemampuan anggaran," katanya.

Banjir menyebabkan Kantor Mapolres Situbondo terendam air dan lumpur sampai setinggi 2 meter. Aparat pun belum bisa melayani masyarakat.

Wakapolres Situbondo, Kompol Gufron mengatakan, seluruh anggotanya dibantu masyarakat berusaha membersihkan lumpur yang terbawa banjir bandang ke lokasi Mapolres.

Banjir mengakibatkan semua peralatan elektronik dan dokumen-dokumen terendam sehingga tidak bisa dipakai lagi. [ES/070]

## Setiap Tahun, 100 Ribu Hektare Lahan Pertanian Hilang

" " Tulisan Kaki " "

SEKITAR 100 ribu hektare lahan pertanian di Indonesia hilang dalam satu tahun. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya warga yang membangun lahan pertanian menjadi bangunan rumah tinggal maupun pabrik dan pusat perbelanjaan. Di sisi lain, banyak warga yang menilai bangunan akan lebih memberikan nilai ekonomis bagi kehidupan mereka.

Hal itu diungkapkan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat, Kasdi Subagyo saat memberikan sambutan dalam acara Panen Raya Belimbing di Sawangan Depok, Selasa (12/2)

"Banyak orang yang lebih suka membangun kontrakan daripada harus memanfaatkan tanah mereka menjadi lahan pertanian. Karena menurut mereka rumah kontrakan akan lebih memberikan hasil yang lebih jelas daripada harus menanam pohon pertanian," katanya.

Selama ini menurut dia, bila hal ini tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah maka dapat dipastikan suatu saat Indonesia tidak akan memiliki lahan pertanian yang cukup. "Harus ditumbuhkan sikap optimistis dalam diri petani sehingga mereka dapat memanfaatkan lahan mereka untuk membudi dayakan pertanian," kata alumnus Tsukuba University, Jepang itu.

Kebutuhan air di Indonesia, kata Kasdi, semakin membengkak seiring dengan peningkatan jumlah bangunan yang tentunya dibarengi dengan banyaknya jumlah penduduk. "Apalagi, dibarengi dengan ragam kebutuhan yang menuntut sumber daya air dalam jumlah banyak, baik kebutuhan air untuk keluarga, industri, irigasi, penggelontoran, energi, rekreasi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya," tukasnya.

Tidak Terkendali

Akibat pembangunan yang tidak terkendali tersebut, daerah aliran sungai (DAS) yang berfungsi penyangga atau resapan air akan semakin mendekati kerusakan. "Ini disebabkan terjadinya alih fungsi lahan di daerah penyangga, semakin meluasnya lahan kritis, dan penambangan liar pada areal penyangga," katanya.

Menurut Kasdi, berubahnya fungsi DAS adalah awal dari hilangnya volume besar air melalui aliran permukaan yang seharusnya dapat dikonservasi. "Faktanya, semakin meningkatnya defisit air di wilayah kekurangan air atau menurunnya ketersediaan air di daerah surplus. Mengeringnya kantong-kantong air di daerah cekungan di kawasan DAS adalah indikasi nyata dari semakin hilangnya fungsi hidrologis DAS," ujarnya.

Kasdi menilai, berbagai kebocoran limbah industri ke sungai dan lahan-lahan pertanian semakin memberikan tekanan pada lingkungan. Karena itu, tidak mengherankan jika terjadi krisis air dunia saat ini yang didefinisikan dalam kaitannya dengan keterbatasan pada akses terhadap air minum yang sehat bagi lebih dari satu miliar manusia, dan keterbatasan sanitasi bagi setengah penduduk di muka bumi.

Kasdi menyarankan, setiap pemanfaatan air harus diimbangi dengan upaya konservasi air yang memadai. "Paradigma pemberdayaan sumber daya air perlu diubah, dari eksploitasi berkepanjangan kepada budaya konservasi dan pemanfaatan air yang efisien. Pemanfaatan air secara efisien harus menjadi target dalam pengelolaan air," tandasnya.

Dalam konteks irigasi, pemberian air yang efisien tidak selalu dengan jumlah yang sedikit, tetapi pada nilai ekonomi yang bisa dihasilkan dari pemanfaatan air. Namun, pemberian air sesedikit mungkin menjadi target untuk memperoleh hasil ekonomi yang tinggi. n Fauzan Hilal

## Petani Tuntut Pengembalian Dana PE CPO

Rabu, 13 Februari 2008 | 02:05 WIB

Jakarta, Kompas - Petani dan pengusaha kelapa sawit menuntut pemerintah mengembalikan dana yang diperoleh dari pajak ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Mereka meminta agar dana itu dimanfaatkan untuk pengembangan industri kelapa sawit nasional.

"Dana PE harus dicairkan untuk subsidi pupuk, pembangunan waralaba benih di dekat petani, dan sertifikasi lahan petani," kata Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad di Medan, Selasa (12/2).

Ia menjelaskan, selama pemerintah memerhatikan petani kelapa sawit, maka kenaikan tarif pajak ekspor (PE) tidak akan berdampak negatif bagi petani.

Diperkirakan, ada Rp 9 triliun dana PE CPO. Namun, menurut perhitungan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dana PE CPO mencapai Rp 10 triliun.

Saat ini, areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 6,7 juta hektar, yaitu 2,6 juta hektar berupa perkebunan rakyat, 700.000 hektar dikelola PT Perkebunan Nusantara, dan sisanya dikelola swasta.

Tahun 2007, Indonesia memproduksi 17,37 juta ton CPO dan 11,5 juta ton di antaranya diekspor. Nilai ekspor CPO tahun 2006 tercatat 6 miliar dollar AS (setara Rp 57 triliun) dan tahun 2007 sebesar 10,2 miliar dollar AS (setara Rp 96,9 triliun).

### Produktivitas rendah

Asmar mengatakan, meski harga tandan buah segar (TBS) naik mengikuti lonjakan harga CPO, petani tetap sulit membeli pupuk dan benih untuk meningkatkan produktivitas kebunnya. Sejak 2006, harga pupuk naik 250 persen dan benih unggul bersertifikat sulit didapat.

Produktivitas TBS kelapa sawit kebun rakyat 13 ton per hektar per tahun. Padahal, perkebunan besar mampu menghasilkan 23 ton TBS per hektar.

Oleh karena itu, Asmar meminta pemerintah meniru langkah Malaysia yang transparan dalam memanfaatkan dana pungutan TBS (cess), yaitu 3,9 dollar AS per ton TBS.

Dana itu oleh Dewan Minyak Sawit Malaysia (Malaysia Palm Oil Board/MPOB) dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan kelapa sawit (49 persen), promosi (13 persen), advokasi hukum (12 persen), dan dana jaring pengaman, antara lain untuk subsidi konsumen minyak goreng (26 persen).

"Selain meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat, pemerintah juga bisa mendorong industri hilir tumbuh karena riset dan pengembangan sudah tersedia," kata Asmar.

### Penerimaan daerah

Ketua Umum Gapki Akmaluddin Hasibuan mengatakan, permintaan pemanfaatan dana PE untuk kelapa sawit adalah hal yang wajar.

Selain untuk pengembangan kelapa sawit, pemerintah daerah juga layak menikmati penerimaan dari PE CPO. Pendapatan pemerintah daerah dari kelapa sawit hanya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Tahun lalu dana PE diperkirakan Rp 10 triliun. Jika pemda mendapatkan bagian, tentu mereka tidak perlu mengeluarkan retribusi macam-macam, yang memberatkan sektor perkebunan di daerah," kata Akmaluddin. (ham)

## BPRS Membidik Pembiayaan Sektor Pertanian

Sebagai negara agraris, sektor pertanian mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Tak heran jika perbankan syariah, tepatnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Bengkulu, melirik sektor ini. Lembaga keuangan ini berencana menjaring potensi bisnis sektor tersebut melalui penyaluran pembiayaan.

Menurut Komisaris BPRS Safir Bengkulu, Bambang Sutrisno, tahun ini BPRS tersebut akan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan bagi sektor pertanian. Pasalnya, berdasarkan hasil pengkajian BPRS tersebut, sektor pertanian di Bengkulu memiliki potensi bisnis perbankan syariah cukup signifikan.

"Kita melihat daerah Bengkulu merupakan daerah pertanian. Banyak areal pertanian dan cukup layak untuk dibiayai. Hal ini bisa mendorong bisnis perbankan syariah," kata Bambang kepada Republika, Selasa, (12/2). Bambang menyebutkan, hingga akhir tahun ini, BPRS Safir menargetkan penyaluran pembiayaan hingga Rp 10 miliar. Dari total dana pembiayaan itu, sebanyak 20 persen atau Rp 2 miliar akan disalurkan bagi sektor pertanian. Target penyaluran bagi sektor pertanian ini menunjukkan peningkatan cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2007, pembiayaan sektor pertanian hanya tercatat sebesar Rp 200-300 juta dari total pembiayaan disalurkan Rp 4,9 miliar. "Jadi meningkat dari Rp 200-300 juta menjadi Rp 2 miliar," ujar dia yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Bank Islam Indonesia (Asbisindo) ini.

Menurut Bambang, petani yang akan dibiayai bukan merupakan petani besar atau perusahaan tetapi petani berskala kecil atau menengah. Secara spesifik, kata dia, jenis petani yang akan dibidik adalah para petani karet, kelapa sawit, dan lada. Alasannya, kata dia, ketiga jenis komoditas pertanian tersebut memiliki prospek bisnis cukup baik saat ini.

Bambang menyebutkan, BPRS menargetkan pembiayaan sektor pertanian dapat diserap oleh sekitar 200-300 orang petani. Sedangkan nilai pembiayaan per petani berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 100 juta. Hal tersebut sangat bergantung pada kajian kelayakan petani dalam menerima pembiayaan BPRS. Sementara, margin pembiayaan berkisar antara 15 hingga 22 persen per tahun dengan jangka waktu maksimal tiga tahun.

Mengenai akad, menurut Bambang, BPRS akan menggunakan dua macam akad pembiayaan. Keduanya adalah akad murabahah (jual beli) dan mudarabah (bagi hasil). Rencananya, BPRS akan lebih mendorong penggunaan akad mudarabah dengan alasan, hingga kini akad murabahah masih mendominasi pembiayaan BPRS Safir Bengkulu.

Mengenai kinerja tahun lalu, Bambang menyebutkan, aset BPRS Safir Bengkulu pada 2007 tercatat sekitar Rp 5,9 miliar dengan rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing, NPF) berada pada kisaran empat persen. Sedangkan laba BPRS akhir tahun lalu tercatat sebesar Rp 275 juta.

Hingga akhir tahun ini, aset BPRS diharapkan meningkat menjadi Rp 12 miliar. Sedangkan NPF dan laba masing-masing diharapkan menjadi tiga persen dan Rp 600 juta. Bambang berharap, peningkatan porsi pembiayaan pertanian dapat memberikan kontribusi positif bagi pencapaian target aset dan laba tahun ini.

Mengenai sejarah pendiriannya, kata Bambang, BPRS Safir Bengkulu berdiri pada 2004. Pendirian BPRS bertujuan untuk memperluas akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat Bengkulu dan sekitarnya. Saat ini, BPRS tersebut berkantor pusat di Jl Salak Raya, No 294 D Lingkar Timur, Bengkulu. (aru )

## **Pemerintah Diminta Basmi Hama Padi**

[JAMBI] Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabt看), Provinsi Jambi diminta serius menanggulangi hama ulat grayak yang menyerang ratusan hektare (ha) tanaman padi di daerah itu. Pemerintah setempat perlu melakukan penyemprotan obat-obatan pembasmi hama agar tidak meluas dan tanaman padi yang diserang hama tak sampai puso.

Hal tersebut dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Sofyan Pangaribuan kepada SP, di Jambi, Senin (11/2), menanggapi meluasnya serangan hama ulat grayak di Tanjabtim.

Menurut Sofyan, pihaknya prihatin melihat kurangnya upaya penanggulangan hama yang mengancam puluhan ribu ha padi di Tanjabtim.

Para petani hanya melakukan penanggulangan secara tradisional. Bahkan, sebagian petani membiarkan tanaman padi rusak karena tak memiliki biaya untuk membeli obat antihama.

"Pengendalian serangan hama perlu dilakukan serius guna mencegah penurunan produksi padi di lumbung padi. Untuk mengatasi kekurangan obat-obatan dan alat semprot, pemerintah setempat perlu meminta bantuan Pemerintah Provinsi Jambi dan Departemen Pertanian," katanya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi C DPRD Tanjabtim, Yudi Haryanto. Menurut Yudi, pemerintah kurang proaktif menanggulangi hama yang menyerang padi.

Kendati serangan hama telah merusak ratusan ha tanaman padi, pemerintah belum melakukan penyemprotan obat antihama secara massal.

Menurut Yudi, pihaknya sudah meminta Dinas Pertanian Kabupaten Tanjabtim segera melakukan penyemprotan.

## Bulog Belum Beli Gabah

Kamis, 14 Februari 2008 | 02:11 WIB

Jakarta, Kompas - Belum dikeluarkannya kebijakan tentang harga pembelian pemerintah atas gabah membuat sebagian divre dan subdivre Bulog di daerah belum melakukan pembelian gabah dari petani. Padahal, di beberapa daerah yang menjadi sentra produksi beras sudah memasuki masa panen.

Di Sumatera Selatan, misalnya, meski di sejumlah kabupaten, seperti Ogan Komering Ulu Timur dan Banyuasin, telah memasuki masa panen, tetapi Bulog belum membeli gabah petani.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Publik Bulog Divre Sumsel Sarjono, hal itu disebabkan belum ada kejelasan tentang harga pembelian pemerintah (HPP) tahun 2008.

"Idealnya saat ini Bulog sudah mengantongi kepastian HPP 2008. Lambannya penetapan HPP membuat banyak gabah petani belum bisa terserap," ucapnya di Palembang, Sumsel, Rabu (13/2).

Bila sampai akhir Februari belum ada keputusan tentang HPP 2008, Bulog Sumsel akan meminta izin dari pemerintah pusat agar diizinkan membeli gabah, mengacu pada HPP 2007.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menegaskan, meski HPP 2008 belum ditetapkan, Bulog tetap harus membeli gabah dan beras petani sepanjang harganya di bawah HPP. "Sepanjang belum dikeluarkan Inpres baru, Bulog tetap harus membeli gabah dan beras dari petani sesuai HPP yang berlaku saat ini," ujarnya.

Pada 1 April 2007 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 3/2007 tentang Kebijakan Perberasan. Dalam Inpres itu dinyatakan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 2.000 per kilogram, gabah kering giling (GKG) Rp 2.575 per kg, dan beras Rp 4.000 per kg.

Di Kabupaten Bandung, Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, menyatakan, masalah pangan seharusnya tidak hanya ditangani menteri yang terkait perekonomian, pertanian, dan perdagangan, tetapi oleh Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Dewan Ketahanan Pangan ini yang seharusnya menjadi penentu kebijakan," katanya.

Rakortas

Menyikapi lonjakan harga-harga komoditas di pasar dunia, Presiden Yudhoyono menegaskan, perlu solusi tepat untuk mengatasinya.

Hal itu diungkapkan kepada pers se usai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Departemen Perdagangan, Rabu, yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan seluruh anggota kabinet.

Presiden menyatakan, kebijakan dasar, terutama untuk komoditas yang masih impor, adalah menjaga stabilitas harga sampai masa transisi bisa dilewati. Selain itu, meningkatkan produksi dalam negeri.

Diakui, ekonomi dunia tahun 2008-2009 kurang bersahabat, yang berpengaruh pada ekspor barang dan jasa Indonesia. Namun, pemerintah ingin mempertahankan kontribusi ekspor.



Oleh karena itu, seluruh kalangan harus lebih proaktif, responsif, dan adaptif agar ekspor 2008 aman. Guna mencapai itu perlu dibuat prioritas kebijakan antardepartemen, khususnya Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. (OSA/ONI/ELD/MAS)

## Petani Karawang Kesulitan Pupuk

Kamis, 14 Februari 2008 | 02:26 WIB

Karawang, Kompas - Petani di pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kesulitan mencari pupuk urea, SP-36, dan NPK di kios-kios terdekat. Padahal, tanaman padi mereka memasuki usia pemupukan.

Wasdim (45), petani di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Rabu (13/2), mengatakan, petani di desanya kesulitan mencari pupuk urea. Kalaupun ada harganya mencapai Rp 1.300 per kilogram, lebih tinggi dibanding biasanya, Rp 1.200/kg. Padahal usia padi petani sudah 8-30 hari.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Karawang Ijam Sujana mengatakan, stok di kios-kios terbatas. Petani harus memesan 1-2 hari sebelumnya ke pemilik kios.

Kelangkaan urea juga dirasakan petani Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keterlambatan pemupukan dikhawatirkan bisa menurunkan produktivitas padi. Hal itu diungkapkan Takrib Abubakar, Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Cirebon, Rabu kemarin.

Direktur Produksi PT Pupuk Kujang Supodo Damar Setiadi mengakui, selama bulan Oktober 2007-Januari 2008, realisasi produksi pupuk di bawah target yang ditetapkan. Hal itu karena keterbatasan pasokan gas, rendahnya kualitas gas, serta kerusakan generator salah satu pabrik.

Sementara itu, realisasi distribusi pupuk urea PT Pupuk Kalimantan Timur di sejumlah kecamatan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tidak berimbang. Ada kecamatan yang mendapat pasokan berlebih, ada yang kekurangan. Hal itu dikemukakan Ketua Panitia Khusus Pupuk Bersubsidi DPRD Kabupaten Blora Singgih Hartono. Ia berharap dilakukan penataan ulang distribusi pupuk. (MKN/NIT/HEN)

## Prinsip Susuganan ala Petani Pesisir Utara

Kamis, 14 Februari 2008 | 12:33 WIB

Hancur sudah jerih payah Wasdim (45) menggarap lahan, menyiapkan bibit, dan menanam padi. Sejak Jumat (8/2), sawahnya di Kampung Kosambi Lempeng Tengah, Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, tergenang banjir. Pucuk daun tanaman padi miliknya bahkan tidak terlihat. Tinggi genangan yang mencapai 30-50 sentimeter sanggup mengubah "karpet hijau" di kampung itu menjadi kecoklatan.

Luas garapan Wasdim hanya setengah bahu atau sekitar 0,35 hektar. Ia menyewanya seharga Rp 3,5 juta per tahun dari tetangganya. Hasil panen 1,5 hingga 2 ton per musim terbilang kecil, tetapi itulah satu-satunya sumber pendapatan bagi Wasdim dan keluarganya.

Dengan asumsi panen dua kali dan harga gabah kering pungut (GKP) Rp 2.500 per kilogram, pendapatan kotornya selama setahun maksimal hanya Rp 10 juta rupiah. Setelah dipotong ongkos produksi dan sewa sekitar Rp 4,5 juta, Wasdim hanya membawa pulang Rp 5,5 juta dari kerjanya selama setahun. Itu berarti rata-rata penghasilannya Rp 458.000 per bulan.

Akan tetapi, asumsi itu hanya berlaku ketika situasi normal, tidak ada banjir, kekeringan, atau serangan hama dalam skala besar. Padahal, dalam 1,5 bulan terakhir banjir telah dua kali merendam area persawahan di pesisir utara Karawang, yaitu pada awal Januari dan pertengahan Februari ini. Banjir juga merendam sawah milik Wasdim.

"Petani sini sering menyebut awal tanam di bulan Januari-Februari ini sebagai masa susuganan (untung-untungan). Jika beruntung, berarti bisa panen dan menyiapkan masa tanam kedua lebih cepat. Tetapi jika tidak, berarti harus menanggung rugi karena banjir," ujarnya.

### Banjir rutin

Lain Wasdim, lain pula Tasma (47). Petani di Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, itu terpaksa membiarkan bibit tumbuh di persemaian hingga berusia 32 hari. Idealnya bibit telah dipindah dari persemaian pada umur 20-25 hari.

Di Kecamatan Cilebar, bukan hanya bibit Tasma yang terendam. Dari 4.749 hektar sawah yang terendam di Cilebar, 2.340 hektar di antaranya belum ditanami dan bibit masih di persemaian. Padahal, seperti halnya Tasma, petani lain juga telah menanam bibit 2-3 kali sejak Januari lalu.

"Kami tidak tahu jika banjir akan dua kali menghantam. Petani hanya bisa mengira-ngira," kata Sarmin, petani di Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran.

Kecamatan Tempuran merupakan satu dari sembilan kecamatan di pesisir utara Karawang dengan wilayah genangan yang luas. Selasa siang, luas sawah terendam mencapai 3.207 hektar atau lebih dari 50 persen luas baku sawah di Tempuran. Luapan Sungai Ciderewak dan Cibulan-bulan yang melintas di kecamatan itu juga merendam 667 rumah warga serta 89 hektar tambak di Desa Tanjungjaya dan Sumberjaya.

Wasdim, Tasma, dan Sarmin hanya sebagian dari ribuan petani pesisir utara Karawang yang sawahnya rutin dilanda banjir. Mereka berharap pemerintah mencari jalan keluar agar banjir tidak lagi dianggap sebagai rutinitas tahunan.

"Jika daerah resapan dan saluran-saluran pembuang baik kondisinya, banjir pasti bisa diredam. Petani juga tidak perlu menebak-nebak apakah akan banjir atau tidak. Yang terjadi sekarang, hujan sedikit saja sudah banjir karena aliran di sungai pembuang tersendat," kata Wasdim.

Sejumlah sungai pembuang di Kecamatan Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, dan Cilebar meluap sejak Jumat pekan lalu. Kondisi itu menyebabkan ribuan hektar sawah di sekitarnya terendam. Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Karawang mencatat 15.337 hektar sawah dengan usia tanaman 7-60 hari terendam air rata-rata tiga hari. (Mukhamad Kurniawan)

## Ribuan Hektar Padi Terancam Mati

Kamis, 14 Februari 2008 | 12:33 WIB

Karawang, Kompas - Ribuan hektar tanaman padi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Karawang terancam mati. Sebab, sebagian besar dari 15.337 hektar sawah terendam banjir selama tiga hari. Pemerintah Kabupaten Karawang sudah menyiapkan benih dan pupuk untuk membantu petani korban banjir.

Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Karawang Didy Sarbini HS, Rabu (13/2), mengatakan, pihaknya belum bisa menghitung jumlah sawah yang puso. Sebab, hingga Rabu siang, air masih menggenangi di sejumlah kecamatan di pesisir utara Karawang.

Didy menambahkan, usia padi di sawah yang terendam banjir ialah 7-60 hari, tetapi sebagian besar di antaranya berusia kurang dari 30 hari. Selain itu, banjir juga menggenangi area persemaian untuk lahan seluas 3.146 hektar.

Menurut data yang dihimpun Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Karawang, area persawahan yang terendam mencapai 14.734 hektar dan area persemaian 2.830 hektar. Selain itu, banjir juga merendam 485 hektar tambak di pesisir utara.

"Petani korban banjir akan dibantu benih dan pupuk, namun kami belum bisa menentukan berapa areal yang puso. Kami punya 20,7 ton cadangan benih, tetapi tentu masih kurang. Karena itu, Pemkab Karawang akan menganggarkan bantuan lagi," papar Didy.

Sejumlah petani di Kecamatan Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, dan Tempuran memperkirakan tanaman padinya akan mati. Pasalnya, genangan menutup seluruh bagian tanaman dalam tempo relatif lama, yaitu 3-6 hari. Genangan di tiga kecamatan itu mencapai ribuan hektar dan terbilang luas dibandingkan dengan 17 kecamatan lainnya.

"Pucuk-pucuk daun kini sudah terlihat layu. Tanaman yang terendam hingga pucuk daunnya biasanya akan layu atau mati, tetapi yang terendam sebagian masih bisa ditolong dengan pemupukan," ujar Sarmin (45), petani di Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran.

### Pembenahan

Koordinator Serikat Petani Karawang Deden Sofian mengatakan, kerugian petani Karawang akibat banjir mencapai miliaran rupiah. Dengan asumsi kebutuhan modal untuk pembelian dan penyemaian benih, pengolahan tanah, penanaman, dan pemupukan awal sebesar Rp 1 juta per hektar dan area terendam seluas belasan ribu hektar, kerugian mencapai belasan miliar rupiah.

"Itu belum termasuk kerugian akibat hilangnya potensi produksi atau mundurnya masa tanam. Itu sebabnya pemerintah harus segera mencari solusi untuk pembenahan," ujarnya.

Menurut dia, banjir selalu rutin menggenangi area persawahan di pesisir utara Karawang setiap musim hujan dalam jumlah besar. Namun, pemerintah dan sebagian petani masih menganggapnya sebagai fenomena biasa. Sebagian menganggap banjir merupakan rutinitas tahunan yang wajar dialami petani di pesisir utara.

Deden menambahkan, ada beberapa pilihan yang bisa ditempuh pemerintah daerah. Pertama, memperbaiki daerah resapan air di Karawang selatan yang kini gundul dan sebagian berubah fungsi menjadi kawasan industri. Kedua, menormalisasi sungai-sungai pembuang yang kini semakin dangkal dan sempit akibat pembangunan di sepanjang daerah aliran sungai.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Karawang Ijam Sujana menambahkan, sebagian area persawahan di utara Karawang memang sulit dihindarkan dari banjir karena posisinya rendah. Meski demikian, kerugian akibat banjir bisa ditekan jika kondisi saluran pembuang lancar.

Selama ini genangan banjir di sawah bersumber dari luapan sungai-sungai pembuang di sekitarnya. Area persawahan di sekitar Sungai Cibulan-bulan dan Ciderewak di Kecamatan Tempuran, misalnya, rutin terendam banjir pada musim hujan. (MKN)

## Terancam Krisis Pangan

Kamis, 14 Februari 2008 | 02:09 WIB

Jakarta, Kompas - Sekitar 5.000 keluarga warga Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, dibayangi krisis pangan. Stok pangan di rumah warga sudah menipis. Hal itu disebabkan pasokan barang pokok terhenti setelah kapal-kapal barang berhenti beroperasi akibat gelombang tinggi dan angin kencang dalam seminggu terakhir ini.

Dua warga RT 02 RW 05 di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggan, yakni Jamila (40) dan Asmarawa (32), per telepon, Rabu (13/2), melaporkan, angin kencang dan gelombang tinggi masih terjadi di perairan sekitar pulau itu. "Sudah seminggu saya tidak bisa melaut. Tidak ada penghasilan apa-apa," kata Asmarawa.

"Beras di warung saya tinggal beberapa kilogram saja. Tidak ada kapal pengangkut sembako yang masuk ke sini. Nelayan di sini saja tidak berani melaut karena gelombang tinggi," kata Jamila.

Bupati Kepulauan Seribu Djoko Ramadhan juga membenarkan bahwa stok pangan warga mulai menipis, bahkan ada yang sudah kosong sama sekali. Ia kemarin menerima bantuan beras 12 ton dan mi instan 120 dus dari Pemprov DKI Jakarta. Bantuan yang disalurkan oleh Dinas Bintel Kesos masih tersimpan di Kantor Penghubung Bupati Kepulauan Seribu di Ancol Timur.

Rencananya, enam kelurahan dijatahi masing-masing 2 ton beras dan 20 kardus mi instan. Namun, bantuan itu tidak langsung disalurkan karena belum ada kapal yang berlayar.

"Stok beras di kantor-kantor kelurahan sudah menipis. Ada yang sisa 200 kg dan ada yang sudah kosong, nihil," kata Djoko.

Cuaca buruk berupa hujan disertai angin kencang dan gelombang tinggi masih terjadi di wilayah perairan Kepulauan Seribu, kemarin. Data Badan Meteorologi dan Geofisika yang diterima Djoko menunjukkan, tinggi gelombang masih 1,5-2,5 meter dan kecepatan angin di atas normal, yakni 20-25 knot.

Sama seperti pada hari-hari sebelumnya, Djoko melarang kapal nelayan, kapal barang, dan penumpang untuk beroperasi di perairan Kepulauan Seribu. Barang pokok pun tidak bisa diangkut ke pulau. Warga pun terancam krisis pangan akibat menipisnya persediaan barang pokok di rumah-rumah warga. Biasanya, Pemkab Kepulauan Seribu menyediakan stok kebutuhan pokok di kantor kelurahan.

"Namun, persediaan di kantor-kantor kelurahan tinggal beras 200 kg. Bahkan, ada kelurahan yang tidak punya persediaan lagi, nihil. Bantuan dari pemprov akan segera disalurkan pada kesempatan pertama jika cuaca normal," katanya.

Gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, membuat penyeberangan ke Pulau Pari dan Untung Jawa, Kepulauan Seribu, terhenti. Padahal, jalur ini tak hanya untuk kapal penumpang, tetapi juga kapal barang pokok. Warga kepulauan tidak bisa lagi belanja ke daratan Tangerang. (CAL/TRI)

## **Suplai Pupuk Urea Masih Belum Lancar**

### **Ali Efendi, "Cirebon Butuh 'Buffer Stock' 10.000 Ton"**

CIREBON, (PR).-

Keterbatasan jumlah armada angkutan yang dimiliki PT Pupuk Kujang membuat pengiriman pupuk urea ke Gudang Kedawung (milik PT Pusri), di Kab. Cirebon tersendat.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) Kab. Cirebon Ir. Ali Efendi, saat kunjungan kerja Komisi B dan Dispertan ke PT Pupuk Kujang, Selasa (12/2) lalu, pihak PT Pupuk Kujang menjanjikan pasokan pupuk untuk Kab. Cirebon sebanyak 200 ton dan Kab. Kuningan 50 ton per harinya, mulai Rabu (13/2) bakal dipenuhi.

Namun, sampai Rabu sore, urea dari Pupuk Kujang yang terangkut ke Gudang Kedawung baru 195 ton. "Saya sudah kontak ke PT Pupuk Kujang. Menurut keterangan PT Pupuk Kujang, karena keterbatasan armada, tidak semua pupuk yang dialokasikan untuk Gudang Kedawung terangkut. Namun, pihak PT Pupuk Kujang memastikan bahwa suplai untuk Kabupaten Cirebon mendapat prioritas," kata Ali Efendi usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Kedawung, Rabu (13/2).

Inspeksi mendadak itu dilakukan Ali untuk memantau langsung janji PT Pupuk Kujang yang telah menyatakan siap memasok pupuk urea ke Gudang Kedawung untuk kebutuhan Kab. Cirebon sebanyak 200 ton per hari. Ia juga ingin memastikan bahwa suplai pupuk untuk wilayah Kab. Cirebon mendapat prioritas.

Sesuai kesepakatan

Sementara itu, Manajer Komunikasi PT Pupuk Kujang Arifin mengatakan, pasokan urea dari Pupuk Kujang belakangan ini sempat terganggu. Pabrik Kujang IB berhenti produksi selama 8 hari dan baru memproduksi kembali pada 6 Februari lalu.

"Tapi, Pupuk Kujang sudah minta bantuan dari pabrik pupuk lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada 16-18 Februari akan datang 4.000 ton urea dari Pusri melalui Pelabuhan Semarang, sehingga masyarakat tidak perlu takut kekurangan pupuk," kata Arifin.

Menyinggung keterlambatan pasokan ke Gudang Kedawung, Arifin menyatakan, distribusi pupuk untuk Cirebon dan Kuningan sudah sesuai dengan kesepakatan, masing-masing sebanyak 200 ton dan 50 ton. "Mungkin sisa pasokan masih dalam perjalanan," kata Arifin.

"Buffer stock"

Menurut Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kab. Cirebon, Tasrip Abubakar, sejumlah wilayah di Kab. Cirebon yang rawan kekurangan pupuk urea adalah Kec. Gunungjati, Kapetakan, sebagian Panguragan, sebagian Gegesik, dan Suranenggala.

Ali Efendi mengatakan, agar kelangkaan pupuk tidak terjadi pada musim tanam (MT) II, setidaknya harus ada stok pupuk urea minimal 10.000 ton sebagai buffer stock. "Musim tanam II mulai bulan April, artinya bulan Maret stok pupuk urea paling tidak harus ada 10.000 ton," katanya.

Dijelaskan Ali, keterlambatan pemupukan bisa berdampak pada penurunan produksi. Meski belum ada penelitian yang memastikan persentase penurunan produksi, kata Ali, penurunan produksi pasti terjadi bila tanaman terlambat memperoleh pupuk.



Sementara itu, Kepala Gudang PT Pusri Kedawung H. Suharyono mengungkapkan, sampai Rabu kemarin, suplai pupuk bantuan dari PT Pusri sebanyak 500 ton yang dikirim melalui Pelabuhan Semarang, juga belum masuk gudang.

"Rencananya, hari ini (kemarin-red.) memang akan masuk pupuk urea bantuan dari PT Pusri Palembang, sebanyak 500 ton, tapi sampai sekarang belum masuk," katanya. (A-92)\*\*\*

## Petani Tuntut Kenaikan HPP Gabah dan Beras

Semarang-RoL-- Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Jawa Tengah mendesak pemerintah pusat segera menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) baru karena harga gabah dan beras yang menjadi patokan saat ini tidak sesuai kondisi lapangan.

"Kenaikan HPP ini untuk memberikan rasa aman petani yang sudah mulai panen. Inpres Nomor 13/2007 yang merupakan pedoman bagi Bulog untuk pengadaan beras dan gabah sudah tidak sesuai kondisi lapangan saat ini," kata Ketua DPW PPNSI Jateng Riyono di Semarang, Kamis.

Karena itu, menurut dia, HPP gabah dan beras harus segera disesuaikan dengan perkembangan harga di tingkat petani, sebab tidak cocok dengan biaya produksi dan beban hidup petani.

Ia menjelaskan, HPP seharusnya disahkan pada Februari, bukan April seperti tahun 2007 karena saat ini petani sudah memasuki masa panen. Selain itu, agar ada jaminan harga dan kepastian pembelian dari Bulog kepada petani. Saat ini Bulog hanya melihat dan menunggu kapan HPP baru akan diterbitkan.

"Hal inilah yang sering digunakan oleh Bulog untuk menghindari dari upaya membeli gabah petani," katanya.

PPNSI mengusulkan kepada Pemprov Jateng agar proaktif meminta pemerintah pusat segera menetapkan HPP baru, apalagi ada kecenderungan harga gabah akan turun.

Dalam Inpres No. 13/2007 disebutkan harga GKP (gabah kering panen) Rp 2.000,00/kg, KGK (gabah kering giling) Rp 2.575,00/kg, dan beras Rp 4.000,00/kg.

Menurut PPNSI, patokan harga ini sudah tidak layak di tingkat petani. PPNSI mengusulkan, GKP dari Rp 2.000,00 dinaikkan menjadi Rp 2.300,00 GKP dari Rp 2.575,00 menjadi Rp 2.700,00, dan beras dari Rp 4.000,00 menjadi Rp 4.500,00.

Usulan ini dilandasi sejumlah alasan, yakni biaya produksi padi tahun ini naik karena bencana banjir. Banjir mengakibatkan petani mengeluarkan biaya ekstra untuk mengganti benih yang mati, penyemprotan hama, dan perbaikan saluran irigasi.

Kedua, kenaikan harga bahan pokok menuntut pengeluaran lebih bagi petani, dan ketiga, kecenderungan kenaikan harga komoditas pertanian di tingkat nasional akan membawa berkah bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Riyono menegaskan, kenaikan HPP ini wajib dilakukan pemerintah, apalagi Jateng saat ini sudah mulai panen, seperti di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Grobogan, dan Cilacap yang menjadi sentra padi di Jateng.

"Jika pemerintah lambat menetapkan HPP berarti tidak pro-petani. Bulog seharusnya mengambil inisiatif untuk mendesak tentang kebijakan HPP baru," katanya. antara/mim

## Krisis Harga Pangan

Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono menyatakan di Medan, akhir pekan lalu, saat ini Indonesia tidak mengalami krisis pangan, tetapi krisis harga pangan. Menurutnya, persediaan pangan bisa dikatakan melimpah, tetapi harga pangan naik karena dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga barang di pasar dunia. Oleh karena itu, Mentan mengatakan bahwa harga tersebut tidak ada kaitannya dengan produksi.

Pernyataan tersebut cukup menarik karena dikemukakan oleh menteri yang secara teknis menangani masalah produksi pangan. Pernyataan itu seolah-olah menjawab kritikan yang dilontarkan sebagian masyarakat bahwa kenaikan harga bahan pangan saat ini karena persediaan semakin menipis. Jawaban Mentan juga mengindikasikan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan dengan ketersediaan bahan pangan nasional.

Memang menjadi pertanyaan, ketersediaan bahan pangan tersebut berasal dari produksi dalam negeri atau impor? Sebab, jika bahan pangan tersebut diperoleh dari impor berarti yang menikmati adalah petani luar negeri. Tetapi, jika bahan pangan itu berasal dari dalam negeri maka petani Indonesia masih diuntungkan. Sangat disayangkan bahwa selama ini kenaikan harga beras sering tidak dinikmati para petani. Petani lebih suka menjual gabah dengan harga yang relatif lebih murah bila dikonversi dengan harga beras.

Di era pasar bebas, di mana pemerintah Indonesia tidak memberikan perlindungan serius terhadap produk pertanian, kenaikan harga pangan tidak bisa dibendung lagi. Apalagi bila bahan pangan itu, seperti jagung, kedelai, dan beras, harus diimpor harganya sangat bergantung pada harga komoditas tersebut di pasar dunia. Lantaran itu benar apa yang dikatakan Mentan bahwa harga bahan pangan tersebut tidak terkait dengan produksi (dalam negeri) tetapi bergantung pada harga pasar dunia.

Sangat berbeda kondisinya apabila Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Harga bahan pangan di dalam negeri tidak akan terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas di pasar dunia. Walaupun harga pangan naik tetap akan memberikan keuntungan bagi petani dan memberikan dorongan bagi petani untuk meningkatkan produksinya.

Kenyataannya, Indonesia hanya bisa berswasembada beras pada 1984, setelah itu selalu impor. Yang menyedihkan, saat harga naik sedikit saja pemerintah menggelontorkan beras untuk menurunkan harga, padahal itu beras impor yang dibeli dengan harga yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, saat ini, saat harga bahan pangan naik, banyak rakyat kecil yang menjerit karena pendapatannya tidak bisa mengimbangi kenaikan harga bahan pangan tersebut. Dalam kondisi seperti itu pemerintah perlu meningkatkan daya beli rakyat. Caranya, dengan mendorong pergerakan industri, sehingga pengangguran berkurang dan pendapatan masyarakat meningkat. Sesuai teori kebutuhan Maslow, pendapatan tersebut akan diprioritaskan untuk membeli kebutuhan dasar (pangan).

Memang memprihatinkan bila untuk membeli makan saja tidak bisa, lalu bagaimana rakyat bisa ikut berpikir untuk membangun bangsa? Apabila perut sudah kenyang maka pikiran akan menjadi terang, sehingga tahap selanjutnya bagaimana rakyat bisa ikut berperan membangun bangsa ini.

Oleh karena itu, krisis harga pangan harus segera diatasi dengan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga harga bahan pangan bisa terjangkau rakyat. Apabila krisis ini bisa dilampaui Indonesia bisa melangkah ke tahap selanjutnya, menuju negara yang lebih makmur.

## **Ekonomi Mikro/ Sektor Riil**

### **Pendapatan Petani Kelapa Meningkat**

Ternate | Jum'at, 15 Feb 2008

PENDAPATAN petani kelapa di Maluku Utara (Malut) terus meningkat, seiring membaiknya harga berbagai produk dari kelapa, terutama kopra di pasaran setempat belakangan ini. "Harga kopra di Malut sekarang terus naik. Pada akhir Januari lalu, harganya baru Rp5.000 per kg, sekarang sudah naik menjadi Rp5.700 per kg," kata seorang petani kelapa di Ternate, Sulaeman di Ternate, Kamis(14/2), seperti dikutip Antara.

Bahkan jika menjual kopra langsung ke gudang pengusaha antarpulau dalam jumlah besar dan kualitasnya sesuai standar (kadar airnya rendah) harganya bisa mencapai Rp6.000 per kg.

Menurut dia, naiknya harga kopra otomatis pendapatan mereka ikut naik, hingga bisa sedikit leluasa dalam menghadapi melonjaknya harga kebutuhan pokok di pasaran Malut.

Dengan harga kopra Rp5.700 per kg petani di Malut bisa mengantongi pendapatan sekitar Rp11,4 juta per hektare. Setiap hektare kelapa menghasilkan sampai dua ton kopra. "Pendapatan ini setiap empat bulan, karena masa produksi kelapa setiap empat bulan, " katanya.

Sebelum tahun 2006, petani kelapa di daerah ini hidup serba kekurangan, karena harga kopra saat itu paling tinggi Rp2.000 per kg.

Sapariah

## Akibat Hama, Produksi Padi Menurun

Jumat, 15 Februari 2008 | 03:08 WIB

Subang, Kompas - Hasil panen sejumlah petani di Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, anjlok. Serangan hama sundep dan hama putih palsu menjadi penyebab produksi padi turun. Penurunan mencapai 40-60 persen dibandingkan dengan situasi normal.

Imam Suwandi (53), petani di Desa Ciberes, Kamis, mengatakan, hasil panen padi miliknya turun dari 6-7 ton menjadi 4 ton gabah kering panen per hektar. Hama sundep dan hama putih palsu menyerang tanaman padi sejak berusia 65 hari. Akibatnya, bulir padi hampa.

Hasil panen Kosim (38), petani di Kampung Rawagebang, Desa Ciberes, juga anjlok. Dari sekitar 7.000 meter persegi tanaman padi miliknya, Kosim hanya bisa memanen 2 ton gabah kering panen. Padahal, dalam kondisi normal, dia bisa memanen hingga 4 ton gabah kering panen.

Selain di Desa Ciberes, hama sundep dan putih palsu juga menyerang ratusan hektar sawah di Desa Jatiragas Hilir, Gempolsari, serta Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi. Usia padi di beberapa desa itu kini berkisar 80-110 hari atau mendekati masa panen.

Selain hasil panen, harga gabah petani juga anjlok. Dalam dua hari terakhir, harga gabah kering panen di sejumlah desa Rp 2.000-Rp 2.100 per kg. Harga itu jauh di bawah harga pada akhir Januari lalu Rp 2.800 atau awal Februari yang Rp 2.500 per kg.

Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, keterlambatan pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah tahun 2008 atas harga gabah telah memicu munculnya spekulasi.

Nur Hasan (34), petani asal Kelurahan Sukajadi, Banyuasin, menyebutkan, banyak petani yang menjual gabah kering panen seharga Rp 1.500-Rp 1.600 per kilogram. Petani tidak punya pilihan lain, selain menjual kepada para spekulasi. (MKN/ONI)

## **Dirut Perum Bulog Instruksikan Divre dan Subdivre Beli Gabah Petani**

Jumat, 15 Februari 2008 | 02:55 WIB

Jakarta, Kompas - Panen padi di sejumlah wilayah mulai berlangsung. Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar menginstruksikan jajaran divisi regional dan subdivre Bulog mulai membeli gabah dan beras petani yang harganya di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP tahun 2007.

"Kepala divre dan subdivre mulai kemarin harus membeli gabah dan beras, baik dari petani maupun mitra Bulog, dengan harga yang ditetapkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan," kata Mustafa, Kamis (14/2) di Jakarta.

Pembelian gabah dan beras oleh Bulog tetap mengacu pada tabel rafaksi, yaitu harga pembelian disesuaikan dengan kualitas. Makin rendah kualitas gabah dan beras, harganya semakin rendah. Begitupun sebaliknya.

Hasil rapat gabungan dengan Direktorat Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian se-Indonesia disepakati, pembelian gabah dan beras dari produksi dalam negeri sebanyak 2,4 juta ton, atau naik sekitar 630.000 ton dari realisasi pengadaan tahun 2007 sebanyak 1,76 juta ton.

Target pembelian beras dalam negeri dinaikkan karena jatah beras untuk rumah tangga miskin (RTM) juga meningkat. Hal ini karena jumlah RTM penerima raskin maupun volume beras yang diberikan juga meningkat.

Tahun 2008 RTM penerima beras untuk rakyat miskin (raskin) 19,1 juta dan masing-masing mendapat 15 kilogram, sebelumnya 10 kg per bulan.

Stok beras Bulog per Februari sekitar 1,3 juta ton. Diharapkan pada akhir 2008 stok beras Bulog 1 juta ton. "Rencana impor belum diputuskan karena sisa impor 2007 masih 206.000 ton yang belum direalisasikan," katanya.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso mengungkapkan, dengan rata-rata konsumsi per bulan 2,6 juta ton, maka produksi beras Februari-April 2008 akan surplus meskipun di beberapa wilayah banjir serta ada gangguan hama dan penyakit.

Pada bulan Februari, panen besar mulai terjadi di Jatim, Jateng, Jabar, dan Banten. Luas panen di empat wilayah itu 650.000 hektar. Sementara areal panen di Sumsel sekitar 147.000 ha, Sumut 96.000 ha, Kalbar 86.000 ha, dan Lampung 65.000 ha.

"Kami berharap Bulog membeli gabah dan beras di daerah yang mulai panen," katanya. (MAS)

## Harga Beras di Pasar Mulai Menurun

Jumat, 15 Februari 2008 | 02:48 WIB

Palembang, Kompas - Seiring berakhirnya musim paceklik pada pertengahan Februari ini, harga beras medium di Kota Palembang mulai menurun Rp 300 per kilogram. Hal itu juga disebabkan adanya penambahan pasokan beras ke pedagang pasar tradisional karena musim panen di Sumatera Selatan sudah mulai berlangsung.

Menurut Yustianus, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang, Kamis (14/2), tanda- tanda penurunan harga beras ini sudah terjadi sejak awal pekan kemarin.

"Penurunan ini terjadi pada jenis beras kualitas medium, seperti IR-64, C4, serta berbagai beras lokal asal Sumsel. Pemerintah memperkirakan penurunan akan terus terjadi hingga saatnya panen raya awal Maret mendatang," kata Yustianus.

Dia menjelaskan, faktor utama penurunan harga beras ini karena masa paceklik padi sudah berakhir. Menurut dia, sejak awal pekan ini sudah ada penambahan stok beras ke pasar tradisional. Pasokan terutama berasal dari sentra padi di Belitang dan Lempuing.

Berdasarkan informasi pedagang di Pasar Cinde, Kota Palembang, harga beras medium saat ini Rp 4.600-Rp 4.700 per kilogram. Sebelumnya, selama periode awal tahun, harga beras di pasar sempat melambung hingga Rp 5.000-Rp 5.100 per kilogram.

"Biasanya jatah beras sekitar 100 kilogram per hari dari pengepul. Namun, sekarang pasokan ditambah dua kali lipat. Pengepul punya stok beras berlebih karena petani sudah panen," kata Chafifah, wakil pengurus pedagang Pasar Cinde. (ONI)

## Involusi Petani

Jumat, 15 Februari 2008 | 02:52 WIB

Clifford Geertz menggunakan istilah "involusi pertanian" untuk menggambarkan kemunduran pertanian di Jawa awal tahun 1960-an secara struktural. Akan tetapi, kisah ini bukan narasi besar tentang sektor pertanian kita, yang selalu saja menempatkan petani sebagai obyek. Ini kisah tentang terpuruknya Sulasih (45), petani dari Desa Comprong, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Oleh: Ahmad Arif

Penelitian Clifford Geertz, antropolog Amerika, tentang kemunduran pertanian di Jawa telah berkontribusi melahirkan revolusi hijau di Indonesia; intensifikasi pertanian yang bersandar pada penggunaan pupuk kimia, insektisida, benih monokultur, irigasi, dan mekanisasi.

Revolusi yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Bimbingan Massal (Bimas) dan Inmas itu sempat mengubah Indonesia dari negara pengimpor terbesar menjadi swasembada beras pada tahun 1984. Atas kesuksesan itu, Presiden Soeharto, menuai penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) pada tahun 1985.

Namun, kesuksesan yang tak lama itu—karena sejak tahun 1990-an Indonesia harus kembali mengimpor beras—ternyata berdiri di atas penderitaan petani.

Seiring dengan gencarnya provokasi dari petugas penyuluh lapangan (PPL) yang masuk ke Desa Comprong akhir tahun 1960-an, Sulasih mulai meninggalkan Markuti, padi gogo varietas asli dari kampungnya, yang sedari dulu menghidupi keluarganya.

"PPL membawa padi IR. Katanya hasilnya lebih banyak dan bisa ditanam setahun dua kali karena usianya pendek. Kalau Markuti bisa sampai lima bulan baru panen," kata Sulasih. Jika Markuti menggunakan sistem pengairan alami, tergantung dari berkah Bengawan Solo, padi IR butuh pengairan yang rutin.

Sulasih menjual sapinya untuk membeli pipa dan pompa air guna mengairkan air Bengawan Solo, yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari sawahnya. Sulasih juga mulai mengenal pupuk. "Kalau Markuti, dulu tidak perlu dipupuk. Tinggal ditabur benihnya dan ditunggu saja, setelah lima bulan dipanen dengan anai-anai. Setelah itu bisa dipanen lagi sampai satu tahun baru tanam lagi," kata dia.

Hasil panen padi IR—yang digelontor banyak pupuk kimia—memang terbukti lebih tinggi dibandingkan dengan Markuti. Dalam berbagai penelitian disebutkan, intensifikasi pertanian di Jawa telah meningkatkan produktivitas lahan menjadi dua kali lipat.

Akan tetapi, yang tak diperhitungkan, produktivitas itu ternyata juga diikuti dengan lonjakan biaya produksi. Biaya yang tak sanggup ditopang petani sendiri karena kemandirian mereka telah dipangkas oleh sesuatu yang serba "dari luar".

Pupuk, yang tak lagi diproduksi ternak, traktor yang harus menyewa, dan genset untuk mengalirkan air. Maka, sebagian petani mulai mengenal utang untuk menanam padi. Di sisi lain, ancaman kegagalan panen juga meningkat karena benih monokultur yang ditanam secara massal ternyata rentan terhadap serangan hama massal.

Sejak 1990-an, seiring dengan goyahnya swasembada dan beras kembali harus dibeli dari luar negeri, kehidupan ekonomi Sulasih terus memburuk.



Demikian halnya yang dialami jutaan petani lainnya. Pupuk subsidi di lapangan sulit di dapat dan harganya dipermainkan tengkulak. Sementara itu, saat panen massal, harga gabah anjlok. Sebuah "involusi petani" telah terjadi.

#### Jerat utang

Jalan "maju" telah dirintas, dan untuk kembali seperti ini mustahil. Tanah telah rusak karena puluhan tahun digelontori pupuk dan obat-obat kimia. "Tak mungkin menanam kembali Markuti," kata Sulasih.

Tetapi, masa depan memang terasa suram bagi Sulasih. Apalagi, perubahan iklim membawa ketidakpastian musim. Dan kerusakan ekologi telah membawa banjir. "Banjir menghancurkan tanaman padi yang tinggal menunggu panen. Padahal, sudah keluar modal Rp 8 juta, yang sebagian besar dari utang," keluh Sulasih.

Pada musim tanam sebelumnya, panen Sulasih juga gagal karena padinya terserang hama sundep. "Musim lalu, masih utang Rp 11 juta. Total utang sekarang Rp 21 juta. Dari mana kami bisa membayar?" Sulasih berkata pelan, seolah kepada dirinya sendiri.

Sulasih sebenarnya bukan petani gurem. Dia memiliki 3 hektar sawah, luasan sawah yang luar biasa untuk ukuran petani Jawa yang rata-rata memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Namun, makin luas lahan sawah, berarti makin tinggi biaya produksi.

Sekali musim tanam, Sulasih rata-rata butuh biaya Rp 10 juta. Untuk pupuk butuh 2 ton, dengan harga satu ton Rp 1,5 juta. Bibit butuh 1,5 kuintal seharga Rp 500.000, pestisida Rp 1 juta, solar untuk pompa air Rp 3 juta, dan Rp 2,5 juta untuk biaya pengolahan tanah, tanam, dan panen.

"Di sini tak ada irigasi sehingga kami butuh pompa untuk mengambil air dari Bengawan Solo jika musim kemarau, dan memompa air ke luar saat musim hujan," kata Sulasih.

Jika panen bagus, Sulasih bisa memperoleh Rp 15 juta. "Tapi, kalau sedang kena musibah, seperti sekarang, berarti utang menumpuk. Jadi, petani makin susah saja sekarang," kata dia. Istilah utang, memang ramai dikenal petani, seiring dengan dimasukkannya biaya pupuk, obat, benih, traktor, dan solar untuk mesin pompa dalam komponen produksi.

Sebelumnya, kata utang tak pernah mampir dalam benak Sulasih. "Dulu, semuanya dikerjakan sendiri. Benih kita punya sendiri, pupuk dari kotoran ternak sendiri. Paling butuh bantuan mengolah tanah, yang biasanya maron (sistem bagi hasil)," kata Sulasih.

Jika petani dengan lahan luas saja makin terdesak, bagaimana nasib petani gurem? Hasil penelitian Departemen Pertanian tahun 2000 menunjukkan, 88 persen rumah tangga petani hanya menguasai lahan sawah kurang dari 0,5 hektar.

Dengan luas lahan ini, petani hanya mendapatkan keuntungan semusim mulai Rp 325.000 hingga Rp 543.000 atau hanya Rp 81.250 hingga Rp 135.000 per bulan.

Jika setiap rumah tangga petani memiliki anggota keluarga empat orang, pendapatan per kapita komunitas petani hanya sekitar Rp 34.000 per bulan, setara dengan Rp 400.000 per tahun (pendapatan ini lebih rendah dari tingkat upah minimum per bulan yang diterima tenaga kerja di sektor formal).

Perhitungan itu hanya berlaku jika panen berhasil. Lalu, bagaimana jika gagal panen? "Sudah dua tahun tak berani menggarap lahan. Biaya tanam terlalu besar. Hidup kami bergantung pada kiriman uang dari anak, yang bekerja di Surabaya sebagai buruh bangunan," kata Dalisah (55), petani penggarap di Compreng.

Rumah-rumah joglo milik petani di Desa Compreng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, itu memang terasa melompong. Anak-anak muda memilih merantau ke kota. Daerah di limpahan air Bengawan Solo yang sejak zaman Kerajaan Jenggala pada abad ke-11—sesuai Prasasti Garaman—menjadi area pertanian itu kini tak lagi bisa mengharapkan pertanian sebagai penopang hidup.

Mimpi revolusi hijau telah menghapus padi Markuti yang selama berabad-abad dimuliakan oleh alam sebagai yang paling cocok dengan kondisi ekologi setempat.

Petugas penyuluh pertanian gencar mempromosikan intensifikasi pertanian, yang dimaknai sebagai penggantian bibit padi, penggunaan pupuk buatan ekstra, pemakaian obat pestisida, dan mekanisasi pengolahan pertanian.

Tujuannya adalah menggenjot produksi. Revolusi hijau yang gencar dimulai pada tahun 1960-an itu memang tinggal gaungnya saja, tetapi dampaknya harus dibayar petani hingga saat ini. Sulasih, kini menuju titik akhir. "Saya tak tahu, apakah musim tanam tahun depan masih bisa menanam padi," kata Sulasih. (LAS)

## Petani Tiga Desa Unjuk Rasa di DPRD

SUMEDANG, (PR).-

Ratusan petani dari Desa Genteng, Banyuresmi, dan Desa Nangerang, Kec. Sukasari, Kab. Sumedang, berunjuk rasa ke DPRD dan Kantor Pemkab Sumedang, Kamis (14/2). Peserta aksi di bawah bendera Serikat Tani Nasional (STN) tersebut, menuntut pihak Pemkab Sumedang melakukan berbagai langkah serius untuk meningkatkan taraf kehidupan kaum petani.

Massa dari desa-desa di kaki Gunung Manglayang itu, berunjuk rasa mulai dari Taman Endog lalu berjalan kaki ke gedung DPRD. Sambil berorasi, mereka menggelar spanduk dan sejumlah poster berisi tuntutan kaum petani.

Para petani mendesak agar Pemkab Sumedang mencari lahan, memberikan bantuan modal, dan teknologi peralatan pertanian, untuk ladang usaha pertanian kolektif kaum petani. Selain itu, menurunkan harga pupuk dan obat-obatan pertanian, serta merealisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah tepat sasaran.

Untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, mereka meminta Pemkab Sumedang melakukan negosiasi dengan pihak Perhutani. Harapan mereka, pihak Perhutani memberikan izin kepada kaum petani di desa-desa tersebut untuk menumpang bercocok tanam padi, sayuran, dan palawija pada bagian lahan Perhutani kaki Gunung Manglayang Timur sekitar desa mereka.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumedang Drs. Sarnata mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan pasti akan ditindaklanjuti pihaknya. Kepada petani, Sarnata menjanjikan pihaknya akan melakukan langkah-langkah serius dan akan menyampaikan jawaban atas berbagai aspirasi itu paling lama 14 hari.

Khusus mengenai tuntutan agar petani di desa-desa tersebut bisa menumpang bercocok tanam pada lahan Perhutani di kaki Gunung Manglayang, dikatakan Sarnata, itu tidak mungkin mendapat izin dari Perhutani. Karena, berdasarkan hasil pertemuan pihaknya dengan pihak Perhutani, lahan Perhutani di kawasan Gunung Manglayang, semuanya termasuk dalam klasifikasi lahan hutan lindung. (A-91)<sup>\*\*\*</sup>

## **Petani Minta Harga Gabah Naik Bulog Akan Melakukan Berbagai Strategi Pembelian**

Sabtu, 16 Februari 2008 | 03:38 WIB

Jakarta, Kompas - Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mengakibatkan naiknya pengeluaran rumah tangga petani. Biaya produksi pun meningkat karena upah buruh dan transportasi juga naik. Untuk itu petani meminta pemerintah menaikkan harga gabah dan beras karena sekarang harganya terlalu rendah.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, Jumat (15/2), mengungkapkan, harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 2.000 per kilogram tidak lagi bisa mengejar laju inflasi.

Begitu pula dengan harga gabah kering giling (GKG) Rp 2.575 per kg dan beras Rp 4.000 per kg. "Setelah harga pembelian pemerintah (HPP) dinaikkan, semua harga kebutuhan pokok naik tajam," katanya.

Analisa usaha tani padi menunjukkan, keuntungan yang diperoleh petani padi dalam satu musim tanam mencapai 30 persen. Namun, keuntungan itu tidak banyak berarti ketika semua harga kebutuhan melambung.

Belum lagi biaya transportasi sebentar lagi juga akan naik menyusul pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), M Maksum, mengatakan, kenaikan HPP yang ditetapkan pada April 2007 hanya mengimbangi inflasi yang terjadi sepanjang 2005-2007.

"Namun tidak memproyeksikan kenaikan harga kebutuhan hidup dan biaya produksi masa datang. Karena itu, petani tidak pernah bisa sejahtera," katanya.

Apalagi sebagian besar petani di Jawa merupakan petani kecil dengan kepemilikan lahan 3.000 meter persegi. Petani Jawa merupakan pemasok 60 persen produksi beras nasional.

Berdasarkan data Susenas 2003, jumlah rumah tangga petani kecil 13,7 juta. Taslim (45), petani asal Karawang, Jawa Barat, menuturkan, semua harga naik, mulai dari beras, tepung, sayur, bumbu, minyak tanah, minyak goreng, dan telur.

"Kalau harga gabah tidak dinaikkan, hidup akan tambah sulit," katanya. Harapan senada juga diungkapkan Wagino (43), petani warga Kudus, Jawa Tengah.

KTNA menghitung, dengan inflasi saat ini, GKP di tingkat petani idealnya Rp 2.500 per kg, GKG sebesar Rp 3.100 per kg, dan beras Rp 5.300 per kg.

Dengan asumsi harga GKP Rp 2.500 per kg, tiap hektar tanaman padi akan memberikan keuntungan Rp 9 juta-Rp 10 juta tiap panen.

### **Penghasilan petani**

Produktivitas GKP rata-rata 6 ton per hektar. Dengan asumsi tiap rumah tangga petani memiliki lahan 0,3 ha, tiap bulannya petani kecil hanya mendapatkan penghasilan Rp 675.000-Rp 750.000.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso mengatakan, "Departemen Pertanian sekarang tengah menghitung kenaikan HPP yang ideal tahun ini."

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar mensinyalir harga gabah dan beras pada musim panen kali ini cenderung tinggi.

Pasalnya, akan mengikuti tren kenaikan harga kebutuhan pokok lain. Meski begitu, Bulog akan melakukan berbagai strategi dalam pembelian besar dari produksi dalam negeri agar mencapai target 2,4 juta ton.

Misalnya, dengan memberikan insentif biaya karung ke petani dan mitra Bulog, pelayanan cepat, pembayaran kontan, serta adanya bantuan dalam bentuk alat pertanian pascapanen oleh Deptan kepada para petani. (MAS)

## **Banjir Rugikan Petani Rp 9,5 M**

### **Kebanyakan tanaman padi berusia muda yang terendam membusuk.**

KARAWANG -- Banjir di Kabupaten Karawang yang telah merendam 14 kecamatan, sampai saat ini, belum juga surut. Bahkan, hujan yang turun seharian pada Kamis (14/2), semakin memperparah keadaan.

Ribuan rumah, areal sawah, dan bangunan sekolah di 15 kecamatan tidak luput dari rendaman air. Untuk sektor pertanian, kerugian yang timbul akibat banjir mencapai Rp 9,5 miliar.

Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Karawang, Didy Sarbini, mengatakan, areal sawah yang terendam banjir mencapai 15.337 hektare. Sekitar 25 persen dari jumlah sawah yang terendam, diprediksikan akan mengalami gagal panen karena mati membusuk.

"Kerugian yang diderita petani sangat besar sekitar Rp 9,5 miliar. Ini karena kebanyakan padi yang terendam air itu umurnya baru dua hari," kata Didy, Jumat (15/2). Menurut dia, hitungan kerugian yang diderita petani itu, didasarkan pada komponen biaya usaha tani seperti biaya saat membeli benih, biaya persemaian, serta biaya pemupukan. Modal yang dikeluarkan petani, diperkirakan mencapai Rp 2-4 juta per hektare.

Modal tersebut, kata Diby, merupakan hitungan kasar petani yang usia padinya baru dua hari. Artinya, jika padi yang usianya di atas dua hari ikut dihitung maka kerugian yang diderita petani lebih besar lagi. "Untuk meringankan beban petani, kami berusaha memberikan bantuan benih dan pupuk," ungkap dia.

Namun, ujar dia, usaha tersebut belum optimal, bila harus mengandalkan anggaran dari Pemkab. Sehingga, saat ini, pihak Distahutbun mencari bantuan dari luar kabupaten. Karena itu pihaknya meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui BUMN.

Berdasarkan data Satkorlak PBA, kecamatan yang terendam banjir di antaranya adalah Kecamatan Batujaya, Tirtajaya, Cibuaya, Tempuran, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Pedes, Jayakarta, Ciampel, serta Pakisjaya. Kecamatan lain yang juga terendam adalah Telukjambe Timur, Rengasdengklok, Rawamerta, dan Cilebar.

Bupati Karawang, Dadang S Muchtar, mengatakan, pihaknya sedang melakukan upaya untuk menolong korban banjir. Saat ini, pihaknya belum bisa memutuskan status bencana di wilayahnya tersebut karena belum adanya laporan terbaru dari Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (Satlak PBA).

Terkait bantuan renovasi rumah warga yang rusak, Dadang berjanji akan memberikan dana ganti rugi asal datanya lengkap. Sementara itu, bagi sekolah yang terendam banjir, pihaknya juga belum menyediakan tempat belajar sementara.

Namun untuk stok bantuan sembako, ungkap Dadang, telah siaga di posko Satlak PBA dan di tiap kecamatan. Saat ini, pihaknya juga mengaku masih memiliki dana cadangan dari pos bantuan tak terduga (BTT) senilai Rp 5 miliar yang bisa digunakan untuk menangani bencana.

Sementara itu, di Dusun Katalaya Desa Kertasari, Rengasdengklok, sejak semalam air genangan semakin tinggi, yakni antara satu meter hingga satu setengah meter. Akibatnya, ratusan warga dusun tersebut, harus mengungsi ke tempat yang dianggap aman. Sebanyak 11 tenda pengungsian telah disiagakan oleh tim Satkorlak PBA setempat.

Menurut warga setempat, Saim (35 tahun), penyedotan air menggunakan pompa yang dilakukan oleh petugas untuk mengurangi jumlah air, kurang efektif. Hal itu karena pompa yang dioperasikan hanya satu unit. "Pompa itu hanya mampu menyedot air sekitar dua meter kubik per jam," tutur dia mengungkapkan. win

( )

## Harga Urea Terus Naik

Senin, 18 Februari 2008 | 01:30 WIB

Banjarnegara, Kompas - Harga pupuk urea di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terus bergerak naik. Para petani di daerah itu harus membayar Rp 65.000 hingga Rp 70.000 per zak isi 50 kilogram urea. Padahal, harga normal pupuk urea per zak Rp 60.000. Kenaikan harga terjadi sejak dua pekan lalu.

Sucipto (38), petani di Desa Panawaren, Kecamatan Sigaluh, Minggu (17/2), mengungkapkan, sejak dua minggu lalu para pengecer menaikkan harga. Alasan mereka stok pupuk menipis karena kiriman dari distributor agak terhambat.

"Saya tidak tahu pasti mengapa bisa stok terhambat seperti itu. Namun, yang pasti harga pupuk sekarang naik. Bagi petani seperti saya, naik Rp 10.000 sudah sangat besar," kata Sucipto.

Kenaikan harga pupuk urea juga terjadi di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, sejak beberapa hari lalu. Di wilayah ini, harga pupuk urea di tingkat petani mencapai Rp 75.000 per zak. "Naik Rp 15.000 sangat berat bagi kami," kata Tusar, petani sayuran di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Sehubungan dengan persoalan pupuk, Menteri Pertanian Anton Apriantono menyatakan, tidak akan merekomendasikan pupuk untuk kepentingan ekspor. Produksi pupuk sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Anton menyatakan itu se usai meresmikan laboratorium penyediaan bibit unggul kopi dan kakao dengan somatic embryogenesis di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember, Sabtu.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Dadang Heru Kodri, Sabtu malam, di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, mengatakan, ketergantungan petani terhadap pupuk tunggal (urea) harus dikurangi dan digantikan dengan pupuk majemuk (NPK) untuk meningkatkan produktivitas pertanian. PT Pusri akan memproduksi pupuk NPK untuk mengganti urea. (SIR/WAD/HAN/A08)



## **Harga Beras Panen Padi Sudah Dimulai**

Senin, 18 Februari 2008 | 01:34 WIB

Jakarta, Kompas - Panen padi di sejumlah sentra produksi beras di Jawa mulai berlangsung. Harga pembelian beras di daerah-daerah oleh pedagang grosir di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, berangsur-angsur turun.

Dengan demikian, harga beras di tingkat konsumen dalam hitungan hari mulai turun. Nellys Sukidi, pedagang beras di PIBC, Minggu (17/2), mengungkapkan, pada kontrak pembelian beras Sabtu lalu dia membeli dengan harga Rp 4.450 per kilogram.

Ditambah biaya transportasi dan ongkos panggul, harga beras untuk kualitas medium atau setara IR-64 kualitas III sekitar Rp 4.600 per kg. Adapun harga beras untuk IR-64 kualitas II sekitar Rp 4.650-Rp 4.700 per kg.

Di tingkat pedagang eceran dan konsumen, harga beras untuk kedua jenis tersebut antara Rp 4.800-Rp 5.000 per kg. Adapun harga beras IR-64 kualitas I masih tinggi, yakni Rp 5.300-Rp 5.400 di tingkat konsumen.

Para pedagang lain di Cipinang mengatakan, daerah yang mulai panen padi di Jawa Timur meliputi Madiun serta Jawa Tengah seperti Sragen, Grobogan, Demak, dan sebagian wilayah Kendal. Skala luas panen padi akan terus bertambah mengingat musim panen rendeng tiba.

Petani umumnya gembira menyambut panen kali ini karena pasokan air irigasi dan air hujan cukup. Produktivitas tanaman padi pun meningkat.

Namun, petani masih dihadapkan pada masalah sulitnya menjemur gabah hasil panen karena hujan terus terjadi.

"Lumayan panen bisa 19 kuintal, naik 5 kuintal dari panen sebelumnya," kata Wanto, petani di Kendal, Jateng.

Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar memberikan jaminan kepada petani bahwa Bulog akan tetap membeli gabah petani dengan kadar air atau rendemen berapa pun. (MAS)

## HKTI Minta Jaminan Pasar

CIANJUR, (PR).-

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kab. Cianjur mendesak pemerintah agar memberikan jaminan pasar dan harga bagi para petani yang menanam kedelai. Desakan tersebut disampaikan Ketua HKTI Cianjur Ibrahim Naswari, Sabtu (16/2), menyikapi mulai digalakkannya kembali tanam kedelai kepada para petani di Kab. Cianjur.

Menurut dia, jaminan pasar dan harga kedelai sangat penting dan harus menjadi prioritas serta fokus perhatian pemerintah, supaya nantinya petani yang menanam kedelai tidak mengalami kerugian saat mereka panen. Melalui jaminan pasar, petani tidak mengalami kesulitan menjual hasil panen mereka dan bisa diserap pasar.

"Demikian pula dengan jaminan harga, petani bisa mendapatkan keuntungan saat menjual hasil panennya. Pemerintah jangan hanya mendorong petani untuk tanam kedelai, tapi harus bertanggung jawab saat mereka panen nanti," ujarnya.

Dikatakan Ibrahim, adanya jaminan paling tidak terhadap dua faktor tersebut bisa merangsang petani menanam kedelai dan tidak membuat mereka kapok. Apalagi selama ini petani Cianjur enggan menanam kedelai karena hasilnya kurang menguntungkan. Mereka umumnya baru menanam kedelai saat lahan sawah mereka sudah tidak bisa ditanami padi bersamaan dengan tibanya musim kemarau.

Ibrahim juga menegaskan dirinya sangat tidak setuju dengan dihapusnya bea masuk impor kedelai. Alasannya penghapusan bea masuk itu sangat tidak menguntungkan bagi petani dan sama artinya tidak berpihak terhadap petani. Penghapusan bea masuk tersebut dipastikan akan membuat komoditas kedelai luar negeri menjadi leluasa masuk pasar lokal, dan dikhawatirkan merusak harga maupun pasar kedelai lokal.

Sebelumnya, Pemkab Cianjur melalui Dinas Pertanian tengah berupaya mendorong petani agar mau menanam kedelai. Malahan tahun 2008, luas areal tanam kedelai di Kab. Cianjur bisa mencapai 14.000 hektare. "Tahun ini kami sedang berupaya meningkatkan produksi kedelai petani lokal kab. Cianjur. Salah satunya meningkatkan luas areal tanam kedelai," ujar Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh. (A-116)\*\*\*

## **KTNA Usulkan Kenaikan Harga Gabah Antisipasi dari Efek Kebijakan Pembatasan BBM**

BANDUNG, (PR).-

Kalangan petani yang tergabung dalam Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) mengajukan kenaikan kembali harga dasar pembelian gabah oleh pemerintah, yang mereka harapkan cukup efektif untuk musim panen tahun 2008. Dari saat ini harga dasar gabah kering punggut (GKP) Rp 2.000,00/kg yang mengacu Inpres RI No. 3 Tahun 2007, diusulkan naik pada tahun 2008 menjadi Rp 2.300,00-Rp 2.500,00/kg.

Ketua KTNA Jabar Oo Sutisna, di Bandung, Minggu (17/2) mengatakan, usulan kenaikan harga gabah itu berdasarkan antisipasi kalangan petani, untuk menyalakan dampak dari rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah. Jika harga pada tahun 2008 masih mengacu kepada harga lama, akan banyak petani yang kesulitan memperoleh keuntungan usaha, akibat efek pembatasan BBM.

"Selama ini BBM sering membawa dampak, termasuk kenaikan harga sarana produksi pertanian. Hal ini biasa dirasakan petani dari kenaikan upah, harga obat-obatan, pupuk, dll, sehingga kami tak mau mengambil risiko kerugian, jika harga BBM jadi dinaikkan kembali oleh pemerintah," ujarnya.

Menurut dia, usulan kenaikan harga GKP sebesar itu, diharapkan mampu menutupi pembengkakan modal usaha tani, yang saat ini terus meninggi. Setidaknya, diharapkan pada saat musim panen raya, para petani sudah memiliki harga dasar pembelian baru yang dapat diandalkan.

Berdasarkan Inpres RI No.3 Tahun 2007, harga GKP pada tingkat petani Rp 2.000,00/kg dan GKP pada tingkat penggilingan Rp 2.035,00/kg. Sedangkan, harga Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 2.575,00/kg dan oleh Perum Bulog dihargai Rp 2.600,00/kg, dengan kadar air GKP maksimal 25 persen dan GKG 14 persen.

Disebutkan, usulan kenaikan kembali harga dasar gabah sudah disampaikan pengurus KTNA, kepada Departemen Pertanian beberapa hari lalu. Namun hasilnya belum diketahui, karena masih menunggu pandangan dari Departemen Pertanian sendiri.

Panen tak serempak

Terkait usulan itu Ketua Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) Jabar, Abdul Harjo, malah mengkhawatirkan adanya kenaikan itu justru akan merugikan, jika hasil panen tak diperoleh secara serempak. Soalnya, sejak adanya musim panen secara bertahap mulai tahun 2007, harga gabah cenderung meninggi di tingkat lapangan, apalagi banyak calo yang memanfaatkan keadaan.

Disebutkan, saat ini pasokan gabah awal sudah diperoleh dari beberapa daerah. Namun harganya masih di atas rata-rata, terutama gabah kering simpan (GKS) masih Rp 2.800,00-Rp 3.000,00/kg dari normal Rp 2.500,00/kg, sedangkan GKP masih Rp 2.300,00/kg dari normal Rp 2.000,00/kg.

"Sedangkan harga beras sudah terus menurun seiring situasi menjelang panen, di mana sekarang kelas medium saja sudah menurun ke Rp 3.900,00-Rp 4.200,00/kg dari semula Rp 4.100,00-Rp 4.500,00/kg pada tingkat penggilingan. Perlu adanya sistem yang lebih baik, untuk menyeimbangkan kebutuhan petani dengan penggilingan, yang diselaraskan dengan kondisi pasar," katanya.

Sudah menurunnya harga beras, membenarkan Ketua Koperasi Pasar Induk Cipinang Jakarta Moch. Kosim. Dikatakan, harga beras kelas medium secara partai kini sudah menurun ke Rp 4.500,00-Rp 4.600,00/kg (kualitas 1) dan Rp 3.900,00-Rp 4.200,00 (kualitas 2), dari semula bertahan di kisaran Rp 4.800,00-Rp 4.900,00/kg. (A-81)\*\*\*

## Ribuan Petani Japung Menghentikan Budi Daya

PURWAKARTA, (PR).-

Akibat cuaca buruk yang terjadi belakangan ini, ribuan petani di kolam jaring apung di Waduk Jatiluhur menghentikan penanaman ikan karena takut terancam up-welling (arus balik) air waduk menyusul cuaca yang belakangan memburuk.

Ketua Himpunan pembudidaya ikan kolam jaring apung (Hipni) Kabupaten Purwakarta H. Darwis ketika dihubungi "PR", akhir pekan lalu membenarkan bahwa akibat cuaca buruk yang terjadi belakangan ini, para petani menghindari membudidayakan ikan di kolam jaring apung.

Dijelaskan, cuaca buruk yang terjadi mengakibatkan kandungan oksigen di dalam air kolam turun drastis menjadi di bawah 1 atau 0,7. Padahal, kondisi normal oksigen itu biasanya 3. Menurut dia, ikan-ikan yang berusia satu minggu hingga satu bulan masih bisa bertahan di kondisi buruk sekarang ini, tetapi bagi ikan-ikan yang siap panen sangat rentan dengan arus balik.

"Untuk menghindari kerugian, menghadapi cuaca seperti ini para petani biasanya menghindari membudidayakan ikan dan menunggu cuaca membaik," ujarnya seraya mengatakan para petani menahan membudidayakan ikan sejak Januari lalu.

Dikatakan Darwis, berdasarkan informasi yang diterima dari BMG, cuaca buruk ini diperkirakan akan berlangsung hingga 20 Februari 2008. "Mudah-mudahan saja ramalan itu benar sehingga para petani dapat mengembangkan lagi usahanya," tuturnya.

Hal senada diungkapkan H. Herman (60), pemilik kolam jaring apung di Kampung Ubrug, Desa Kembang Kuning, Kec. Jatiluhur, Purwakarta mengaku, ikan-ikan yang siap panen nyaris terkena arus balik. "Untungnya, ikan-ikan siap panen sebanyak 30% semalam sempat dijual dengan harga normal. Kalau terlambat dipanen ikan-ikan miliknya pasti akan mati dan sudah tentu akan rugi," ungkapnya.

Dijelaskan, kondisi buruk itu dalam tahun 2007-2008 sudah terjadi tiga kali. "Biasanya arus balik itu terjadi pada musim hujan atau di musim pancaroba," katanya. (A-86)\*\*\*

## **Ekonomi Mikro/ Sektor Riil**

### **Syarat Kualitas Gabah Petani Ditingkatkan**

Jakarta | Selasa, 19 Feb 2008

PERUM Bulog tahun ini meningkatkan persyaratan kualitas gabah petani yang akan dibeli dari sebelumnya hanya dua kini menjadi lima ketentuan. Direktur Utama Perum Bulog, Mustafa Abubakar di Jakarta, Senin(18/2), seperti dikutip Antara menyatakan, Inpres no 3 tahun 2007 tentang Perberasan menyebutkan persyaratan kualitas gabah yang harus dipenuhi petani agar bisa dibeli Bulog sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) hanya kadar air dan kadar hampa ataupun kotoran. "Sekarang Bulog menambahkan tiga komponen kualitas gabah yang harus dipenuhi petani," katanya.

Dalam Inpres no 3 tahun 2007 disebutkan pembelian gabah kering panen (GKG) dari petani dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 persen Rp2000 per kg. Untuk GKG kadar air maksimum 14 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum tiga persen senilai Rp2.575 per kg. Pembelian beras oleh Bulog dengan syarat kualitas kadar air maksimum 14 persen dan butir patah maksimum 20 persen sebesar Rp4.000 per kg.

Mustafa mengatakan, tiga persyaratan lain yang akan diterapkan Bulog untuk pengadaan beras dalam negeri pada 2008, yakni derajat sosoh mencapai 95 persen, beras kuning maksimum tiga persen dan kandungan menir maksimum dua persen. Tiga persyaratan tambahan yang ditetapkan Bulog belum secara formal. Namun, itu tidak menutup kemungkinan nantinya dimasukkan dalam Inpres Perberasan yang baru.

Meskipun belum ditetapkan secara formal dalam peraturan, tambahnya, namun sesuai Inpres no 3 tahun 2007 institusi pelaksana pengadaan beras dalam negeri (Bulog) diberikan kewenangan untuk menambah persyaratan kualitas gabah/beras petani yang akan dibeli.

Sapariah

## Petani Citepus Hilir Keluhkan Terbatasnya Air

SUKABUMI, (PR).-

Petani di Citepus Hilir, Kec. Palabuhanratu, Kab. Sukabumi mengeluhkan terbatasnya air irigasi Cilisung dan Cidahon yang bersumber dari Sungai Citepus. Selama ini aliran Sungai Citepus selain dipergunakan untuk mengairi areal persawahan, juga digunakan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

"Setelah air sungainya dibagi-bagi untuk sawah dan PDAM, persediaan air irigasinya jadi terbatas. Mohon kiranya pemerintah bisa mengatasi seretnya air irigasi ini, karena selalu menjadi masalah bagi petani setiap tahunnya," kata Ujang Safe'i, Ketua Kelompok Tani "Karya Tani" Dusun I, Citepus Hilir, Senin (18/2).

Ujang mengatakan hal itu saat berdialog dengan Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi H. Marwan Hamami, M.M., dalam acara "Panen Demplot Padi Legowo Dua" di Sekretariat Kelompok Tani "Karya Tani" di Desa Citepus, Palabuhanratu. Dalam acara tersebut tampak hadir Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Ir. Dana Budiman, M.Si., Camat Palabuhanratu Dedi Chardiman, S.I.P., dan Kades Citepus Parluhutan.

Menanggapi hal itu, Ir. Dana Budiman, M.Si. mengatakan, aspirasi para petani Citepus bisa diatasi lewat program Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), yang dikoordinasikan dengan Dirjen Pengembangan Lahan dan Air Deptan untuk selanjutnya dibuatkan desain irigasi.

Namun, Dana menambahkan, pembangunan irigasi teknis diprioritaskan bagi lahan-lahan persawahan yang dinilai prospektif, yang dalam pembangunannya perlu terintegrasi dengan dinas terkait. (A-67)\*\*

## Tunda Kebijakan Persyaratan Mutu Gabah

[JAKARTA]Perum Bulog diminta untuk menunda penerapan kebijakan persyaratan mutu gabah petani hingga musim panen raya berikutnya. Hal itu untuk memberi kesempatan yang cukup kepada petani untuk meningkatkan kualitas gabah mereka.

Penerapan mutu yang ketat saat ini dinilai tidak bijaksana, karena waktunya bersamaan dengan dimulainya panen raya, serta banyaknya musibah banjir yang menimpa lahan sawah di sejumlah daerah.

Demikian pendapat yang disampaikan sejumlah pihak kepada SP, Selasa (19/2) terkait rencana Bulog memperketat persyaratan mutu beras petani.

Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Musthafa Abubakar mengatakan, tahun ini pihaknya akan memperketat persyaratan mutu gabah petani dari dua ketentuan menjadi lima ketentuan. Jika sebelumnya hanya kadar air dan kadar hampa ataupun kotoran, kini Bulog menambahkan tiga komponen, yakni derajat sosoh mencapai 95 persen, beras kuning maksimum tiga persen, dan kandungan menir maksimum dua persen.

Dalam Inpres No 3 tahun 2007 disebutkan, untuk pembelian gabah kering panen (GKG) dari petani dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 persen sebesar Rp 2.000/kg. Untuk gabah kering giling (GKG), kadar air maksimum 14 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum tiga persen senilai Rp 2.575/kg. Sedangkan untuk pembelian beras oleh Bulog dengan syarat kualitas kadar air maksimum 14 persen dan butir patah maksimum 20 persen sebesar Rp 4.000/kg.

Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti), Agusdin Pulungan menilai, penerapan tambahan persyaratan saat ini, berpotensi memukul harga gabah di tingkat petani. Di saat panen melimpah, namun tiba-tiba Bulog menerapkan tambahan syarat mutu yang ketat, yang bisa berakibat jatuhnya harga gabah.

Karena, jika Bulog tidak membeli gabah petani, maka yang bermain nantinya para tengkulak ataupun pedagang spekulan. "Seharusnya, jauh-jauh hari Bulog sudah mensosialisasikan rencana pengetatan mutu ini agar petani bisa memenuhinya pada tahun ini. Dan Bulog juga berkewajiban membantu meningkatkan mutu gabah petani," ujar Agusdin.

Bertahap

Senada dengan Agusdin, Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir meminta Bulog untuk menerapkan standar mutu yang ketat secara bertahap. Menurut Winarno, kendala peningkatan mutu gabah bukan karena budaya petani semata.

Namun juga karena perlunya modal usaha tani yang besar, yang justru sulit didapatkan petani saat ini. "Lihat saja, dukungan perbankan kita terhadap sektor pertanian, sangat minim," ujar Winarno.

Ia mencontohkan, di saat musim hujan seperti saat ini di sejumlah sentra beras di Jawa, diperlukan alat pengering modern. Dan itu membutuhkan modal besar untuk pengadaannya.

"Jika pengeringan tidak maksimal, bagaimana petani bisa memenuhi mutu yang disyaratkan Bulog," ujarnya.



Winarno berharap, persyaratan mutu diterapkan tidak dalam upaya mencari alasan untuk impor beras, karena dengan alasan rendahnya mutu beras petani. Namun itu dilakukan dalam upaya memperbaiki mutu gabah petani dan mengurangi tingkat kehilangan pascapanen.

Menjawab hal itu, Musthafa mengatakan, Perum Bulog akan mengoptimalkan penggunaan alat pengering (dryer) untuk mempertahankan kualitas gabah petani pada saat panen raya, yang diperkirakan berlangsung sekitar Februari, Maret, dan April 2008.

Upaya meningkatkan mutu gabah justru untuk mencegah harga beras jatuh.

Dengan kondisi seperti itu, para spekulasi mudah sekali mempermainkan harga, dan membuat petani kehilangan posisi tawar.

Sementara itu, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian, Djoko Said Damarjati menjelaskan, gerakan penanganan pascapanen dan pemasaran dengan anggaran Rp 80 miliar, baru mampu mengamankan produksi gabah di lahan seluas 2 juta hektare. Anggaran sebesar itu, tambahnya, antara lain, untuk pengadaan alat-alat dan mesin pertanian pascapanen, seperti perontok dan pengering, terpal, sabit bergerigi.

Djoko mengakui, upaya meningkatkan mutu gabah dan pengurangan kehilangan hasil, revitalisasi penggilingan padi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan saat ini terkendala keterbatasan dana. Oleh karena itu, dia meminta pihak BUMN dan perbankan ikut terlibat dalam gerakan pascapanen ini.

Djoko mengatakan, losses rata-rata nasional mencapai 21,5 persen. Dalam gerakan ini sasaran yang diharapkan adalah pengurangan losses sebesar 3 persen atau hanya tersisa 18,5 persen. [L-11]

## **Nusantara**

### **Tiga Pekan Petani Menjerit 4 Ribu Ton Pupuk Dibongkar**

KECERIAAN mulai hinggap di wajah petani Sumbar, seiring telah dibongkarnya 4200 ton pupuk di Pelabuhan Teluk Bayur Selasa (19/2), pagi. Pasalnya hampir tiga minggu petani Sumbar menjerit akibat harga pupuk melambung tinggi mencapai Rp200 ribu per karung, yak hanya itu pupuk di pasaran juga sulit didapat. "Kami akan segera mendistribusikan pupuk tersebut ke 19 Kabupaten dan Kota di Sumbar," ujar Area Manager PT Pusri Sumbar Mohammad Syam dihubungi Jurnal Nasional, kemarin.

Menurut dia, kapal agak terlambat datang dari jadwal yang sudah ditentukan karena pengaruh cuaca buruk beberapa pekan terakhir perairan Indonesia bagian barat. Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan pelayaran, sehingga kapal terlambat sampai di Sumbar.

Faktor ini telah memicu kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah di Sumbar, seperti di Kabupaten Solok, Kota Solok, Tanahdatar, Padangpanjang, dan Pasaman. "Jadi, kelangkaan bukan disebabkan adanya distributor nakal, tapi dikarenakan keterlambatan kapal dalam pendistribusian ke wilayah Sumbar," tukasnya.

PT Pusri cabang Sumbar sebelumnya telah mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk karena persediaan stok pupuk di gudang Pusri tersisa 283 ton. "Bukan berarti PT Pusri Sumbar lamban dalam bekerja," tegasnya.

General Manager Pelindo Padang Budi Prayitno mengatakan, untuk bongkar muat pupuk di pelabuhan membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari.

Asisten II Setdaprov Sumbar Surya Dharma Sabirin dengan tegas meminta PT Pusri untuk langsung mendistribusikan pupuk dari pelabuhan ke daerah, tanpa harus diendapkan dulu di gudang. "Pupuk itu segerakan didistribusi ke distributor masing-masing daerah. Jangan sampai masuk ke gudang Pusri lagi, karena pengguna pupuk sudah lama menunggu," katanya. Adrian Tuswandi

Rusdy Setiawan Putra

## 1.000 ha Sawah Gagal Tanam

SUBANG, (PR).-

Sedikitnya 1.000 hektare lahan persawahan di wilayah Pantura Kab. Subang mengalami gagal tanam akibat curah hujan yang tinggi sehingga menggenangi tanaman. Bahkan, jumlah itu kemungkinan akan bertambah karena persawahan di Kec. Legon Kulon masih ada yang terendam.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Subang Drs. Agus Taruna yang dikonfirmasi saat memberikan sosialisasi beras ketan di Kec. Pusakanagara, Selasa (19/2) membenarkan adanya areal tanaman padi yang rusak akibat tergenang air. Bahkan jumlahnya mencapai 3.000 hektare selama Januari hingga awal Februari ini. "Betul jumlahnya ada seribu hektare bila diakumulasikan dari beberapa kecamatan, yaitu Blanakan, Pabuaran, Pusakanagara, Pamanukan, dan Legon Kulon. Kemungkinan bisa berubah datanya menjadi lebih karena Legon Kulon masih ada yang terendam air," jelasnya.

Menurut Agus, kondisi itu akan terus terulang setiap tahun bila tidak ada penanganan berupa penyodetan saluran. Sebab, bila curah hujan cukup tinggi, sungai meluap hingga air tidak bisa terbuang. Meski demikian, kerusakan ribuan hektare tanaman padi itu tidak sampai berpengaruh terhadap program ketahanan pangan termasuk produksi. Sebab tanaman yang rusak ada yang masih dalam persemaian dan tanaman yang baru ditanam 1 minggu. "Kalaupun terjadi hanya berupa terlambat panen," kata Agus.

Sementara itu, Camat Legon Kulon Dra. Ela Nurela yang dihubungi terpisah mengatakan, hujan yang terus-menerus mengakibatkan banjir di lingkungan permukiman, persawahan, dan tambak. Bahkan hingga kini masih ada beberapa wilayah yang belum surut, terutama di areal persawahan dan tambak. "Jumlah tanaman yang terendam diperkirakan tinggal 400 hektare dari jumlah keseluruhannya 620 hektar, belum persemaian mencapai 200 hektaran," kata Ela.

Sepekan lalu, kata Camat Legon Kulon, hampir seluruh desa yang ada terkena genangan walaupun tinggi air maksimal 45 cm. Wilayah terparah di daerah Legon Kulon dan Anggasari dengan jumlah rumah yang terendam mencapai 570 unit dan tanaman padi 143 hektare. Sedangkan pertambakan mencapai 462 hektare dan seluruhnya berada di Desa Tegalurung. "Mudah-mudahan kondisi alam seperti hari ini, cerah dan tidak ada hujan," kata Ny. Ela. (B-76)\*\*

## Lahan Kritis di Garut Capai 52.052 Hektare

GARUT, (PR).-

Berbagai upaya penanganan lahan kritis sebenarnya telah dilakukan Pemkab Garut dalam lima tahun terakhir. Namun, hingga kini lahan kritis di Garut masih cukup luas, mencapai 52.052 hektare. Padahal tidak sedikit dari lahan kritis tersebut berada di kawasan hutan yang terletak di sejumlah hulu daerah aliran sungai (DAS).

Menurut Plt. Bupati Garut Memo Hermawan, Selasa (19/2), penanganan lahan kritis di Garut tidak bisa ditawar lagi. "Upaya itu penting bagi kelestarian dan keseimbangan ekosistem di bagian hulu dan hilir DAS yang ada di wilayah Garut dan sekitarnya," katanya.

Ia mengatakan, sebagian besar kawasan hutan di Garut secara geografis terletak di DAS Cimanuk Hulu, DAS Cikaengan/Cisanggiri, DAS Cilayu/Cikandang, dan DAS Ciwulan Hulu. Sehingga keadaan hutan di Garut sangat penting untuk mendukung fungsi ekologi dan media produksi di wilayah Garut.

Selain itu, hutan itu berperan penting dalam mempertahankan kelestarian keseimbangan ekosistem di bagian hulu dan hilir DAS yang secara administratif berada di wilayah kabupaten sekitarnya.

Disebutkan, dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jabar, Garut mempunyai kawasan hutan paling luas. Luas kawasan hutan di Garut pada 2004, mengacu pada Kepmenhut No. 195/KPTS/ II/2003 yaitu seluas 107.865 ha (35% dari luas keseluruhan Kabupaten Garut), terdiri atas hutan lindung 75.572 ha. (70,06%), hutan konservasi 26.727 ha (24,77%), hutan produksi terbatas (HPT) 5.400 ha. (5,02%), dan hutan produksi 1.66 ha (0,15%). Pada 2004, tercatat lahan kritis di Garut mencapai seluas 84.917 hektare.

Mengenai upaya penanganan lahan kritis yang dilakukan Pemkab Garut tersebut, katanya, antara lain melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH), Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), serta program-program lainnya, termasuk swadaya masyarakat.

"Sayangnya, lahan kritis yang tertangani lebih sedikit dibandingkan dengan lahan kritis belum tertangani yang saat ini mencapai seluas 52.052 hektare," katanya.

Atas dasar itu, Memo mengimbau semua elemen masyarakat melakukan penanaman sekaligus dengan penjagaan/pemeliharaannya. (A-112)\*\*\*

## Penyerapan Beras Lokal tidak Abaikan Kualitas

MAKASSAR-- Perum Bulog tidak akan mengurangi kualitas penyerapan beras dalam negeri yang tahun 2008 sebanyak 2,43 juta ton. Bulog tidak ingin memberikan beras dengan kualitas buruk untuk alokasi beras miskin (raskin) serta korban bencana alam. Kualitas raskin dijamin akan sama dengan kualitas yang dikonsumsi masyarakat umum.

"Bulog berusaha tidak memberikan beras untuk program raskin dengan kualitas rendah. Mutu beras untuk raskin sama dengan yang disalurkan ke masyarakat," ujar Abdul Waries Patiwi, direktur Pelayanan Publik Perum Bulog, dalam acara Sosialisasi Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2008 se-Indonesia Timur di Makassar, Sulsel, Selasa (19/2).

Perum Bulog saat ini sedang mengusulkan tambahan tiga komponen kualitas (mutu) gabah dan beras yang diserap dari petani. Ketiga komponen mutu itu yaitu derajat sosoh minimal 95 persen, butir kuning maksimal tiga persen; dan kandungan menir maksimal 2 persen. Tiga komponen ini tidak termasuk dua komponen kualitas beras yang tercantum dalam Inpres No 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan. Dua komponen mutu yang terdapat di Inpres adalah kadar air maksimum 14 persen, dan butir patah maksimum 20 persen.

"Tambahan tiga komponen ini untuk menjamin kualitas beras yang diserap Bulog benar-benar layak konsumsi, dan ini untuk menegaskan jika kualitas beras untuk raskin benar-benar memenuhi kelayakan SNI maupun Inpres," ujar Dirut Perum Bulog Abubakar Mustafa.

Bulog memberlakukan tabel rafaksi untuk gabah dan beras yang kualitasnya di bawah komponen mutu sesuai Inpres No 3/2007 maupun SNI. Seperti dijual dalam program Operasi Stabilisasi Harga Beras (OSHB). Ariansyah, mitra kerja Sub Divre Palopo dari Unit Dagang (UD) meminta pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) dan memberlakukan pembelian gabah dan beras dengan harga murah untuk gabah dan padi yang kualitasnya di bawah komponen mutu Inpres No 3/2007. "Kami hanya bisa membeli Rp 1.500 per kilogram untuk kualitas gabah dan padi yang rendah, daripada kami rugi," ujar Ariansyah.

Dia menjabarkan, saat memasuki masa panen, cuaca masih hujan, sehingga kadar air (rendeman) sangat tinggi. Bulog tidak mempermasalahkan jika ada mitra kerja yang mengambil keputusan tersebut. Hasil evaluasi Departemen Pertanian (Deptan) tentang pengadaan beras dalam negeri pada 2007 sebanyak 1,76 juta ton, menunjukkan jika kualitas beras masih di bawah ukuran Standar Nasional Indonesia (SNI) Mutu IV. Misalnya kandungan menir masih di atas 2 persen berjumlah 80 persen dari produksi tahun 2007 atau 1,408 juta ton; sedang derajat sosoh dibawah 95 persen dari 10 persen atau sebanyak 176.000 ton. Dengan kualitas sebanyak itu, maka beras untuk raskin kerap dibawah kualitas standar beras yang layak dikonsumsi.

Namun Mustafa menjelaskan jika tambahan tiga komponen masih usulan, dan saat ini sedang dalam pembahasan dengan Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono. "Dalam waktu dekat rumusan tiga komponen ditetapkan dasar hukumnya akan diputuskan, saat ini Bulog dan Deptan sedang membawa persoalan itu ke rapat perekonomian," ujar Mustafa.

zak  
( )

## Kebijakan Pangan Harus Realistis

Persoalan pangan tidak habis-habisnya menjadi topik bahasan di media massa. Harus jujur diakui bahwa persoalan pangan di Indonesia memiliki implikasi yang luas di masyarakat, karena menyangkut banyak aspek. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi prioritas untuk dipenuhi. Jika penghasilan masyarakat masih rendah, maka sebagian besar anggaran dialokasikan untuk membeli bahan pangan.

Di Indonesia jumlah keluarga miskin masih cukup besar, sehingga kenaikan harga pangan sangat berpengaruh. Teriakan rakyat kecil akibat kenaikan harga pangan bisa dijadikan alat politik untuk menjatuhkan penguasa. Hal itu sangat dimengerti oleh pemerintahan Orde Baru, sehingga mereka mengendalikan harga pangan dan menerapkan kebijakan harga pangan murah agar rakyat bisa kenyang dan menjadi tenang.

Sekarang harga bahan pangan diserahkan ke mekanisme pasar. Pemerintah akan melaksanakan pasar murah dan membagikan beras untuk rakyat miskin (raskin) untuk meredakan masalah rakyat kecil. Sayangnya, program ini sering dimanfaatkan para pedagang yang ikut antre dan akhirnya rakyat kecil tetap membeli beras dengan harga lebih tinggi. Lebih disayangkan lagi jika ternyata kelompok menengah atas ikut-ikutan minta jatah raskin.

Oleh karena itu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, seperti diberitakan di harian ini Selasa (19/2/2008), meminta agar masyarakat menengah atas rela membeli bahan pangan dengan harga pasar, bukan beras murah yang ditujukan untuk rakyat berpenghasilan kecil. Penekanan lain adalah agar kelompok menengah atas menjadi pelopor dalam program diversifikasi pangan, dan untuk itu pemerintah perlu menyediakan banyak pilihan pangan yang layak dan beragam.

Pernyataan Menteri Pertanian itu cukup menarik untuk dicermati, karena pendekatan yang dilakukan adalah diversifikasi pangan untuk masyarakat menengah-atas dan satu lagi pernyataan bahwa harga pangan yang tidak lagi murah akan mendorong kelas menengah lebih banyak melakukan diversifikasi dalam konsumsi pangan mereka. Hal ini agak berbeda dengan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow.

Dalam teorinya, Abraham Maslow menyebutkan lima kebutuhan dasar manusia yang diurutkan sesuai prioritas. Pertama adalah kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan, dan papan. Pendapatan masyarakat akan dipakai membeli barang memenuhi kebutuhan ini. Setelah cukup maka pendapatan akan dialokasikan untuk kebutuhan kedua, yaitu keamanan dan keselamatan. Kemudian ketiga kebutuhan sosial, keempat kebutuhan penghargaan, dan kelima kebutuhan akan aktualisasi diri.

Jadi, masyarakat menengah-atas sebenarnya tidak terpengaruh oleh kenaikan harga bahan pangan karena mereka telah berhasil melalui tahapan pertama. Untuk pangan, mereka sudah berorientasi pada keinginan (jenis makanan berkualitas) dan bukan mencari pangan murah. Bagi kelompok ini, alokasi anggaran untuk membeli beras sangat kecil. Selain itu, pendidikan kelompok ini relatif bagus, sehingga pola makannya juga tidak akan memperbanyak porsi pada nasi, sehingga mereka tidak perlu diminta melakukan diversifikasi pangan.

Oleh karena itu, sebaiknya Mentan lebih memprioritaskan program diversifikasi pangan pada kelompok rakyat yang berpenghasilan rendah. Karena kelompok ini lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk membeli bahan pangan. Sedangkan di kelompok menengah-atas, kenaikan harga bahan pangan tidak terlalu berpengaruh. Bahkan, mereka sudah terbiasa untuk mengurangi karbohidrat. Memang dibutuhkan penelitian tersendiri

## Kebijakan ketahanan pangan rugikan petani

JAKARTA: Kebijakan pemerintah tentang ketahanan pangan setengah hati karena cenderung menguntungkan petani asing dibandingkan untuk petani dalam negeri.

Ketua Harian Dewan Nasional Hortikultura Indonesia Benny Kusbini mengungkapkan hal itu menyusul sikap pemerintah yang memilih menurunkan bea masuk (BM) impor beras dari Rp550 menjadi Rp450 per kilogram daripada mendorong produksi.

"Sebaiknya, subsidi itu dinikmati petani kita," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Kemudian, kata dia, pajak impor kedelai dinolkan. "Ini sama saja melindungi petani AS atau asing dan membunuh petani kedelai kita secara sistematis, karena tidak merevitalisasi petani kedelai kita. Harusnya, gratiskan bibit unggul, ada subsidi harga, dan naikkan pajak impor sehingga harga lokal kompetitif," katanya.

Begitu pun soal minyak goreng. "Harga minyak goreng, biarkan melangit. Tapi naikkan pajak eksportnya. Cari sebanyak-banyaknya devisa dari ekspor crude palm oil demi dana pembangunan," katanya.

Kemudian, menurut dia, kurangi makan gorengan dan perkuat pangan yang direbus. Bangsa Jepang, kata dia, sehat-sehat dengan makanan yang direbus.

"Jangan-jangan dalam pemerintah sekarang ini ada agen asing? Mendag, Menkop jangan terlalu pakai faham liberal dengan mengorbankan kedaulatan kemandirian pangan. Bangkitkan semangat mencintai produk pertanian sendiri dan ganti pola makan," ungkap dia.

Soal terigu, kata dia, kampanyekan mengubah pola makan dengan mengurangi makan beras dan mi ke umbi-umbian. "Dulu kita makan tiwul singkong, ketela rambat, sagu, biasa-biasa saja. Apalagi stoknya melimpah dan mudah didapat," papar dia.

Menurut dia, tragis sekali hanya untuk menstabilisasi harga terigu, minyak goreng, dan kedelai negara harus kehilangan pendapatan sebesar Rp4,9 triliun.

"Itu bukan melindungi rakyat kecil, tetapi semata-mata mensubsidi perusahaan multinasional, seharusnya naikkan import duty. Terigu, kita cari substitusi pangan dari domestic source," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (Cides), Syahganda Nainggolan mengatakan permasalahan (krisis) pangan nasional yang dihadapi bangsa Indonesia kian meresahkan berbagai pihak.

'Kepelikan'

Kehidupan sebagian besar masyarakat pun berada dalam 'kepelikan' akibat krisis yang sudah berlangsung cukup lama tersebut.

"Belum lagi di masyarakat kita, penderitaan hidup yang dihadapi kian memperburuk nasib mereka yang memang tergolong lemah bergelut di sektor pertanian," ujarnya.

Tak ayal, kata dia, daya tahan hidup petani menjadi sangat rentan. "Jangankan memberi kontribusi pada agenda ketahanan pangan nasional, untuk keluar dari deraan krisis saja mereka tidak sanggup," tutur dia.

Dengan demikian, menurut dia, sejauh ini petani sebenarnya tidak memiliki kekuatan membangun ketahanan pangan di negara yang kaya dengan basis pertanian ini.

Sementara itu, Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wampti) Agusdin Pulungan mengatakan kebijakan perberasan Indonesia menekan petani. Dia mencontohkan penambahan kriteria pembelian beras oleh Perum Bulog.

Oleh Martin Sihombing  
Bisnis Indonesia



## Bulog Didesak Beli Beras Petani

Palembang, Kompas - Wakil Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Leonardo Hutabarat, Selasa (19/2), mengatakan telah mendesak Bulog agar segera menyerap beras petani di Sumsel. Alasannya, sejumlah kabupaten sentra beras di Sumsel saat ini sudah memasuki masa panen.

Leonardo mengatakan, setiap tahun saat musim panen harga beras di Sumsel selalu anjlok. Sampai saat ini, Bulog belum melakukan penyerapan beras petani Sumsel meskipun sudah melakukan persiapan.

"Justru sekarang saat yang tepat untuk menyerap beras petani. Pada saat musim paceklik nanti harga beras akan stabil, jadi Bulog tidak perlu menyerap beras petani," kata Leonardo.

Leonardo optimistis kualitas beras petani Sumsel bisa diterima Bulog. Beras kualitas asalan dari petani dibeli pedagang beras kemudian diolah lagi sehingga memenuhi kualitas beras yang disyaratkan Bulog.

Leonardo menjelaskan, tahun 2008 Bulog berencana menyerap beras petani sebanyak 100.000 ton. Jumlah tersebut sama dengan jumlah penyerapan beras petani tahun 2007. Namun, menurut Leonardo, pada tahun 2007 realisasi penyerapan beras oleh Bulog tak mencapai 100.000 ton.

Pramu, salah seorang petani di Desa Tebat Jaya, Kecamatan Buay Madang, Ogan Komering Ulu Timur, mengatakan, harga gabah basah di tingkat petani saat ini Rp 2.100 per kilogram. Dua minggu sebelumnya, harga gabah sempat anjlok jadi Rp 1.900 per kilogram karena ada beras dari Lampung yang masuk ke Sumsel.

### Mitra kerja Bulog

Sementara itu, Bulog Sumatera Selatan telah menginstruksikan mitra kerjanya untuk menyerap gabah petani pada periode awal masa panen. Meskipun harga pembelian pemerintah (HPP) 2008 belum turun sampai sekarang, pihak Bulog akan menggunakan acuan HPP 2007 karena aturan itu masih berlaku sebelum ada revisi dari pemerintah pusat.

Kepala Bulog Sumatera Selatan Teddy Mulwadi mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah pusat pekan lalu diputuskan bahwa semua Bulog di daerah, termasuk Sumsel, tetap melakukan pembelian gabah dari petani.

Saat ini, Teddy mengakui ada keengganan dari sejumlah mitra Bulog untuk menyerap gabah di tingkat petani. Ini terjadi karena mitra Bulog takut merugi terkait dengan belum ditetapkannya harga pembelian pemerintah gabah-beras tahun 2008.

Kendati demikian, Bulog Sumsel menginstruksikan mitra kerjanya agar tetap menyerap gabah petani selama HPP 2008 belum ditetapkan, dengan mengacu pada HPP 2007. (ONI/WAD)

## Petani Dalam Ancaman Fisik dan Mental

Oleh Dedi Sufyadi

Berita pertanian di koran-koran kebanyakan negatif. Tanggal 24 Januari 2008, misalnya, *Pikiran Rakyat* menurunkan berita, "1.000 Peternak di Tasikmalaya Menghentikan Usahanya". Kemudian, "Petani Sulit Memperoleh Pupuk" ("PR", 23/1/2008). "Petani Kol Menjerit Karena Harga Jatuh" (Priangan, 3/1/2008). "Petani Citepus Hilir Keluhkan Terbatasnya Air" ("PR", 19/2/2008). Memang, pertanian kita sudah demikian terkenal keterpurukannya. Berbagai ancaman terhadap pertanian kita sedang menghadang.

Ancaman terhadap pertanian kita berjenis-jenis. Mulai dari ancaman yang bersifat fisik hingga mental. Masih ada lagi ancaman lainnya seperti ancaman kebijakan, kelembagaan -- struktural dan kultural.

Ancaman yang bersifat mental merupakan muara bagi jenis ancaman lainnya. Sesungguhnya, berbagai ancaman itu bersumber pada perilaku kita sendiri. Perilaku yang kurang percaya pada diri sendiri dan perilaku yang terkontaminasi oleh budaya luar. Budaya bertani semakin luntur. Budaya berkoperasi semakin terdesak oleh kapitalisasi.

### Ancaman fisik

Ancaman yang bersifat fisik berkaitan dengan kepentingan proses produksi usaha tani itu sendiri. Destruksi sistemis di bidang sumber daya alam semakin menjadi-jadi. Lahan subur menghilang, air semakin sulit, pupuk pun sulit dicari.

Tentang air makin sulit ini diakibatkan oleh maraknya penebangan liar dan alih fungsi lahan. Di Garut, misalnya, 20% mata air dikabarkan hilang setiap tahun. Bagi petani dan kita, air memegang peranan penting sekali. Kita bisa hidup di dunia ini karena ada air.

Tentang parahnya kondisi irigasi, saya pernah meneliti produktivitas hasil sawah berpengairan dan produktivitas hasil sawah tadah hujan. Ternyata, di antara kedua basis ekologi tersebut sudah tak ada beda, baik intensitas tanam maupun produktivitas hasilnya. Ini merupakan pertanda bahwa jaringan irigasi telah rusak.

Bayu Krisnamurti sebelum jadi pejabat eksekutif (2004) pernah berucap bahwa pemerintah justru sibuk membangun jalan tol, bukan mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki irigasi yang rusak. Ucapan Beliau tersebut perlu diralat sekarang karena Presiden SBY sendiri sudah mau melirik perlunya pembangunan infrastruktur perdesaan termasuk jaringan irigasi ini.

Kebijakan pembangunan jaringan irigasi pun digelindingkan oleh pemerintah pusat dengan back-up Bank Dunia. Namun permasalahannya, masih saja terletak pada tataran implementasi di lapangan. Sebagai contoh, apa yang terjadi di Kabupaten Demak, petani terpaksa gagal tanam gara-gara di sekitar sawahnya di bangun jaringan irigasi yang notabene bertujuan untuk menolong petani agar sawahnya mendapatkan pengairan yang lebih baik.

Menyadari kejadian di atas, perlu kiranya dikatakan bahwa kegagalan program itu disebabkan oleh program yang dirancang oleh orang luar dan tidak berdasarkan kebutuhan orang dalam. Maksudnya, sinergisme dari para pihak yang terkait dengan pengairan sawah perlu dibangun. PDAM perlu lebih peduli pada kepentingan petani. Industrialisasi perlu lebih menghormati tradisi.

### Ancaman mental

Ancaman yang bersifat mental lebih mengkhawatirkan lagi. Ancaman ini berupa tumbuhnya mental kebarat-baratan dalam masyarakat kita. Anak-anak kita lebih dekat dengan Dunkin' Donuts ketimbang getuk lindri. Angkatan muda tani kita lebih suka jadi buruh pabrik murahan ketimbang harus berlumpur-lumpur di sawah. Ironisnya, para pejabat kita sangat doyan impor. Impor beras dan impor kedelai memang sangat mengasyikkan. Mereka juga asyik membuat kebijakan yang bersifat involusi, seperti meliberalisasi pasar produk pertanian. Akhirnya jadi serbasusah. Bertani susah, bepergian juga susah karena bensin pun katanya akan dijatah.

Memang menurut sejarah, bangsa kita pernah lama sekali dijajah. Dijajah oleh Belanda, dan sekarang ini kayaknya oleh Amerika. Mulai dari dasi hingga kedelai harus diimpor dari sana.

Dulu, ratusan tahun mental kita dirusak Belanda. Kita terus-menerus dipaksa untuk bertanam komoditas yang menguntungkan Belanda melalui program tanam paksa. Petani hingga kini kayaknya belum merdeka.

Kini, sepertinya sudah lama kita bergantung pada Amerika. Indikatornya, barang impor dari Amerika semakin membanjiri negeri ini. Mulai dari barang mewah hingga barang yang dibutuhkan rakyat banyak. Kedelai impor, paha ayam impor. Padahal menurut para pengamat, kebijakan impor yang tidak bijak telah membuat kian terpuruknya nasib petani ke jenjang kemiskinan.

Berbagai ancaman terhadap pertanian kita tentunya mesti disikapi dengan segera. Tak usah ditunda-tunda. Menurut Shoichi Nakayama, Ketua Komisi Riset Kebijakan Perdagangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Partai Demokrat Liberal Jepang (2003), pertanian perlu mendapat perlindungan karena bisa mengatasi masalah kemiskinan. Subhanallah.\*\*\*

Penulis, dosen Kopertis wil. IV Jabar-Banten dpk. di Unsil.

## Kuartal II, Harga Bahan Pangan Naik

[JAKARTA] Harga komoditas bahan pangan pada kuartal II tahun 2008 diprediksi kembali naik 10-15 persen. Kenaikan harga dikarenakan harga bahan baku industri pangan melonjak naik, sementara produsen sudah menekan margin keuntungan dan menunda kenaikan harga produk pangan sejak pertengahan 2007.

Kondisi tersebut, memaksa produsen membebankan kenaikan harga itu kepada konsumen dan pelaku usaha bidang pangan. Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adi Wisoko, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Ratna Sari Lopies, dan Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Aluisius, secara terpisah, di Jakarta, Jumat (22/2).

Ratna mengungkapkan, harga tepung terigu pada awal kuartal I sudah naik 15 persen. Hal tersebut dipicu kenaikan harga gandum di pasar internasional pada pertengahan 2007, dari US\$ 350 per matrik ton (MT), menjadi US\$ 500 per MT.

Saat ini, harga gandum di pasar internasional kembali naik, bahkan pada Jumat mencapai US\$ 700 per MT. Dampak dari kenaikan tersebut, lanjut Ratna, harga tepung terigu di pasar nasional akan naik secara bertahap sampai 10 persen. Diperkirakan harga tepung terigu mencapai Rp 180.000- Rp 190.000 per 25 kg.

"Produsen tidak bisa terus-menerus menanggung tingginya biaya produksi, sementara harga bahan baku terus naik. Dalam hal ini, produsen sudah memberitahukan kalangan industri makanan, bahwa akan ada kenaikan harga tepung terigu," jelasnya.

Kenaikan harga gandum yang berdampak pada tepung terigu, nantinya mempengaruhi harga makanan berbahan tepung terigu, seperti roti, mi, dan biskuit. Menurutnya, kenaikan tersebut wajar, mengingat kenaikan harga bahan pangan merupakan fenomena global yang terjadi di semua negara.

Kondisi serupa juga melanda komoditas kakao. Menurut Aluisius, harga bahan baku cokelat tersebut sudah naik sejak akhir 2007 lalu. Pada November 2007, harga kakao US\$ 1.800 per ton, lantas naik menjadi US\$ 1.900 per ton. Harga tertinggi semula diperkirakan US\$ 2.100 per ton, namun meleset, karena saat ini telah mencapai US\$ 2.400 per ton.

"Lonjakan harga bahan baku pangan sepertinya merata di semua komoditas. Bahkan diprediksi kuartal II 2008 masih akan naik. Jadi industri makanan dan minuman harus siap beradaptasi," papar Aluisius.

Dampak dari kenaikan bahan baku cokelat, produsen terpaksa menaikkan harga jual kepada industri sebesar 10-15 persen. Saat ini, harga jual bahan baku cokelat bubuk mencapai US\$ 700 atau Rp 6,58 juta per ton, sementara bahan baku coklat cair US\$ 1.000 atau Rp 9,4 juta per ton.

### Sulit Turun

Secara terpisah, Ketua AIMMI Adi Wisoko menjelaskan, harga minyak goreng masih tetap tinggi. Saat ini harga jual dari pabrik Rp 10.300 per kg, sementara harga di tingkat pengecer mencapai Rp 11.500-12.000 per kg. Harapan masyarakat agar harga turun ke level Rp 9.000 per kg sulit terealisasi.

"Kalau harga jual dari pabrik saja lebih dari Rp 9.000/kg rasanya tidak mungkin produsen atau pengecer menjual di bawah itu. Jadi pemerintah dan produsen minyak goreng tidak bisa berbuat apa-apa, karena semuanya bergantung pada harga CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah, Red) internasional," kata Adi.

Saat ini harga CPO di Rotterdam mencapai US\$ 944 per MT. Sebelumnya, pada 2007 harganya US\$ 700 per MT. Adi menjelaskan, apabila harga CPO terus naik, bahkan menyentuh level US\$ 1.000 per MT, harga minyak goreng dipastikan terus melonjak dan semakin sulit turun.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengungkapkan, harga minyak goreng, kedelai, dan tepung terigu sulit turun. Faktor utamanya adalah mahalnya bahan baku.

"Pemerintah mencoba meringankan beban industri dengan menurunkan bea masuk dan menanggihkan PPN (pajak pertambahan nilai). Tetapi apabila harga bahan baku terus naik, otomatis industri menaikkan harga jual produk," papar Mari.

Terkait kebijakan fiskal, Ratna menuturkan, sejauh ini belum berpengaruh besar pada penurunan harga. Dia menjelaskan, pemerintah hanya menanggihkan PPN 10 persen, sementara harga gandum internasional naik 80 persen. Hal yang sama terjadi pada harga minyak goreng yang selalu didorong kenaikan harga CPO dunia.

Sementara untuk bahan baku cokelat, Aluisius menjelaskan, industri masih dibebani bea masuk (BM) impor 5 persen. Untuk itu, kalangan pelaku usaha meminta pemerintah ikut menurunkan BM sebagai upaya menurunkan harga bahan baku cokelat. [EAS/A-17]

## Bencana ekologis dan krisis pangan

Banyaknya bencana yang terjadi seolah menjadi persoalan negara yang tak kunjung ada penyelesaiannya. Setiap kali banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan bencana lainnya, dapat dipastikan akan diikuti dengan besarnya kerugian, baik korban jiwa maupun material. Dan, lagi-lagi pemerintah selalu terlambat dalam melakukan antisipasi dan penanganan pascabencana.

Apalagi dalam hal pencegahan. Pemerintah sepertinya belum mempunyai perencanaan jangka panjang, khususnya menyangkut dampak kerusakan ekologis.

Kepungan bencana banjir di sepanjang Pantai Utara Jawa dan beberapa daerah lainnya pada awal tahun dan pertengahan Februari 2008, sebenarnya memberikan bukti bahwa saatnya bangsa ini merasakan dampak deforestasi yang dulu mungkin tidak dihiraukan.

Sebagai gambaran, laju deforestasi di Sumatra pernah mencapai rata-rata 550.000 hektare per tahun, Kalimantan mencapai rata-rata 860.000 hektare per tahun, Sulawesi rata-rata minimal 206.000 hektare per tahun, dan Papua rata-rata 117.000 hektare per tahun. Pulau Jawa lebih parah karena hutannya hampir tidak tersisa lagi.

Pada 1970-an, kawasan hutan di Indonesia masih seluas 108 juta hektare. Menurut pantauan satelit dari World Bank, jumlah tersebut pada 1995 menurun lebih dari 50%, sehingga kawasan hutan di Indonesia tinggal 57 juta hektare.

Menurut World Bank, apabila laju kerusakan hutan tersebut tidak segera dihentikan, dalam kurun waktu 2005-2015 hutan-hutan alam Indonesia akan punah. Dapat dibayangkan, ancaman bencana alam yang akan kita hadapi pada masa mendatang.

Ketamakan dan keserakahan dalam pengelolaan hutan dan pembalakan liar membuat banyak daerah yang sebelumnya tidak pernah terlanda bencana, kini harus ikut menanggungnya.

Derita yang dirasakan juga tidak hanya saat banjir terjadi. Begitu bencana berlalu, kekeringan panjang sudah terhampar di depan mata. Perubahan iklim telah menyebabkan siklus baru di negeri ini.

Perubahan iklim dan lemahnya daya dukung lingkungan menyebabkan kegiatan produksi rentan mengalami kegagalan.

Ketidakpastian cuaca akan membingungkan petani. Sebagai contoh, kekeringan panjang selama 2006 telah menggeser jadwal tanam petani yang berdampak pada rendahnya persediaan beras pada awal 2007. Bencana banjir sekarang berpotensi mempengaruhi produksi pangan nasional pada 2008.

### Ketahanan pangan

Departemen Pertanian menyebutkan banjir awal tahun lalu telah merusak ratusan ribu tanaman padi di sentra-sentra produksi beras utama di Pulau Jawa. Sedikitnya 132.043 ha tanaman padi di seluruh Indonesia kebanjiran. Dari jumlah itu 42.424 ha dinyatakan puso.

Bencana ini tidak saja merusak lahan pertanian, tetapi juga sarana dan prasarana transportasi seperti jalan dan jembatan yang akan mengancam ketahanan pangan nasional.

Melihat persoalan pangan saat ini, tantangan yang dihadapi pemerintah sebenarnya cukup berat. Harga minyak mentah dunia yang masih berada pada kisaran US\$90 per barel mulai berdampak pada harga pangan pokok, terutama beras yang mulai bergerak naik di sejumlah daerah.

Dibandingkan dengan rata-rata Agustus 2007, saat ini harga beras telah mencapai kenaikan sebesar 7%. Selain harga, masalah pangan juga dihadapkan pada ketersediaan yang mulai menipis. Sementara itu, jumlah produksi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Impor pun bukan lagi solusi yang mudah jika benar-benar terjadi kekurangan pangan. Harga pangan global cenderung naik, sehingga peluang mendapatkan beras murah juga kecil. Walaupun akhirnya impor, rakyat harus membeli dengan harga mahal.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi Pembangunan (OECD) dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) telah mengingatkan bahwa dalam rentang 2007-2016 akan terjadi perubahan struktur dasar perdagangan komoditas pertanian secara permanen dan akan berimbas pada pergeseran pola konsumsi produk pertanian global. Kondisi ini akan menyulitkan bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor pangan.

Perubahan pola konsumsi produk pertanian, khususnya sereal disebarkan oleh meningkatnya permintaan kebutuhan bahan bakar alternatif dunia dalam bentuk etanol dan biodiesel yang menggunakan bahan baku, seperti jagung, gandum, dan kedelai.

Beberapa negara misalnya China, telah mematok produksi etanol 3,8 miliar liter, sehingga kebutuhan jagung untuk etanol juga meningkat dari 3,5 juta ton pada 2006 menjadi 9 juta ton pada 2016. Brasil akan memproduksi etanol 44 miliar liter dan membutuhkan tebu di atas 500 juta ton pada 2016. Begitu juga AS dan Eropa akan menaikkan kebutuhan jagung lebih dari dua kali lipat pada 2016. Bahkan Eropa memperkirakan produksi etanol pada 2016 sebanyak 15 miliar liter.

#### Langkah komprehensif

Menghadapi ancaman ketahanan pangan dan krisis ekologis, pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah yang komprehensif. Dalam menyikapi krisis ekologis, sudah saatnya pemerintah sungguh-sungguh menghentikan segala bentuk kegiatan penggundulan hutan.

Penegakan hukum juga diperlukan kepada pihak-pihak yang bertanggung-jawab atas kerusakan hutan selama ini, seperti para pelaku pembalakan hutan dan "pembalakan hukum" di berbagai instansi terkait.

Untuk mencegah bencana banjir, pemerintah dapat melakukan gerakan pembuatan lubang biopori untuk memperluas daerah resapan air. Dalam jangka panjang, gerakan penanaman hutan kembali (reboisasi) perlu terus digalakkan dengan melibatkan masyarakat secara luas.

Untuk menyikapi ancaman ketahanan pangan, kebijakan pemerintah hendaknya tetap untuk menggenjot produksi beras dalam negeri.

Persoalan petani yang mendesak adalah pembenahan sistem irigasi untuk mengantisipasi kekeringan, meskipun dukungan saprotan lainnya, seperti benih, pupuk dan pestisida juga tetap diperlukan.

Penting juga adanya perbaikan tata niaga yang lebih adil bagi petani serta jaminan harga pada saat panen. Pada jangka panjang, diversifikasi pangan dan pengembangan pangan lokal perlu terus diupayakan.

Dampaknya, kerja sama lebih intensif antara perguruan tinggi, balai penelitian, dan pemerintah daerah harus ditingkatkan untuk pengembangan teknologi yang tepat bagi ketahanan pangan.

Oleh Alim Setiawan S  
Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB



## **Pertanian**

### **Panen Anjlok, Petani Kesulitan Modal Tanam**

Senin, 25 Februari 2008 | 01:05 WIB

Karawang, Kompas - Hasil panen para petani kecil di Kabupaten Karawang dan Sukabumi, Jawa Barat, anjlok akibat serangan hama. Di sisi lain, harga gabah kurang optimal karena kandungan air dalam gabah basah sangat tinggi pada puncak musim hujan ini. Karena itu, mereka kesulitan modal untuk musim tanam kedua.

Taret (65), petani di Desa Cipondoh, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Minggu (24/2), mengatakan, hasil panennya turun dari 6 ton per hektar pada musim lalu menjadi 4 ton per hektar belakangan ini akibat serangan hama putih palsu. "Setelah dikurangi bagi hasil panen sebesar seperenam ke buruh, saya hanya membawa pulang 3,4 ton," keluhnya.

Yani (55), petani di Kampung Bojongsari, Desa Cipurut, Kecamatan Cireunghas, Sukabumi, menceritakan, padi yang terserang hama di daerahnya hanya bertahan 10-15 hari. "Hingga panen tiba, padi yang tersisa kurang dari 50 persen, dengan kualitas yang sangat buruk karena banyak bulir yang kosong," kata Yani menjelaskan.

#### **Harga lebih tinggi**

Dari Banyumas, Jawa Tengah, juga dilaporkan, curah hujan yang saat ini tinggi diperkirakan akan mengakibatkan kadar air dalam gabah tinggi. Karena itu, petani berharap pemerintah menetapkan harga pokok gabah dan beras tahun 2008 lebih tinggi daripada harga yang diberlakukan pada tahun 2007. "Harapan kami, petani tak dirugikan. Harga-harga cenderung mengalami kenaikan sehingga wajar jika harga pokok gabah dan beras juga naik," ujar Manajer Koperasi Unit Desa Patikraja, Banyumas, Fathurrahman. (AHA/MKN/HAN)

## Harga Pupuk di Bengkulu Naik 428 Persen

[BENGKULU] Petani sawit di Bengkulu mengeluhkan tingginya harga pupuk, terutama jenis NPK. Harganya pun kini melangit, dari semula Rp 70.000 menjadi Rp 300.000 per karung isi 50 kilogram (kg) atau naik 428 persen.

Hal itu menyebabkan para petani di Bengkulu, khususnya petani sawit, kesulitan untuk memupuk tanaman mereka.

Yunus (48), petani sawit di Bengkulu kepada SP, Minggu (24/2) mengatakan, sejak dua bulan ini, harga pupuk NPK di Bengkulu sudah beberapa kali mengalami kenaikan, sehingga petani sawit kesulitan membeli bahan penyubur tanah tersebut.

"Sekarang ini, meski harga tandan buah sawit (TBS) di Bengkulu cukup bagus, Rp 1.300/kg, tapi hasil panen tetap tidak seimbang dengan kenaikan harga pupuk, yang hampir lima kali lipat dari sebelumnya," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Sitorus, petani sawit lainnya. Akibat harga pupuk NPA di Bengkulu melonjak, sebagian tanaman sawitnya tidak pupuk. Pasalnya, kebutuhan pupuk untuk tanaman sawit besar dibanding dengan tanaman pertanian lain.

Sementara itu, Kepala Gudang PT Pusri Cabang Bengkulu, Asril mengatakan, pihaknya kurang mengetahui persis apa penyebab melonjaknya harga pupuk NPK di Bengkulu. Sebab, stok pupuk milik PT Pusri saat ini dalam kondisi aman.

"Stok pupuk di gudang PT Pusri Bengkulu sebanyak 700 ton, cukup untuk dua bulan," katanya. [143]

## Revitalisasi perkebunan kopi sudah urgen

Perkopian dunia sudah pulih dari krisis sejak awal 2005 yang ditandai oleh tingkat harga kopi dunia yang cukup menguntungkan bagi petani kopi. Namun, hal ini tidak bisa dimanfaatkan petani secara optimal karena berbagai keterbatasan.

Petani kopi tidak mampu meremajakan maupun merehabilitasi kebun kopi yang umumnya sudah tua renta, sehingga kemampuan produksi dan ekspor kopi Indonesia cenderung terus menurun.

Mengingat komoditas kopi mempunyai peranan cukup penting bagi perekonomian nasional, maka sudah selayaknya perkebunan kopi juga direvitalisasi seperti perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao.

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Perkebunan kopi mampu menyediakan lapangan kerja dan pendapatan kepada lebih dari 2 juta kepala keluarga petani dan menghasilkan devisa lebih dari US\$ 500 juta/tahun pada periode 1994-1998.

Pada 1994, ekspor kopi mampu menghasilkan devisa US\$696,7 juta atau lebih dari 24% nilai ekspor hasil pertanian. Namun, pangsa ekspor kopi terus merosot hingga mencapai titik terendah yaitu US\$182,5 juta atau 7,48% dari nilai ekspor hasil pertanian pada saat perkopian dunia mencapai puncak krisis 2001.

Pada saat itu, banyak petani kopi yang menjadi sengsara karena harga jual kopi berada di bawah biaya produksinya. Di Lampung, biji kopi hanya dihargai Rp1200/kg pada Agustus 2001 sementara di Lahat Sumatra Selatan, biji kopi dihargai lebih rendah lagi yaitu Rp800/kg, sebuah nilai yang tidak pernah terjadi dalam sejarah petani kopi setempat.

Anjloknya harga kopi tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi petani, tetapi juga menimbulkan kerugian miliaran rupiah bagi para eksportir.

Perbaikan harga kopi dunia beberapa tahun terakhir ternyata belum mampu untuk mengembalikan kejayaan kopi Indonesia. Petani kopi masih belum mampu untuk merehabilitasi maupun meremajakan perkebunan kopinya, sehingga produksi kopi 2007 lebih rendah dari pada tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain permintaan kopi domestik terus meningkat, sehingga kemampuan ekspor makin menurun.

### Mulai pulih

Perkopian dunia mulai pulih dari krisis akhir 2004, yaitu setelah harga indikator kopi dunia (ICO) melewati batas minimal kelayakan usaha bagi petani yaitu US\$0,70 /lb atau US\$ 1,5/kg. Pada tingkat harga tersebut, kopi robusta di tingkat petani dihargai sekitar Rp5.000-7.500/kg. Pemulihan harga kopi dunia tersebut dipicu oleh adanya defisit produksi kopi dunia yang cukup besar pada 2003 dan terus berlanjut hingga 2005.

Pada 2004 produksi kopi dunia mengalami defisit sebesar 2,75 juta karung (1 karung = 60 kg) dan defisit meningkat menjadi 10,04 juta karung pada 2005. Kondisi ini memicu peningkatan harga yang cukup tajam pada akhir 2004 hingga Maret 2005. Kemudian harga sedikit berfluktuatif dengan kecenderungan sedikit menurun terkait dengan perkiraan akan terjadinya surplus produksi pada 2006.

Pada 2006, produksi kopi dunia mencapai 125,17 juta karung, sementara konsumsi sebesar 120,38 juta karung, sehingga terjadi surplus produksi sekitar 5 juta karung. Namun surplus tersebut belum dapat menutupi defisit produksi tahun-tahun sebelumnya, sehingga harga kopi 2006 tetap merangkak naik.

Pada 2007, produksi kopi dunia kembali mengalami defisit, sehingga kenaikan harga kopi dunia masih berlanjut. Harga kopi dunia 2007 rata-rata mencapai US\$ 1,07/lb atau US \$ 2,37/kg dan merupakan harga tertinggi sejak 1999 (Gambar). Diperkirakan harga kopi dunia akan bertahan cukup tinggi sepanjang 2008 karena diperkirakan masih akan terjadi defisit produksi.

#### Indonesia tertinggal

Indonesia sebagai salah satu produsen utama kopi dunia seharusnya mendapat keuntungan dengan adanya perbaikan harga kopi dunia, khususnya harga kopi robusta beberapa tahun terakhir.

Sepanjang 2007, harga kopi di berbagai sentra produksi kopi Indonesia cukup memberikan insentif kepada petani. Memasuki musim panen 2007, harga kopi di beberapa daerah seperti Bengkulu, Sumatra Selatan dan Lampung berkisar antara Rp13.500,-/kg sampai Rp16.700,-/kg.

Namun sangat disayangkan, produksi kopi Indonesia 2007 diperkirakan lebih rendah dari produksi tahun-tahun sebelumnya. Produksi kopi Indonesia jauh tertinggal dari produksi kopi Vietnam. Sebagai contoh, produksi kopi Indonesia 2006 hanya sekitar 6,65 juta karung atau hanya sekitar sepertiga dari produksi kopi Vietnam yang mencapai 18,5 juta karung.

Terbatasnya kemampuan produksi tersebut merupakan dampak dari krisis yang melanda perkopian dunia. Pada saat krisis kopi dunia mencapai puncaknya 2001, perkebunan kopi Indonesia banyak yang ditelantarkan, bahkan ada yang dibongkar dan diganti dengan tanaman lain.

Meskipun demikian, secara nasional areal perkebunan kopi tidak mengalami penyusutan yang nyata. Areal perkebunan kopi Indonesia hanya sedikit menyusut dari 1,32 juta ha 2002 menjadi 1,23 juta ha pada 2007, tetapi kemampuan produksinya cenderung terus menurun.

Kondisi ini terjadi karena setelah krisis kopi dunia berlalu, petani kopi tidak mampu untuk melakukan peremajaan ataupun rehabilitasi perkebunan kopi yang umumnya sudah tua renta. Oleh karena itu perlu kebijakan untuk membangkitkan kembali peran kopi bagi perekonomian nasional melalui program revitalisasi.

#### Revitalisasi

Krisis perkopian dunia telah berlalu, tetapi petani kopi tidak mempunyai kemampuan untuk bangkit karena berbagai keterbatasan. Keterbatasan modal, pengetahuan dan infrastruktur merupakan beberapa penyebabnya. Oleh karena itu, program revitalisasi sudah seharusnya juga diarahkan kepada petani kopi seperti yang diterima oleh petani kelapa sawit, karet dan kakao.

Melalui program revitalisasi tersebut petani kopi dibina dan diberikan fasilitas untuk penguatan kelembagaan ekonomi petani, perbaikan infrastruktur, subsidi bunga kredit dan fasilitas untuk memacu perkembangan industri hilir kopi serta pengembangan pasar ekspor.

Hal ini berarti bahwa program revitalisasi harus mencakup seluruh sistem produksi dan distribusi mulai dari sumberdaya hingga produk akhir di tangan konsumen, beserta seluruh pelaku yang terlibat dan kelembagaan penunjangnya.

Peran pemerintah daerah khususnya yang memiliki sentra produksi kopi sangat dibutuhkan dan semua pihak yang terkait dengan agrobisnis kopi dapat bekerja sama dengan baik.

Dengan melaksanakan program revitalisasi tersebut diharapkan petani kopi dan pelaku bisnis pendukungnya bisa bangkit membangun perkebunan kopi yang produktif, berdaya saing dan berkelanjutan serta mampu mengejar ketertinggalannya dari petani kopi Vietnam yang dulunya pernah berguru kepada petani kopi di Lampung. Semoga!

Oleh Herman  
Peneliti Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, Bogor

## **Perbaiki Struktur Pasar Pertanian**

### **Mentan: Sulit Mengubah Kebijakan Menjelang Pemilu**

Selasa, 26 Februari 2008 | 01:41 WIB

Jakarta, Kompas - Ketahanan pangan nasional perlu diperkuat dengan memperbaiki struktur pasar produk pertanian yang tidak sehat. Selama ini petani selalu mendapatkan margin keuntungan terkecil pada mata rantai distribusi. Harga produk pertanian pun ditentukan hanya oleh segelintir pembeli.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Kaman Nainggolan mengemukakan pentingnya perbaikan struktur pasar itu dalam seminar yang digagas Center for Information and Development Studies (Cides) di Jakarta, Senin (25/2).

"Struktur pasar produk pertanian kita sangat sakit. Tidak ada yang bisa membantah hal ini," ujar Kaman.

Praktik oligopsoni terjadi di bagian hulu pemasaran produk pertanian. Hasil panen petani hanya diserap oleh segelintir pembeli. Karena jumlah petani yang menjual hasil panen jauh lebih banyak daripada pembeli, harga pun ditentukan oleh pembeli.

Di sisi lain, konsumen akhir produk pertanian di dalam negeri juga hanya dilayani segelintir distributor besar. Di bagian hilir tersebut, pasar produk pertanian bersifat oligopolistik.

Kaman mengakui, kelembagaan pemasaran hasil-hasil pertanian sampai saat ini belum optimal berperan sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan. Akibatnya, pada saat panen, harga hasil pertanian di sentra produksi turun tajam. Sebaliknya, kenaikan harga setiap musim paceklik juga sangat signifikan.

Menurut Kaman, kelembagaan pemasaran yang menjangkau petani juga kerap dikuasai kelompok tertentu saja.

"Peritel besar dan pelaku industri sebagai konsumen produk pertanian, kan, tidak mungkin membeli dari petani dalam skala kecil-kecil," kata Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Thomas Darmawan.

Sebelum terserap oleh industri dan peritel, produk pertanian dibeli oleh pedagang-pedagang pengumpul. Dari pedagang pengumpul, hasil pertanian diperdagangkan dengan mata rantai panjang hingga dikonsolidasikan oleh distributor besar.

Menyikapi kondisi itu, Thomas berharap, pemerintah lebih serius memberdayakan kembali koperasi petani atau koperasi di tingkat desa untuk mengelola penjualan hasil pertanian.

"Cara paling strategis mengatasi ini tentu lewat revitalisasi KUD, tapi pengelolanya perlu dipilih yang mengerti bisnis, tahu caranya menjual," ujar Thomas.

Sistem pemasaran yang lebih adil juga dipandang sebagai bentuk insentif bagi petani untuk meningkatkan hasil produksi.

Pemerintah janjikan insentif

Secara terpisah, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, pemerintah akan lebih fokus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui insentif dan proteksi.

"Hanya ada dua kunci untuk mengatasi masalah pangan saat ini, yakni dengan pemberian insentif dan proteksi bagi petani," ujar Mentan.

Insentif antara lain diberikan melalui peningkatan subsidi dan pola pembiayaan untuk petani. Pemerintah telah meningkatkan subsidi pupuk dari Rp 7,5 triliun pada tahun 2007 menjadi sekitar Rp 10 triliun tahun ini.

Mentan mengakui, ia tidak cukup puas dengan sistem subsidi pupuk yang kini berlaku. Subsidi saat ini melekat pada harga pupuk yang dialokasikan untuk pertanian. Semakin luas lahan yang dimiliki petani, semakin besar subsidi didapat. Petani gurem pun mendapat subsidi minimal.

Subsidi pupuk diyakini akan lebih tepat sasaran jika diberikan langsung kepada petani. Untuk itu, dibutuhkan pendataan petani yang lebih baik.

"Tapi mengubah kebijakan menjelang pemilu ini sulit, jadi status quo dulu saja. Mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang bisa menyelesaikan masalah ini," ujar Mentan. (DAY)

## Musim Hujan Sebabkan Gabah Kering Anjlok

BANDUNG, (PR).-

Musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan produksi gabah kering bagi sebagian petani menurun. Krisis ini diperparah dengan anjloknya harga gabah kering maupun gabah giling. Menurut anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung Tubagus Raditya, penyebabnya adalah kurangnya tempat-tempat penggilingan gabah dan juga regulasi Badan Usaha Logistik (Bulog) yang masih menerapkan harga berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.

Aturan itu menyebutkan, harga pembelian gabah kering panen dengan kadar air maksimum 25% dihargai Rp 2000,00 per kilogram untuk petani. "Sebaiknya, dicantumkan klasifikasi waktu panen. Sekarang ini lagi musim hujan, produksi gabah kering menurun. Petani mau tidak mau harus tetap menjual gabah agar perekonomiannya tetap berlangsung. Mengacu pada inpres tersebut, harga jual gabah jelas turun drastis," kata Raditya, Senin (25/2).

Ia mengatakan, jika hal tersebut berulang-ulang terjadi, petani akan malas menanam padi. Selanjutnya, akan terjadi kelangkaan beras yang membuat pemerintah harus mengimpor beras dari luar.

Menurut dia, inpres itu sudah bagus, jika dilihat sebagai upaya preventif terhadap permainan harga gabah oleh tengkulak. Namun, jika tidak disesuaikan dengan kondisi cuaca, aturan itu bisa sangat merugikan.

Mesin pengering

Kesulitan yang dihadapi petani saat musim hujan juga diungkapkan staf Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Dadang Hermawan. Petani bisa menyikapinya dengan menggunakan mesin pengering gabah, yang saat ini ada di beberapa tempat di Kabupaten Bandung.

"Di Cangkuang, sudah berdiri mesin pengering dengan kapasitas yang cukup besar untuk mengatasi persoalan gabah yang sulit kering," katanya. (A-132/CA-176)\*\*\*



## Petani Kab. Cirebon Masih Kekurangan Pupuk

SUMBER, (PR).-

Kebutuhan petani Kab. Cirebon akan pupuk urea untuk masa pemupukan pertama dan kedua masih belum terpenuhi. Kekurangan pasokan pupuk tersebut terjadi karena sampai saat ini, janji pihak PT Pupuk Kujang yang bakal segera menutupi kekurangan kebutuhan pupuk, dengan pupuk bantuan dari Pusri, belum juga sampai akibat terkendala cuaca buruk dan gelombang tinggi.

Menurut Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kab. Cirebon, Tasrip Abu Bakar, kekurangan pasokan pupuk terutama terjadi di Kec. Gunung Jati, Suranenggala, dan Kapetakan. Kebutuhan yang tinggi akan pupuk urea di ketiga wilayah tersebut karena ketiga kecamatan itu saat ini sedang sangat membutuhkan pupuk untuk pemupukan pertama dan kedua.

"Kalau kebutuhan pupuk untuk pemupukan pertama dan kedua tidak segera terpenuhi, dipastikan produksi padi untuk panen pertama musim tanam rendeng ini turun. Itu artinya sama saja dengan penurunan tingkat kesejahteraan petani Kabupaten Cirebon," kata Tasrip, Senin (25/2).

Kebutuhan pupuk yang tinggi di ketiga wilayah lumbung beras Kab. Cirebon tersebut karena luas tanaman padi mencapai lebih dari 10.000 ha. Dari luas areal tersebut, sambungnya, kebutuhan pupuk urea mencapai 150 ton/minggu. Selain urea, juga dibutuhkan pupuk SP 36 dan Phonska yang mencapai sekitar 66 ton/minggu.

Saat ini, kata Tasrip, ketersediaan pupuk di 18 kios yang tersebar di tiga kecamatan hanya sekitar 55 persen dari total kebutuhan. Seharusnya, kesadaran petani dalam upaya meningkatkan produksi harus ditunjang dan didukung oleh semua pihak, terutama menyangkut kebutuhan pupuk.

Sementara itu, Kepala Biro Informasi PT Pupuk Kujang, Arifin yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya menjelaskan, posisi stok pupuk kujang di gudang lini tiga saat ini mencapai 10.780 ton. Sementara produksi harian dari dua pabrik yang dimiliki Kujang pada tiga hari terakhir sejak 22 Februari-24 Februari 2008, rata-rata mencapai 3.100 - 3.200 ton/hari.

Diakui Arifin, bantuan pupuk dari Pusri memang belum sampai seluruhnya ke Cirebon sehingga belum bisa menutupi kekurangan stok pupuk di wilayah tersebut.

Namun menurut Arifin, pada 24 Februari 2008, bantuan dari Pusri melalui Cilacap mencapai 1.000 ton sudah datang. Untuk menutupi kebutuhan pupuk di wilayah Cirebon, katanya, pada 26 Februari 2008 hari ini akan datang sebanyak 2.600 ton yang akan didistribusikan ke Kab. Cirebon, Indramayu, Subang, Kuningan, dan Majalengka. (A-92)\*\*\*

## Mentan: Indonesia Bisa Jadi Eksportir Beras

[JAKARTA] Menteri Pertanian, Anton Apriyantono optimistis Indonesia bisa menjadi negara pengekspor beras. Untuk menuju ke sana, bisa dilakukan dengan menggenjot produktivitas dan menaikkan index pertanaman padi.

Sejalan dengan itu, konsumsi beras per kapita harus dikurangi dengan mendorong diversifikasi pangan dari 139,15 kg per kapita saat ini menjadi 106 kg per kapita, secara bertahap hingga tahun 2015.

Hal itu dikatakan Mentan saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional "Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional" yang diselenggarakan oleh Center for Information and Development Studies (Cides) Indonesia di Jakarta, Senin (25/2).

Lebih jauh Mentan menjelaskan, optimisme itu bukan mimpi, namun didasarkan pada bukti-bukti empirik. Ia mencontohkan, melalui program P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional), tahun 2007 Indonesia berhasil meningkatkan produksi padi sampai 4,8 persen. "Capaian tersebut, merupakan pertumbuhan terbesar dalam 15 tahun terakhir," katanya.

Kunci keberhasilan itu, antara lain berkat penggunaan benih unggul. Meski realisasi penggunaah benih unggul bersubsidi baru mencapai sekitar 30 persen, namun mampu meningkatkan produksi padi nasional secara signifikan.

Ke depan, selain meningkatkan produktivitas dengan benih unggul, upaya peningkatan produksi padi nasional masih terbuka, dengan menaikkan indeks pertanaman (IP). Pasalnya, selama ini, IP padi secara nasional masih sekitar 1,5-1,6 per tahun.

Artinya, rata-rata sawah di Indonesia hanya ditanami 1,6 kali per tahun. Jika IP bisa ditingkatkan menjadi 2,0 per tahun, peluang peningkatan produksi bisa lebih dari 13,5 juta ton padi atau setara 9 juta ton beras.

Sementara itu, Eksekutif Cides menawarkan tiga rekomendasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pertama, penyediaan lahan yang memadai untuk petani. Kedua, meningkatkan subsidi untuk petani (pangan) yang dinilai jauh lebih sedikit dibanding subsidi untuk BBM.

Ketiga, perlunya peningkatan peran dewan ketahanan pangan (DKP) dalam menyelesaikan persoalan ketahanan pangan di Indonesia.

Direktur Cides, Syahganda Nainggolan mengatakan, Indonesia mutlak perlu memperluas areal pertanian jika ingin meningkatkan produksi pangan, khususnya karena luas lahan terus berkurang 21.000 hektare/tahun, akibat alih fungsi lahan. Kepemilikan lahan rata-rata 0,25 hektare di Jawa sudah tak ideal lagi. [L-11]

## 5.000 Hektar Tanaman Padi Puso

Rabu, 27 Februari 2008 | 04:28 WIB

Karawang, Kompas - Sekitar 5.000 hektar dari 15.337 hektar tanaman padi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang terendam banjir dipastikan gagal panen. Areal yang tersebar di 10 kecamatan itu terendam banjir lebih dari tujuh hari.

Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Karawang Didy Sarbini HS mengatakan itu, Selasa (26/2)

Usia tanaman bervariasi 7-60 hari. Namun, sebagian besar sekitar 20 hari. "Ketika padi berusia 20 hari, petani rata-rata telah mengeluarkan ongkos produksi Rp 2,3-Rp 2,4 juta per hektar, yaitu untuk mengolah lahan, membeli dan menebar benih, membayar buruh tanam, serta membeli pupuk," kata Didy.

Total kerugian petani akibat puso diperkirakan Rp 11,5 miliar hingga Rp 12 miliar. Jumlah itu belum termasuk kerugian petani akibat hilangnya potensi produksi sebesar 5-6 ton gabah kering panen (GKP) per hektar serta mundurnya masa tanam.

Selain mengalami gagal panen, petani di Karawang saat ini pun dibuat susah oleh rendahnya harga jual gabah, yang mencapai titik terendah dalam beberapa bulan ini. Harga GKP di Kecamatan Klari dan Telagasari, Selasa, misalnya, Rp 2.000 per kilogram (kg).

Omo Ahmad, Ketua Kelompok Tani Sumber Motekar Jaya di Desa Pasirmukti, Telagasari, mengatakan, dalam sepekan ini harga turun dari Rp 2.350 menjadi Rp 2.000 per kg. Hasil panen sejumlah petani di desanya pun rata-rata turun dari 6-7 ton per hektar menjadi 2-5 ton.

Sejumlah petani di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pun mengeluhkan harga GKP yang lebih rendah daripada panen sebelumnya. Saodah, petani Desa Botorejo, Wonosalam, menjual GKP Rp 1.650 per kg. Harga itu jauh di bawah harga pembelian pemerintah tahun 2007, sebesar Rp 2.000 per kg. (A09/MKN)

## Penyerapan Beras Terhambat Aksi Spekulatif

Kamis, 28 Februari 2008 | 05:28 WIB

Palembang, Kompas - Penyerapan beras petani yang dilakukan oleh Bulog Divre Sumatera Selatan terhambat karena pedagang beras berspekulasi menunggu kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP. Padahal, sesuai kontrak, Bulog Divre Sumatera Selatan sudah harus menyerap beras petani 1.400 ton mulai pekan ini.

Kepala Bulog Divre Sumsel Teddy Mulwadi, Rabu (27/2), mengatakan, sampai hari Rabu beras yang sudah diserap 500 ton. Menurut Teddy, persoalan yang dihadapi saat ini adalah harga pembelian beras oleh Bulog yang mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan dinilai kurang tinggi.

Menurut inpres tersebut, HPP gabah kering panen (GKP) Rp 2.000 per kilogram, HPP gabah kering giling (GKG) Rp 2.575 per kilogram, dan HPP beras Rp 4.000 per kilogram. Bulog Divre Sumsel menyerap beras petani dari mitra kerja yang membeli beras petani di sentra beras Sumsel, seperti di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Banyuasin.

"Saat ini persoalan dalam penyerapan beras petani adalah pedagang beras masih berspekulasi harga pembelian beras oleh Bulog akan naik. Jadi, sekarang penyerapan beras oleh Bulog hanya dari pedagang kecil," kata Teddy.

Menurut Teddy, seandainya harga pembelian beras oleh Bulog dinilai sudah sesuai oleh pedagang, Bulog akan kebanjiran beras. Saat harga sudah sesuai, diperkirakan dalam sehari Bulog menyerap 1.000-2.000 ton beras.

Teddy mengatakan, untuk daerah sentra beras di Sumsel, harga pembelian GKP Rp 2.000 per kilogram dinilai sudah cukup menarik bagi pedagang. Adapun untuk daerah di Sumsel yang tidak termasuk sentra beras, harga Rp 2.000 masih kurang menarik. Meskipun demikian, Teddy enggan menyebutkan harga pembelian GKP yang ideal di Sumsel di atas HPP yang ditentukan Inpres No 3/2007. (WAD)

## **Petani Minta IPAL Industri Diawasi BPLHD Jabar Rencanakan Instalasi Pengolah Air Limbah Terpadu**

BANDUNG, (PR).-

Para petani dan warga Kec. Rancaekek Kab. Bandung, yang bergabung dalam Himpunan Penyelamat Lingkungan Kecamatan Rancaekek (HPLKR), berunjuk rasa di DPRD Jabar, Jln. Diponegoro Bandung, Rabu (27/2).

Mereka menuntut pemerintah mengawasi lebih ketat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri yang beroperasi di sekitar Rancaekek. Saat ini, sudah lebih dari 400 hektare areal sawah di kawasan itu tidak produktif akibat tercemar limbah industri.

Limbah tersebut juga mengganggu kesehatan warga di sekitar pabrik. Menurut data dari Puskesmas Linggar, bau limbah dan debu batu bara dari industri diduga mengakibatkan banyaknya warga setempat yang terkena penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan penyakit kulit.

Humas HPLKR Dedi Saepul Rahman mengatakan, Rancaekek sebelumnya merupakan wilayah pertanian yang cukup memberikan andil terhadap kebutuhan lokal.

Namun, produktivitas lahan pertanian itu terus menurun sejak sejumlah pabrik dibangun di wilayah perbatasan Sumedang dan Bandung. Industri tersebut membuang limbahnya begitu saja ke Sungai Cimandi dan Cikijing.

Menurut Dedi, pada tahun 2002 sebenarnya telah dibuat kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat. Kesepakatan itu antara lain mengoptimalkan IPAL sesuai dengan standar teknis yang direkomendasikan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD).

Namun kata Dedi, karena pengawasan IPAL di pabrik-pabrik itu kurang, limbah yang dikeluarkan pabrik tersebut banyak yang masih bermasalah. Selain itu, banyak pabrik yang mengambil air permukaan dari Kali Cikeruh dan Depok, sehingga mengganggu suplai air untuk pertanian.

Aspirasi HPLKR belum mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi D DPRD Jabar karena sedang melakukan studi banding ke Pontianak. Menurut staf Humas DPRD Jabar, Udi Supriyadi, aspirasi petani itu ditampung dan akan disampaikan setelah anggota Komisi D selesai studi banding.

### **IPAL terpadu**

Di tempat terpisah, Kasubid Fasilitas Sengketa Lingkungan BPLHD Jabar Udan Kusdana mengatakan, setiap pabrik sebenarnya telah memiliki IPAL. "Namun, terkadang volume air limbah yang dihasilkan pabrik melebihi kapasitas IPAL," kata Udan di kantornya, Jln. Naripan Bandung, Rabu (27/2).

Udan mengakui, BPLHD mengalami kesulitan dalam mengawasi IPAL karena harus dilakukan secara terus-menerus, sementara lokasi pabrik terpencar. "Bisa saja ada salah satu pabrik yang curang membuang limbah, tapi untuk menyelidiki siapa yang berbuat kami kesulitan," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Udan, BPLHD sudah merencanakan membuat IPAL terpadu. Dengan IPAL terpadu, limbah pabrik dari berbagai macam perusahaan yang ada di wilayah tersebut disalurkan ke satu tempat. IPAL terpadu itu juga mempermudah pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan.

Menurut Udan, konsep IPAL terpadu itu baru dibicarakan dengan Pemkab Bandung, Pemkab Sumedang, dan industri, Selasa (26/2). "Pada prinsipnya perusahaan siap dengan konsep itu, tapi ingin mengkajinya lebih dulu," ujarnya. (CA-185)\*\*\*